



“Apabila Anda selesai membaca buku ini akan terasa adanya benang merah yang menunjukkan kesenjangan antara berbagai kebijakan pendidikan nasional dengan implementasinya di lapangan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam buku ini Anda akan menemukan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang ternyata bertentangan dengan dasar negara, Pancasila.”

Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta



“Dari berbagai artikel yang ada dalam buku ini, ada nilai yang sangat menonjol yang kiranya merupakan bukti kepekaan dan kepedulian Profesor Anita Lie tentang pendidikan di Indonesia. Dari beberapa nilai terdalam ini dapat dilihat perhatiannya yang besar terhadap kemajuan bangsa ini dari sisi pendidikan.”

Romo Prof. Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S.T.
Guru Besar Universitas Sanata Dharma



Anita Lie

Pendidikan: Antara Kebijakan & Praksis

Pendidikan:

Antara Kebijakan & Praksis

Anita Lie



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
2015



*Pendidikan:
Antara Kebijakan
dan Praksis*

Prof. Anita Lie, Ed.D

PENDIDIKAN: ANTARA KEBIJAKAN DAN PRAKSIS

Penulis : Prof. Anita Lie, Ed.D
Editor : Andrias Tri Susanto, S.Pd, M.A
Ilustrator cover : Reinske Anggun Mulia, S.Pd, M.Pd
Foto cover : Onny Wiranda

Copyright 2015

Dicetak oleh:

Rajasa Printing

Jalan Ngagel Jaya Tengah II / 20

Surabaya - 60182

Telp. (031) 5025263/5023082

Fax. (031) 5023710

E-mail: rajasa_design@yahoo.com

ISBN 978-602-96839-7-4

Penerbit: Universitas Katolik Widya Mandala Press

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) dan (6).

Pengantar Editor

Kebijakan pendidikan Indonesia dan praksis di lapangan layaknya menjembatani teori dan praktik. Di satu sisi, ideologi pendidikan nasional yang tertuang dalam perundangan merupakan cita-cita bangsa yang hendak dicapai. Di sisi lain, proses belajar mengajar sering mengalami beberapa kendala di lapangan. Terdapat permasalahan kompleks secara struktural dan kontekstual yang membentuk gugusan problematika dalam mewujudkan-nyatakan ideologi pendidikan nasional. Secara khusus, buku ini secara cerdas ditulis menggunakan perspektif nasionalisme Penulis.

Dalam buku ini, Anda akan menemukan solusi-solusi kreatif bagaimana seyogyanya menjawab tantangan globalisasi dunia atas pendidikan Indonesia. Semuanya disusun secara arif menggunakan poin-poin yang terdapat pada dasar negara Indonesia (Pancasila) tanpa mengesampingkan realita multikulturalisme yang melekat pada budaya bangsa. Malahan, bagaimana semangat “Bhinneka Tunggal Ika ” dapat diterapkan secara riil dan normatif berdasarkan pengalaman-pengalaman yang bangsa.

Secara singkat, kurikulum pendidikan nasional bersifat dinamis mengikuti perkembangan jaman namun tetap patuh pada ideologi bangsa. Buku ini kemudian mengusulkan solusi-solusi yang aplikatif yang dapat dilaksanakan bersama-sama.

Titik berat multikulturalisme yang menjadi corak kebangsaan memiliki peran dua sisi mata uang: tantangan dan kesempatan. Buku ini kemudian menjabarkan lebih lanjut bagaimana kesempatan tersebut dapat diarahkan secara normatif (perundangan) – aplikatif (pemberdayaan guru) dengan menggarisbawahi bahwa kepentingan peserta didik harus tetap dinomer-satukan dalam merealisasikan cita-cita pendidikan nasional.

Pernyataan bahwa “teori dan praktik tidak pernah bisa sejalan” seyogyanya dipahami dengan baik bahwa eksistensi keduanya bersifat signifikan dan jembatan antara kedua hal tersebut adalah jawaban dari permasalahan pendidikan nasional.

Editor,

Andrias Tri Susanto, S.Pd. M.A.

Dua Misi Unik

Buku ini membawa dua misi yang unik yang jarang, atau belum pernah, muncul dalam khasanah ilmu pendidikan di Indonesia. Misi karya pertama Profesor Anita Lie, seorang pakar pendidikan, ini memaparkan hubungan timbal balik antara filsafat pendidikan dan praksisnya dengan gaya bahasa yang mengalir dan mudah dicerna. Dengan pemaparan yang demikian inilah hakikat yang sebenarnya dari Ilmu Pendidikan (pedagogik) ditunjukkan sebagai ilmu teoretis-praksis (Tilaar, 2015). Dengan pendekatan sedemikian akan lahir Ilmu Pendidikan yang relevan dengan perkembangan sosial-budaya Indonesia. Kemudian, misi kedua yang unik dari buku ini dipaparkan oleh beliau sebagai seorang praktisi pendidikan yang mempunyai pengalaman lapangan sebagai seorang guru sejati. Dalam buku ini dikemukakan berbagai kebijakan yang *up-to-date* dalam pembangunan pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan yang ditunjukkan tampaknya bertujuan baik namun dalam implementasinya ternyata terdapat *gap* yang cukup besar antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi di lapangan.

Lebih jauh, berbagai kebijakan mempunyai *impact* yang jauh ke masa depan seperti penerapan prinsip pendidikan multikultural yang sebenarnya berdasarkan kebhinekaan bangsa Indonesia menuju kepada kesatuan bangsa. Pelaksanaan kurikulum yang

menyamarkan tuntutan pembangunan di daerah yang beragam, belum lagi kurikulum yang silih berganti mengikuti peméo “ganti Menteri ganti kurikulum”. Peserta-didik kemudian menjadi kelinci percobaan serta para pendidik yang kurang dipersiapkan menanggung beban kegagalan. Begitu pula pelaksanaan Ujian Nasional yang seharusnya menjadi sarana pemetaan untuk perumusan kebijakan menjadi alat penguasa untuk menunjukkan keberhasilannya dan baik peserta didik maupun pendidik menjadi korban kekuasaan itu. Buku ini juga berisi pandangan-pandangan futuristik mengenai pendidikan dalam era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan masa depan yang perlu kita awasi seperti terbentuknya masyarakat dengan rekayasa genetika dalam buku *Brave New World* karya Aldous Huxley. Buku ini menyajikan juga berbagai masalah kebijakan pendidikan tinggi seperti masalah otonomi pendidikan tinggi, komersialisasi pendidikan tinggi, partisipasi dunia usaha, rendahnya riset dan sedikit menyinggung peranan pendidikan tinggi dalam pengembangan kebudayaan seperti masalah bahasa.

Demikianlah buku ini sarat dengan berbagai masalah yang dihadapi pendidikan nasional dewasa ini. Keunggulan buku ini bukan saja mengetengahkan berbagai masalah krusial pendidikan tetapi juga memajukan berbagai solusi pemecahan dan jalan keluar yang terbaik, lahir dari seorang teorisi yang mumpuni dengan pengalaman lapangan

dari seorang profesional sejati. Setelah Anda selesai membaca buku ini, akan terasa adanya benang merah yang menunjukkan kesenjangan antara berbagai kebijakan pendidikan nasional dengan implementasinya di lapangan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berbagai Undang-Undang merupakan produk kekuasaan politik yang belum tentu dapat dijabarkan dengan tepat dari UUD 1945, khususnya dari Pembukaan yang memuat nilai-nilai Pancasila. Dalam buku ini Anda akan menemukan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang ternyata malah bertentangan dengan dasar negara, Pancasila. Kekayaan masalah yang disajikan serta analisa yang tajam dari seorang pakar yang berpengalaman menjadikan buku ini sebagai bacaan dan kajian wajib bagi para pemerhati, para guru, mahasiswa ilmu pendidikan, para birokrat pendidikan dan anggota legislatif ditingkat Pusat dan Daerah, serta para pakar pendidikan.

Jakarta, 17 Agustus 2015

Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed
Universitas Negeri Jakarta

Menyikapi Persoalan Pendidikan di Indonesia

Banyak persoalan kita hadapi dalam pendidikan nasional kita. Ada persoalan kualitas pendidikan yang dirasakan masih belum tinggi, kurikulum yang sering berubah, yang banyak membingungkan guru karena belum disiapkan sebelumnya. Ada persoalan kualitas guru yang dinilai tidak tinggi, penyebaran guru yang tidak merata di seluruh tanah air, dan persoalan sertifikasinya yang tidak kunjung selesai. Ada persoalan pendidikan karakter yang ingin ditekankan di semua sekolah, persoalan integritas sekolah, indeks integritas ujian nasional, dan ijazah palsu. Dan tidak kalah penting adalah persoalan pemerataan pendidikan serta pendidikan bagi anak-anak bangsa yang miskin. Persoalan-persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan sendirian, tetapi membutuhkan masukan, pemikiran, dan kerjasama dari banyak pihak, agar pengatasannya tepat.

Profesor Anita Lie dalam buku kumpulan karangan yang diberi judul *Pendidikan: Antara Kebijakan dan Praksis* ini, mengungkapkan beberapa gagasannya tentang persoalan pendidikan nasional di Indonesia yang bervariasi. Ia mengulas berbagai persoalan seperti pendidikan multikultural, kebijakan dan implementasi kurikulum, persoalan pengembangan guru, otonomi pendidikan tinggi, sampai dengan persoalan globalisasi pendidikan.

Topik yang paling banyak dibahas adalah persoalan di sekitar kebijakan dan implementasi kurikulum. Ia membahas dengan tajam persoalan perubahan kurikulum, pakta integritas, dehumanisasi pendidikan, UN, sertifikasi guru, termasuk bonus demografi yang kita alami. Yang sangat menarik dari tulisan Profesor Anita Lie adalah ketajamannya dalam menganalisis persoalan pendidikan yang ada. Dengan berbagai sudut pandang, termasuk gagasan beberapa ahli terkait, ia menyoroti persoalan pendidikan yang ada dengan tajam, kritis, dan melontarkan gagasan alternatif untuk dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan. Gagasannya yang kritis terhadap kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah, dengan memperhatikan apa yang terjadi di lapangan, menjadikan gagasannya dapat digunakan untuk memancing pendapat orang lain yang peka pada persoalan pendidikan di Indonesia. Gagasannya dapat menjadi masukan kritis bagi para pemangku kebijakan.

Dari berbagai artikel yang ada dalam buku ini, ada nilai yang sangat menonjol yang kiranya merupakan bukti kepekaan dan konsern Profesor Anita Lie tentang pendidikan di Indonesia. Nilai itu antara lain: pendidikan harus memanusiakan anak didik, perhatian pada pendidikan anak-anak miskin, guru harus lebih bermutu, guru perlu dilibatkan dalam kurikulum bukan hanya sebagai operator kebijakan dari atas, keadilan dalam pendidikan nasional, dan perhatian pada daerah yang terpencil. Dari beberapa nilai terdalam ini dapat dilihat

perhatiannya yang besar terhadap kemajuan bangsa ini dari sisi pendidikan.

Semoga gagasan dalam buku ini dapat membantu pembaca mengembangkan gagasan yang lebih kritis dalam menyikapi persoalan pendidikan di Indonesia dan terutama dalam memutuskan kebijakan bagi perjalanan dan perkembangan pendidikan di tanah air ini.

Selamat membaca!

Yogyakarta, 19 Agustus 2015

Prof. Paul Suparno, S.J.

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Daftar Isi

I.	Pendidikan Karakter dan Multikulturalisme	1
I.1	Pendidikan Karakter sebagai Landasan	2
I.2	Mengembangkan Model Pendidikan Multikultural	6
I.3	Wawasan Multikultural dalam Pendidikan Karakter	10
I.4	Pendidikan Multikultural Lebih dari Sekedar Jargon	16
II.	Kebijakan dan Implementasi Kurikulum	21
II.1	Kedaulatan dalam Pendidikan	22
II.2	Koherensi Sistem dan Kebijakan untuk Kunci Pembangunan	25
II.3	Pakta Integritas: Peluanga Titik Balik Pendidikan	29
II.4	Kurikulum Anti-Korupsi Bukan Solusi	33
II.5	Menyambut Kurikulum 2013	38
II.6	Reformasi Kurikulum Pendidikan Nasional	42
II.7	Perubahan Kurikulum: Berkah atau Masalah bagi Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja	47
II.8	Dehumanisasi Pendidikan	55
II.9	Kesetaraan Pendidikan untuk Para Komunitas Marjinal	59
II.10	Evaluasi Pendidikan: Proses Pengeroposan Pendidikan dan Harapan	62

II.11	Kebijakan Buku yang Memberdayakan	65
II.12	Kegagalan Kurikulum Bahasa Inggris	68
II.13	Permasalahan Pendidikan:	
	Catatan untuk Kepemimpinan Nasional 2014	72
II.14	Pendidikan Alternatif dan Perubahan Sosial	80
II.15	Pendidikan dan Kemiskinan	84
III.	Guru dan Pengembangan Profesionalisme	87
III.1	Waspada <i>Bullet</i> -isasi Pendidikan	88
III.2	Guru, Mengajar Apa atau Siapa?	92
III.3	Guru sebagai Pekerja Budaya	
	dalam Undang-Undang Guru dan Dosen	95
III.4	Independensi Sertifikasi Guru	99
III.5	Mari Kita Mulai Serius	
	dengan Evaluasi Nasional Guru	103
IV.	Pendidikan Tinggi	107
IV.1	Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Asing	108
IV.2	Membedah Industri Pendidikan Tinggi	111
IV.3	Privatisasi Pendidikan dan Implikasinya	116
IV.4	Otonomi dan Keterjangkauan	
	Pendidikan Tinggi	121
IV.5	Peran Korporasi dalam Pendidikan	125
IV.6	Ristek, Universitas, dan Industri	129

V. Pendidikan dan Globalisasi	133
V.1 Perlukah Melanjutkan Studi di Luar Negeri?	134
V.2 Studi di Luar Negeri: Strategi Penyesuaian Dalam Sistem Budaya dan Belajar yang Baru	141
V.3 Media, Sentra Keempat Pendidikan	146
V.4 Pengajaran Bahasa Asing: Antara Sekolah dan Kursus	150
V.5 Hilangnya Warisan Budaya di antara Orang Indonesia di Luar Negeri	155
V.6 Melestarikan Identitas Linguistik dan Keberagaman Budaya	158
V.7 Resolusi Konflik melalui Spiritualitas	162
Daftar Pustaka	167
Biodata Penulis	170

Bab 1

Pendidikan Karakter dan Multikulturalisme

Pendidikan Karakter sebagai Landasan¹

Karakter adalah apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Dalam pemaparan visi misi dan revolusi mentalnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan alokasi yang besar untuk pendidikan karakter (dalam kurikulum SD, 80% pendidikan karakter, etika, dan budi pekerti dan 20% ilmu pengetahuan, pada tingkat SMP, 60-40% untuk pendidikan karakter, dan pada tingkat SMA 20%). Karakter akan menentukan arah peradaban bangsa yang sedang kita bangun. Ketika suatu peradaban sudah kehilangan jiwanya, harapan untuk bangkit dari keterpurukan dan pembaharuan akan ditentukan oleh karakter yang masih tersisa pada sebagian anggota masyarakat. Harapan pun disandarkan pada pendidikan – bukan karena ada orang-orang terdidik yang berperan sebagai guru dan pamong di sekolah – melainkan karena ada tunas-tunas muda yang masih berpotensi menumbuhkan nilai-nilai etis.

Sebagian studi mengenai pendidikan karakter menelaah proses pertumbuhan nilai-nilai moral dan etis dalam individu dan norma kelompok atau budaya. Karakter suatu masyarakat memengaruhi – namun tidak menentukan – karakter warganya. Dalam eksperimen dompet hilang (Thomas Lickona, 2004), tingkat kejujuran paling tinggi ada pada Norwegia dan Denmark dengan 100% pengembalian dompet hilang dan paling rendah di Meksiko (21%). Nilai-nilai kejujuran yang sudah menjadi norma dalam suatu masyarakat akan meneguhkan pertumbuhan nilai-nilai itu dalam setiap warga. Namun sebaliknya, ketika nilai-nilai kejujuran sangat lemah dan tidak bisa menjadi norma dalam suatu masyarakat, nyatanya masih ada segelintir warga yang masih memegang teguh nilai-nilai kejujuran. Ini berarti bahwa harapan selalu ada untuk meningkatkan norma dan karakter para anggota masyarakat.

Dikotomi semu

Alokasi persentase untuk pendidikan karakter dalam kurikulum seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, saya berharap, tidak

¹ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 2 Juni 2014

diterjemahkan menjadi pembagian jam pelajaran, kisi-kisi, teritori guru bidang pelajaran serta penyekatan kurikulum dalam implementasi di sekolah melainkan sebagai ajakan untuk menelaah kembali apa yang telah hilang di sekolah-sekolah kita. Dengan tekanan yang dihadapi dalam kehidupan profesional seorang guru, mulai dari target angka kelulusan ujian, standar mutu, kompetisi untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan peserta didik, sampai dengan kebutuhan guru sendiri atas kesejahteraan yang tidak tercukupi, pendidikan karakter telah tersisihkan padahal pengembangan karakter adalah landasan bagi prestasi akademik yang berkelanjutan.

Menjadi seseorang yang berkarakter berarti menjadi yang terbaik yang bisa dicapai. Tumbuh dalam karakter berarti menumbuhkan baik potensi intelektual maupun etis. Pertumbuhan karakter meliputi kapasitas untuk mengasihi dan kapasitas untuk berkarya. Nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, pengorbanan, loyalitas, dan pengampunan menjadi bagian dari kapasitas untuk mengasihi. Nilai-nilai seperti usaha keras, inisiatif, keuletan dan disiplin adalah bagian dari kapasitas untuk berkarya dan menjadi kompeten dalam kehidupan. Jadi, etos kerja dan kompetensi tidak bisa dipisahkan dari karakter. Seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya adalah salah satu cara dia mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan memengaruhi kualitas kehidupan orang lain. Berbagai studi juga menunjukkan sekolah yang mementingkan pendidikan karakter ternyata mampu mendorong prestasi akademik peserta didik secara stabil.

Kerangka, prinsip, dan strategi pendidikan karakter

Kepemimpinan nasional yang berkomitmen terhadap pendidikan karakter dibutuhkan untuk membangun kerangka dan merumuskan prinsip-prinsip pendidikan karakter. Dalam konteks pendidikan nasional saat ini (ketika peran pemerintah masih sangat kuat dalam penyelenggaraan pendidikan), kepemimpinan nasional diharapkan bisa menjaga koherensi antara visi-misi dengan berbagai kebijakan pendidikan yang menimbulkan implikasi praksis pada tataran sekolah.

Pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan kemitraan keluarga dan sekolah dalam prosesnya. Pendidikan karakter yang sukses terjadi di semua area kurikulum (formal dan tersembunyi serta inti dan ekstra). Hal ini berarti koherensi antara tujuan pendidikan karakter dan praksis pendidikan menuntut kebijakan kurikulum dan penilaian belajar yang holistik. Baik buruknya karakter peserta didik tidak bisa diukur dengan tipe ujian kertas dan pensil.

Praksis UN harus dihentikan karena nilai-nilai ekonomis (target angka kelulusan, sistem insentif dan hukuman bagi para guru, pengukuran prestasi sekolah dan daerah berdasarkan kelulusan UN) yang melandasi penyelenggaraan UN telah menggerus nilai-nilai etis dan moral. Selama bertahun-tahun berbagai manipulasi dalam penyelenggaraan UN yang tidak lagi bisa diatasi oleh birokrasi pendidikan maupun aparat kepolisian telah merusak karakter anak, karakter sekolah, dan karakter masyarakat secara masif. Keterlibatan puluhan guru dalam pencurian soal-soal UN di beberapa daerah merupakan puncak gunung es kerusakan karakter bangsa yang sedang terjadi. Kerangka dan prinsip pendidikan nasional bisa dirumuskan pada tingkat nasional. Namun pada tataran strategi dan implementasi, inisiatif daerah atau bahkan satuan pendidikan akan membuat gerakan pendidikan karakter lebih hidup dan relevan dengan konteks masing-masing satuan pendidikan.

Nilai-nilai pendidikan karakter bisa digali dan dikaitkan dengan berbagai sumber: ajaran agama, Pancasila, nilai-nilai budaya lokal, atau karakter masyarakat setempat. Nilai-nilai dasar karakter bersifat universal namun kontekstualisasi yang sesuai dengan kekhasan masing-masing satuan pendidikan akan membuat pendidikan karakter lebih bermakna dan dinamis. Bahkan keberhasilan pada tingkat lokal akan bisa menjadi inspirasi di seluruh Nusantara. Model pendidikan Taman Siswa yang dimotori Ki Hajar Dewantara dengan model among dan pamong telah menjadi inspirasi secara nasional dan perlu diberi ruang kembali pada tingkat akar rumput. Beberapa bangsa telah berhasil melakukan transformasi sosial dan bangkit dari keterpurukan. Ketika bangsa Indonesia bersiap untuk (kembali) menjadi bangsa besar, karakter

bangsa menjadi modal etis dan intelektual. Pendidikan merupakan ranah yang diperhatikan karena ada anak-anak muda dengan potensi karakter yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan Indonesia menjadi bangsa besar.

Mengembangkan Model Pendidikan Multikultural²

Untuk mengatasi berbagai konflik horisontal, pendidikan seyogyanya berperan membentuk pandangan peserta didik mengenai kehidupan serta meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman. Namun di sisi lain, pendidikan multikultural di Indonesia menghadapi tiga tantangan mendasar.

Pertama, terdapat fenomena homogenisasi yang terjadi sebagai akibat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Para peserta didik yang tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai dengan latar belakang sosioekonomi, agama, dan etnisitas adalah manifestasi dari fenomena tersebut. Terlebih lagi, pasal yang mengatur mengenai pendidikan agama dalam UU No. 20/2003 membuat sekolah-sekolah yang berafiliasi agama merasa enggan menerima peserta didik yang tidak seagama. Dengan demikian, selanjutnya yang terjadi adalah pengelompokan anak-anak berdasarkan agama, kelas sosioekonomi, ras, dan suku. Setiap hari anak-anak ini bergaul dan berinteraksi hanya dengan anak-anak lain dari golongan yang sama. Jika interaksi di luar sekolah juga demikian, pengalaman untuk memahami dan menghargai perbedaan menjadi sangat langka bagi anak-anak ini.

Kemudian, tantangan kedua dalam pendidikan multikultural adalah kurikulum. Berkenaan dengan hal ini, saya telah melakukan penelitian terhadap kurikulum 1994 dengan menganalisa isi 823 teks bacaan dalam 44 buku ajar bahasa Inggris yang digunakan di SMA berdasarkan gender, status sosioekonomi, kultur lokal, dan geografi. Dalam keempat kategori tersebut, buku-buku ini masih menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang sangat membatasi kesadaran multikultural peserta didik. (Lie, 2001 dan 2003).

Ungkapan “*You are what you read*” (Anda dibentuk oleh apa yang Anda baca) perlu melandasi pemikiran para penyusun kurikulum. Jika peserta didik disodori bahan-bahan ajar yang mengandung bias (kelas, gender, etnis, agama, suku), maka peserta

² Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 11 September 2006

didik akan tumbuh menjadi manusia dengan praduga dan prasangka negatif terhadap orang lain yang berbeda. Keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara yang umumnya diakomodasi dalam kurikulum hanya sebatas ikon dan simbol budaya seperti pakaian tradisional, kesenian daerah, dan stereotip suku. Karena keterbatasan penulis buku ajar yang berasal dari daerah terpencil, keberagaman dan kekayaan budaya yang lebih dari tingkat permukaan tidak banyak diungkap dalam materi pelajaran.

Tantangan terakhir dan terpenting adalah guru. Kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia yang pada umumnya di bawah standar merupakan tantangan tersendiri sebelum menugaskan mereka mengelola pembelajaran multikulturalisme.

Kurikulum multikultural

Tilaar (2005) mengupas model pendidikan multikultural di beberapa negara. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun model pendidikan multikultural yang paling sesuai untuk suatu bangsa atau komunitas. Secara khusus, model pendidikan multikultural di Indonesia harus berlandaskan Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita sebagai jaminan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, cita-cita pendidikan multikultural adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia yang cerdas. Manusia cerdas tidak hanya cerdas pandai dan mempunyai kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan serta menyelesaikan masalah melainkan juga bermoral, mempunyai sikap demokratis dan empati terhadap orang lain. Manusia cerdas menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda.

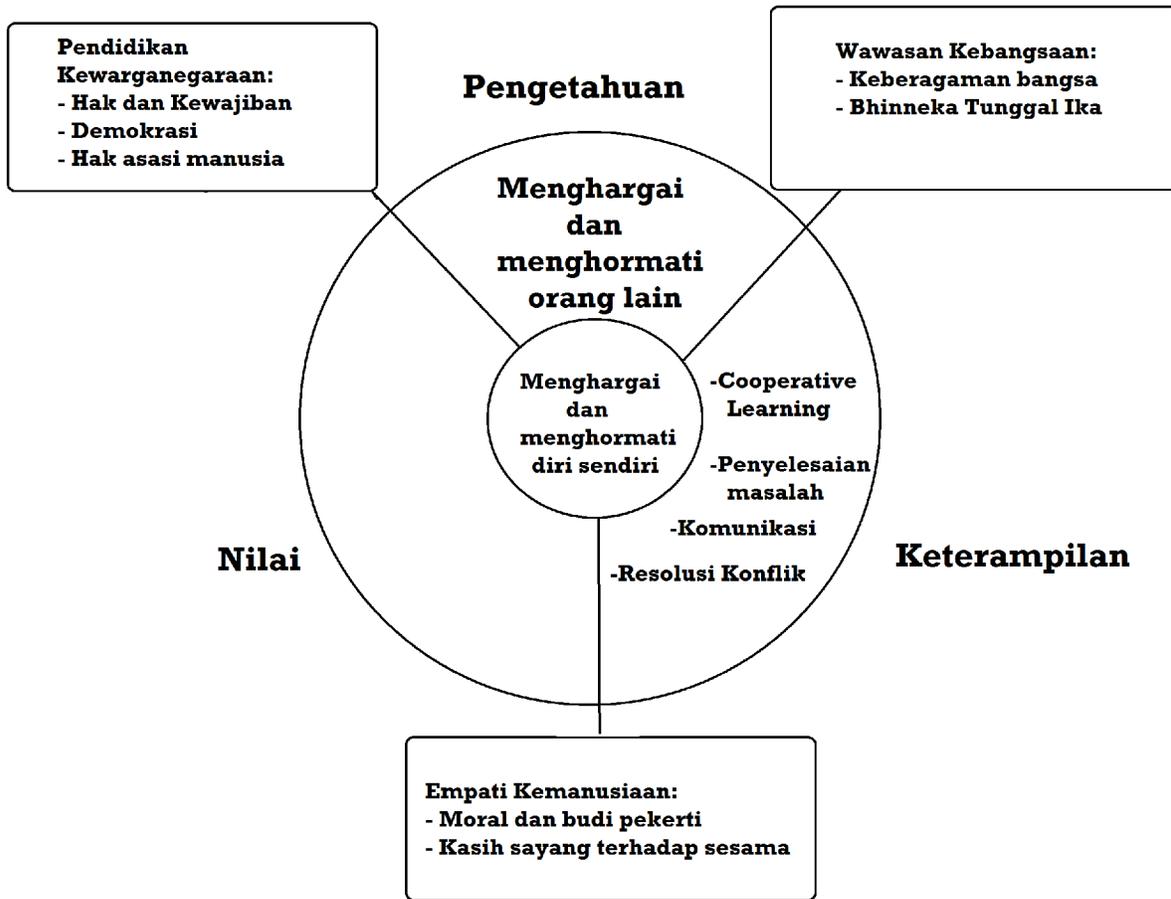
Model pendidikan multikultural mencakup dua hal: kurikulum yang resmi dan *the hidden curriculum* (kurikulum yang tidak tertulis dan terencana namun berupa proses internalisasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang terjadi di kalangan peserta didik). Dalam kurikulum yang resmi, pendidikan multikultural sebaiknya diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan lintas kurikulum. Dengan demikian, wawasan multikulturalisme tidak dimasukkan sebagai beban tambahan

sebagai satu mata pelajaran baru dalam kurikulum yang sudah dirasakan sangat berat oleh guru dan peserta didik.

Model kurikulum multikultural mengintegrasikan proses pembelajaran **nilai, pengetahuan, dan keterampilan** hidup dalam masyarakat yang multikultural. Muatan nilai, pengetahuan dan keterampilan multikultural ini bisa didesain sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan jenjang pendidikan. Muatan-muatan **nilai** multikultural perlu dirancang dalam suatu strategi proses pembelajaran yang mendorong terjadinya internalisasi nilai-nilai. Sedangkan **pengetahuan** multikultural dimulai dari pengenalan, penghormatan, dan penghargaan terhadap diri sendiri (termasuk institusi yang membentuk diri sendiri seperti keluarga dan lingkungan terdekat). Sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan jenjang pendidikan, pengenalan dan penghormatan atas diri sendiri ini diperluas dan dikembangkan menjadi pengenalan dan penghargaan terhadap orang lain. Misalnya saja pengetahuan mengenai berbagai suku, etnis, adat, tradisi, agama, bahasa daerah yang ada di satu daerah, di Indonesia, dan di dunia. Kemudian, **keterampilan** untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural termasuk keterampilan bernegosiasi, mengemukakan dan menghadapi perbedaan, resolusi konflik, *cooperative learning*, dan *problem solving*. Keterampilan ini dapat dimasukkan dalam proses pembelajaran baik melalui kegiatan akademik maupun non akademik.

Untuk melaksanakan model pendidikan multikultural ini, beberapa pekerjaan rumah harus dikerjakan mulai dari rancangan integrasi kurikulum, standarisasi buku dan materi, pengembangan materi dan kurikulum, pengembangan profesional dan pelatihan guru, rancangan kegiatan, sampai dengan rancangan monitoring dan evaluasi. Diagram di halaman berikut ini mengilustrasikan skema model kurikulum multikultural tersebut.

Model Kurikulum Multikultural



Wawasan Multikultural dalam Pendidikan Karakter³

Sementara perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan proses globalisasi tidak dapat dicegah lagi, sekolah dan pendidikan diharapkan bisa membantu membentuk pandangan dan perspektif peserta didik mengenai dunia dan kehidupan serta meningkatkan potensi kontribusi mereka terhadap kehidupan. Pengembangan karakter peserta didik seharusnya merupakan bagian proses pendidikan di sekolah-sekolah. Namun kenyataannya, lembaga-lembaga pendidikan justru terjebak dalam semangat kompetisi pasar bebas. Lembaga-lembaga pendidikan saling berlomba dalam pencapaian kuantitatif seperti jumlah peserta didik, nilai UN, akreditasi, dan sebagainya. Ketika lembaga-lembaga tersebut sedang terjebak dalam semangat ini, peserta didik pun dilupakan dan diabaikan sebagai manusia yang harus dipahami dan difasilitasi untuk mengembangkan karakter kemanusiaannya.

Widiyanto (2005) bahkan menengarai bahwa lembaga pendidikan di Indonesia ternyata tidak memahami anak sebagai seorang pribadi dan bahwa paham tentang peserta didik telah mengalami degradasi pada masa Orde Baru hingga saat ini dibandingkan pada masa Hindia Belanda dan Masa Orde Lama. Pada masa Hindia Belanda dan Masa Orde Lama, para guru, penilik sekolah dan segala perangkat dalam institusi pendidikan menganggap siswa sebagai peserta didik sehingga para guru sungguh-sungguh bertanggung jawab atas perkembangan siswanya secara penuh. Bahkan pada masa Orde Lama ketika kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit, semangat guru tidak turun karena adanya rasa nasionalisme. Guru tidak hanya memperlakukan siswa sebagai peserta didik tetapi juga sebagai anak kandungnya sendiri. Namun sejak masa Orde Baru, kerusakan sistem terus terjadi. Pada masa Orde Baru, siswa tidak lagi diperlakukan sebagai peserta didik tetapi sebagai objek pada segala lapisan mulai dari negara, sistem, sekolah, guru, dan pasar.

³ Artikel ini pernah dimuat di *Basis* pada Juli-Agustus 2007

Negara dan sistem pendidikan nasional memandang anak sebagai bagian dari hitungan angka (angka partisipasi kasar dan murni, angka yang lulus UN dan tidak lulus UN, dan sebagainya). Sekolah juga menghitung peserta didik sebagai komponen dalam perkalian dengan uang sumbangan masuk atau iuran pendidikan untuk mendapat perolehan dana pembangunan sekolah. Guru mengajar peserta didik di kelas untuk mencapai berbagai target (kelulusan dalam UN, sumber penghasilan tambahan bagi guru berupa bimbingan belajar tambahan, buku ajar, seragam, studi tur dan sebagainya). Pasar pun dengan sigap melihat celah peluang dan menggandeng sekolah dan guru untuk merebut peserta didik sebagai *captive market* untuk berbagai keperluan (konsumen buku ajar, produk-produk lainnya mulai dari kaus kaki sampai dengan rokok).

Kebutuhan peserta didik

Institusi pendidikan telah kehilangan arah dan kesadaran akan kebutuhan peserta didik secara mendasar. Secara sederhana, yang dibutuhkan peserta didik di sekolah sebenarnya mencakup tiga hal, yakni **lingkungan belajar yang aman dan nyaman, rumah kedua** (model orang dewasa yang mengasahi dan bisa mereka hormati), dan **komunitas teman sebaya**.

Lingkungan belajar yang aman dan nyaman meliputi sarana dan prasarana fisik serta suasana belajar. Banyaknya gedung sekolah yang ambruk atau rusak mencerminkan betapa rendahnya bangsa ini menempatkan prioritas pendidikan. Perencanaan pembangunan pendidikan belum menempatkan peserta didik sebagai subjek melainkan hanya sebagai objek atau angka-angka yang dalam proyek dikonversikan menjadi rupiah yang bisa dimanipulasi. Selanjutnya, suasana belajar merupakan bagian dari suatu strategi proses pembelajaran di mana peserta didik memosisikan diri sebagai subjek yang terlibat dalam proses dengan suka hati. Akan tetapi, apa yang sangat dominan terjadi di sekolah formal di Indonesia justru sebaliknya. Proses belajar memosisikan anak sebagai instrumen untuk mencapai angka kelulusan UN yang tinggi atau instrumen untuk menambah catatan prestasi sekolah dalam berbagai ajang lomba.

Ketika tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anak muda justru terperosok ke dalam jurang korupsi dan menjadi pelaku kerusakan nilai dan ketika keluarga mengalami krisis dan disintegrasi, sekolah seharusnya menjadi rumah kedua dan menyediakan model orang dewasa yang mengasahi peserta didik dan bisa mereka hormati. Sayangnya, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya.

Model guru yang dengan sungguh-sungguh mendidik siswa sebagai peserta didik, bahkan seperti anak kandungnya sendiri seperti yang terjadi pada masa Hindia Belanda dan masa Orde Lama, sudah amat langka. Karena kerusakan sistem, peserta didik seringkali terjepit sebagai bagian dari fenomena *korban-makan-korban-lain*. Peserta didik menjadi korban para guru yang memperlakukan mereka sebagai objek kejengkelan dan kemarahan. Guru juga korban dari perlakuan "pahlawan tanpa tanda jasa" oleh sistem. Dengan beban jam mengajar minimal 24 jam—di banyak sekolah bahkan kenyataannya guru mengajar sampai dengan 36 jam per minggu. Akibatnya, peserta didik juga menjadi korban para guru yang mengajar dengan kurang sungguh-sungguh sehingga peserta didik harus mengambil les tambahan pada guru tersebut di luar jam sekolah atau membeli soal-soal ulangan dengan cara terselubung. Selanjutnya, peserta didik juga menjadi korban upaya pencarian keuntungan tambahan dari penjualan buku pelajaran, seragam, dan sebagainya. Fenomena *korban-makan-korban-lain* sudah merupakan bagian dari *the hidden curriculum* yang terekam dalam benak peserta didik di sekolah-sekolah formal. Pada masa sekarang, sosok guru yang mengasahi peserta didik hanya bisa dijumpai di daerah-daerah terpencil di mana nilai-nilai materialisme masih belum berpengaruh secara signifikan.

Sosok guru yang dihormati peserta didik pun makin berkurang. Yang peserta didik hadapi di sekolah justru model guru minder tapi *keminter* (Darmaningtyas, 2005) karena profesi guru sedang mengalami krisis hebat. Kelayakan dan kompetensi guru, seperti yang ditunjukkan dalam hasil Uji Kelayakan dan Kompetensi Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih di bawah standar padahal uji kompetensi ini masih sangat mendasar dan

belum banyak menyentuh nilai, pengetahuan dan keterampilan yang lebih kompleks dan maju. Pendekatan legal seperti UU No. 14 tahun 2005 tentang profesi Guru dan Dosen serta pendekatan ekonomi seperti peningkatan gaji guru saja tidak serta merta cukup untuk mengatasi krisis dalam profesi guru ini.

Komunitas teman sebaya juga merupakan kebutuhan penting peserta didik. Sekolah adalah replika kehidupan dalam masyarakat. Peserta didik seharusnya disiapkan di sekolah untuk memasuki kehidupan bermasyarakat. Karakter anggota masyarakat yang baik adalah manusia yang bisa menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain serta bisa hidup berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Kasus tewasnya beberapa calon praja di IPDN dan terbunuhnya seorang peserta didik SD yang dikeroyok oleh empat orang kawannya di Jakarta (*Kompas*, 4 Mei 2007) menunjukkan betapa lembaga-lembaga pendidikan belum mampu memfasilitasi terbentuknya komunitas teman sebaya yang bisa saling mendukung dalam proses pertumbuhan dan pengembangan karakter.

Ketegangan antar etnis, suku, agama, dan kelas sosial yang pernah terjadi di Indonesia membuat orang bertanya-tanya mengenai proses persiapan di sekolah. Memang beberapa kemajuan dalam perjuangan demokrasi telah dicapai namun perubahan demografis dan tekanan sosial ekonomi telah membawa manusia dari berbagai latar belakang untuk saling berinteraksi dan meningkatkan potensi kecurigaan dan keterasingan (alienasi).

Sementara perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan proses globalisasi tidak dapat dicegah lagi, sekolah dan pendidikan belum mampu membantu membentuk pandangan dan perspektif peserta didik mengenai dunia dan kehidupan serta meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman (Lie, 2003). Dalam beberapa dekade terakhir ini studi interkultural telah memungkinkan para pendidik untuk melihat semua area paradigma yang tidak kelihatan dalam sistem akademik dan konteks kultural yang memarginalkan perempuan, kaum minoritas, anak dengan kebutuhan khusus, dan orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok yang dominan

atau *mainstream*. Karena tekanan dan kesibukan luar biasa yang dialami sekolah dalam memenangkan kompetisi pasar bebas, perhatian terhadap wawasan keberagaman sebagai bagian dari pendidikan karakter telah diabaikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural menghadapi berbagai tantangan, antara lain homogenisasi, kurikulum, dan guru.

Homogenisasi

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan nasional adalah kesenjangan yang terjadi seiring berjalannya proses globalisasi. Dalam dunia pendidikan, tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan selalu menjadi isu sangat menarik untuk dikaji. Ketika ada banyak gedung sekolah ambruk dan peserta didiknya masih berlutut dengan kemiskinan yang bersifat struktural, segelintir anak justru menikmati proses belajar dengan sarana dan prasarana kelas dunia. Bahkan, beberapa sekolah menamakan diri sebagai sekolah nasional plus dan mengadopsi kurikulum asing. Terlebih lagi, karena ketidakmampuan negara dalam memastikan keterjangkauan pendidikan bermutu oleh semua anak bangsa, para peserta didik jadi tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai dengan latar belakang sosioekonomi, agama, dan etnisitas.

Lingkungan belajar yang sangat homogen tentunya bukan lahan persemaian yang sehat bagi tumbuhnya kesadaran untuk hidup bermasyarakat dalam damai dengan warga lain yang berbeda. Kesadaran multikultural kemudian menjadi sulit diharapkan untuk tumbuh secara alamiah di lingkungan belajar semacam ini. Salah satu dampak otonomi daerah dalam dunia pendidikan adalah adanya variasi dan disparitas pelayanan pendidikan. Sejumlah daerah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama sehingga bisa mengharapkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Namun, beberapa daerah lain tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama sehingga mutu pelayanan pendidikan bagi anak-anak bangsa di daerah tersebut sangat minim. Ketika pemerintah (daerah) tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap sistem pendidikan secara optimal, kekosongan yang terjadi (kebutuhan terhadap pendidikan bermutu)

kemudian diisi oleh pihak lain. Memang UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin pengelolaan sekolah oleh masyarakat. Di satu sisi, pengelolaan oleh masyarakat ini sangat membantu upaya pencerdasan bangsa. Pengelola sekolah swasta patut dihargai sebagai mitra pemerintah.

Pendidikan Multikultural Lebih dari Sekedar Jargon⁴

Warga negara Indonesia mempunyai visi tentang multikultural yang secara elok tercantum dalam semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika”. Setiap peserta didik Indonesia pasti tidak asing mendengar semboyan ini karena semboyan tersebut selalu diajarkan dan diulang-ulang di satu pelajaran ke pelajaran lain dan satu ujian ke ujian lain. Namun, pada tingkatan implementasi, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika belum terintegrasi ke dalam sistem pendidikan baik pada kurikulum resmi (*official curriculum*) maupun pada kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Kurikulum resmi mencakup apa yang direncanakan, diajarkan, dan diujikan sementara kurikulum tersembunyi mencakup apa yang tidak secara resmi direncanakan dan diajarkan namun dipelajari oleh para peserta didik. Kurikulum resmi dapat mengajarkan mereka nilai dari rasa hormat dan bahkan menguji mereka tentang konsep dari nilai ini. Akan tetapi, ketika para murid menyaksikan bagaimana guru-guru mereka menyalahgunakan otoritas dan mendiskriminasikan murid-murid lain berdasarkan kepercayaan, nilai-nilai budaya, warna kulit, atau kelas mereka, apa yang para peserta didik pelajari pada realita yang terjadi berlawanan dengan apa yang diajarkan secara resmi.

Guru

Bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan dan tidak terpisahkan dari kurikulum adalah guru. Pentingnya peran guru dalam penyampaian kurikulum bermutu tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun sayangnya, kelayakan dan kompetensi guru seperti yang ditunjukkan dalam hasil Uji Kelayakan dan Kompetensi Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih di bawah standar. Padahal uji kompetensi ini masih sangat mendasar dan belum banyak menyentuh wawasan multikulturalisme guru. Para guru kita butuh untuk diberi pencerahan lebih jauh tentang nilai-nilai pendidikan multikultural dan lebih dilengkapi lagi dengan strategi-

⁴ Artikel ini pernah dimuat di *The Jakarta Post* pada 8 Agustus 2007 dengan judul asli “*Education beyond Jargon*”

strategi, metode-metode, dan media dalam menyampaikan nilai-nilai dari kurikulum resmi ini dan juga nilai-nilai dari kurikulum tersembunyi. Menghindari sekolah-sekolah yang berafiliasi agama, sepasang rekan saya terkesan dengan apa yang dijanjikan oleh pendidikan multikultural seperti yang disampaikan pada sebuah brosur dari sekolah laboratorium (*laboratory-school*) yang dijalankan dan dioperasikan oleh sebuah fakultas kependidikan di sebuah universitas negeri yang bergengsi. Maka dari itu, mereka kemudian memutuskan untuk mendaftarkan anak mereka di sana dengan harapan mendapatkan pendidikan yang berkualitas sementara mengembangkan kepekaan nasionalisme dalam sebuah lingkungan pembelajaran dengan budaya yang beragam. Hari demi hari berlalu, kedua orang tua ini kemudian terkejut untuk mendapati bahwa anak mereka tidak mendapatkan haknya untuk budayanya diakui dan malah dibanjiri dengan budaya dari mayoritas murid-murid di sekolah tersebut (termasuk pengajaran agama). Kepala sekolah kemudian menjelaskan bahwa sekolah tersebut tidak mampu secara finansial untuk mempekerjakan seorang guru khusus yang memiliki pengetahuan tentang atau yang bersedia untuk mengakui dan menghormati budaya si anak.

Semakin maraknya dorongan ke arah pengembangan sekolah-sekolah nasional yang berstandar internasional atau “nasional plus” telah menggerakkan para sekolah untuk mengejar keunggulan melalui cara-cara yang mereka percayai akan menarik murid-murid yang lebih baik dan mendapatkan pengakuan atas status sekolah tersebut. Banyak dari sekolah-sekolah ini disibukkan dengan menginterpretasikan kata “plus” tersebut dan bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya dalam menyampaikan apa yang mereka pertimbangkan akan membentuk aspek-aspek “plus” termasuk pendidikan multikultural. Akan tetapi, agaknya terdapat sebuah pengabaian tentang apa yang dimaksud dengan sekolah-sekolah “nasional”. Apakah dengan sederhana mengadopsi kurikulum nasional dan terakreditasi pada sistem pendidikan nasional? Ataukah seharusnya sekolah-sekolah tersebut juga berpartisipasi dalam mengembangkan visi bersama yang membentuk negara ini?

Diskusi kebangsaan Indonesia tidak akan pernah ada habisnya dan telah memicu perdebatan yang sengit di antara kalangan pakar sosial. Wacana yang tiada habisnya tentang kebangsaan ini telah juga muncul ke permukaan dalam tindakan-tindakan praktis di sekolah melalui cara-cara yang merugikan bagi para peserta didik yang tidak datang dari latar belakang *mainstream*. Seorang guru di Merauke, Theresia Esi Samkakai, menyesalkan keengganan para guru untuk memahami budaya-budaya Papua yang berujung kepada kegagalan sistem dalam mendidik anak-anak Papua (*Kompas*, 6 September 2007). Kepedulian Mama Esi ini juga dirasakan oleh banyak guru yang lain, terutama mereka yang termasuk di dalam suku-suku asli yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Para guru, yang banyak di antaranya datang dari daerah dengan peradaban yang lebih maju dan telah dicuci otak dalam sistem pendidikan nasional, tidak peka atas kebutuhan untuk membangun sebuah model dan proses pembelajaran yang mencakup partisipasi peserta didik dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya mereka sebelumnya. Kurangnya kemampuan peserta didik berbahasa Indonesia dan ketidak-pahaman atas cara-cara hidup di perkotaan seringkali diinterpretasikan sebagai kebodohan dan kemalasan. Sejumlah besar anak-anak dari suku Dayak, Amungme, Kamoro, dan banyak suku lainnya tidak dapat bertahan dalam sistem tersebut dan memiliki skor di antara yang terendah pada UN. Para guru mereka tidak waspada atau bahkan mengabaikan hak anak untuk berbudaya dalam rangka mendapatkan status mereka sebagai guru dalam sistem tersebut. Seorang guru seperti Butet Manurung yang bekerja dengan anak-anak Suku Dalam di Jambi (Sokola Anak Rimba) akan tetap jujur ikhlas dan konsisten dengan panggilannya untuk menghargai hak para murid untuk berbudaya hanya jika dia melanjutkan bekerja di luar sistem tersebut.

Jika sekolah juga berpartisipasi dalam mengembangkan visi bersama yang membentuk negara ini, pemerintah (baik nasional maupun lokal) seharusnya memberikan ruang gerak untuk sekolah-sekolah tersebut mengembangkan dasar pengetahuan dan menanamkan rasa hormat atas nilai-nilai budaya dan keberagaman budaya Indonesia. Untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural

lebih dari sekedar jargon, sistem pendidikan nasional seharusnya memulai sebuah petualangan yang dapat menyentuh anak-anak yang kurang mampu. Petualangan tersebut dapat dimulai dengan pengetahuan pendidikan berpaham konstruktif tentang melek huruf pada sekolah-sekolah tinggi pelatihan guru baru. Pendidikan ini termasuk menggabungkan bahasa ibu dan budaya para murid pada program-program sekolah.

Terlebih lagi, tugas dari para guru yang berada di daerah-daerah di lain tempat yang berbeda dengan budaya asal mereka seharusnya mendahulukan kompetensi sosial dan budaya. Sementara akan sulit untuk menemukan para guru yang dapat berbicara menggunakan bahasa lokal, adalah masuk akal untuk mensyaratkan para guru untuk memiliki hati yang berusaha untuk memahami bahasa-bahasa dan budaya-budaya lokal para murid. Pada akhirnya seharusnya terdapat komitmen yang lebih dalam menyampaikan pelatihan *in-service* yang berkualitas bagi para guru untuk meningkatkan strategi-strategi, metode-metode, dan media mengajar mereka yang menghargai keberagaman budaya.

Pengadopsian sebuah kurikulum nasional demi kepentingan pemeliharaan integritas bangsa ini yang dibayar dengan harga penghapusan hak anak atas budayanya sendiri akan cepat atau lambat berubah menjadi bumerang yang mengacau-balaukan kepekaan nasionalisme.

Bab 2

Kebijakan dan Implementasi Kurikulum

Kedaulatan dalam Pendidikan⁵

Rumusan visi-misi kedua kandidat presiden yang bersaing dalam pemilu tahun 2014 tidak bisa menghindari menggunakan pernyataan yang jargonistik. Dalam komunikasi politik, memang jargon dibutuhkan untuk menarik hati calon pemilih dan menggalang dukungan. Mencermati Agenda dan Program Nyata dalam bidang pendidikan oleh kedua mantan kandidat presiden mengarahkan kita untuk berupaya menggali filosofi pendidikan yang mungkin terangkum dalam jargon yang sudah disampaikan kepada masyarakat serta poin-poin yang masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Untuk mengingatkan kembali, jargon dalam visi misi Mantan Kandidat Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta “Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur serta Bermartabat” untuk bidang pendidikan diterjemahkan dalam Agenda IV: meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan. Sementara itu, jargon dalam visi misi Mantan Kandidat Presiden Nomor Urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian” diluncurkan untuk menghadapi tiga masalah pokok bangsa: merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Selanjutnya, pembangunan bidang pendidikan secara spesifik diwadahi dalam tiga dari sembilan agenda prioritas. Agenda ke 5 merumuskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dalam program “Indonesia Pintar.” Agenda ke-8—penataan kembali kurikulum pendidikan nasional untuk revolusi karakter bangsa—akan mengedepankan pendidikan kewarga-negaraan dan mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional termasuk UN. Agenda ke-9 mengajukan pendidikan kebhinekaan.

⁵ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 21 Juni 2014

Kedaulatan untuk mengatasi sindrom “mengejar ketertinggalan”

Dua kandidat presiden yang bersaing dalam Pemilu tahun 2014 pada intinya sama-sama mengemukakan semangat kedaulatan. Menggali dari amanat Pancasila 1 Juni 1945, Jokowi-JK memaknai kedaulatan sebagai hak setiap warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya dalam kesadaran akan adanya kesaling-tergantungan dalam kehidupan bermasyarakat dan antar bangsa. Tentu saja visi-misi serta agenda kedua mantan kandidat presiden masih perlu dijabarkan lebih lanjut dan jelas, terutama dalam kaitan dengan kebijakan dan praksis pendidikan. Satu isu kedaulatan dalam sistem pendidikan nasional adalah kemandirian sikap dalam menentukan tujuan dan target kebijakan pendidikan nasional secara spesifik.

Partisipasi Indonesia dalam berbagai tes internasional (sejak tahun 1999 pada TIMMS dan tahun 2000 pada PISA serta PIRLS 2006) menunjukkan capaian yang masih masuk dalam kategori rendah. Jebloknya posisi Indonesia selama beberapa kali partisipasi tampaknya belum mampu mendorong otoritas sistem pendidikan nasional untuk mendongkrak mutu pendidikan dalam dua masa pemerintahan. Bahkan, kegagalan dalam tes-tes internasional ini tampaknya makin membuat Indonesia terjebak dalam sindrom “mengejar ketertinggalan.” Ekseks dari sindrom ini di antaranya adalah manipulasi dalam pelaksanaan UN dan kebanggaan semu terhadap prestasi-prestasi beberapa individu cemerlang di pentas internasional. Pertanyaan strategis yang harus didiskusikan dan dijawab adalah apakah Indonesia akan terus mengikuti tes-tes internasional ini sambil terus berusaha merangkak pada tangga pencapaian? Ataukah sebaiknya Indonesia merumuskan dan memantapkan dahulu visi, misi, program kerja serta menentukan sendiri target-target pencapaian pendidikan yang lebih relevan dengan kondisi riil? Titik tengah kedua posisi ini adalah partisipasi secara terseleksi dan bertahap seperti yang dilakukan China yang diwakili Shanghai dan Hong Kong.

Artikel ini tidak menawarkan jawaban cepat atas kedua pertanyaan di atas. Keputusan yang harus dibuat tentunya harus berlandaskan kajian data secara komprehensif dan telaah ideologi pendidikan yang termaktub dalam visi misi serta agenda bidang pendidikan. Berbagai tes internasional mempunyai aspek positif yang bisa bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan nasional, di antaranya adalah gambaran dan ukuran pencapaian pembelajaran serta dorongan untuk mutu pembelajaran. Soal-soal dalam tes-tes tersebut didesain untuk memberikan gambaran capaian tingkat berpikir dan menyelesaikan masalah. Sayangnya, keikut-sertaan Indonesia selama lebih dari satu dekade ternyata belum mampu menggulirkan reformasi pendidikan secara signifikan. Bahkan, tampak ada ketidak-konsistenan dalam acuan pencapaian serta keterputusan dalam kebijakan pendidikan. Jika Indonesia mengambil posisi pertama (terus berpartisipasi dalam tes-tes internasional), otoritas sistem pendidikan nasional perlu merumuskan desain dan strategi reformasi sistem pendidikan serta menjadi akuntabel atas pencapaiannya. Jika Indonesia memutuskan untuk menerjemahkan kedaulatan sebagai menentukan sendiri apa yang terbaik bagi anak-anak usia sekolah tanpa *benchmark* internasional, otoritas sistem pendidikan nasional perlu mempunyai alternatif pengukuran target-target pencapaian pendidikan.

Koherensi Sistem dan Kebijakan untuk Kunci Pembangunan⁶

Dinamika globalisasi makin menuntut pemerintah untuk membangun sistem pendidikan bermutu yang dapat mengantarkan anak-anak bangsa sebagai warga dunia yang bermartabat, bermoral, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsanya dan perkembangan peradaban dunia. Dalam konteks negara yang sedang berkembang, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih sangat sporadis namun tetap potensial untuk terus digalang dan ditumbuhkan secara optimal. Semangat dan pemikiran Mantan Wapres Boediono (Kompas 27 Agustus 2012) diharapkan bisa membangkitkan dan meneguhkan kesadaran bersama bahwa pendidikan adalah kunci pembangunan. Visi pembangunan dan kemajuan bangsa melalui pendidikan perlu didukung dengan koherensi sistem dan kebijakan pendidikan. Ada tiga isu sentral dalam sistem dan kerangka kebijakan pendidikan di Indonesia: sentralisasi-desentralisasi, komitmen pendidikan untuk semua, dan kejelasan sasaran.

Sentralisasi-desentralisasi

Banyak negara—maju maupun berkembang, masih terus berproses dan bereksperimen dalam tarik-ukur sentralisasi dan desentralisasi. Ketika dinamika institusi-institusi politik dan ekonomi sedang berlangsung dalam tarik ulur, sistem pendidikan di Indonesia juga terus bereksperimen dalam kebijakan pusat-daerah. Ada banyak kajian tentang kemajuan pembangunan pendidikan negara-negara maju dan kaitannya dengan pembagian wewenang pusat-daerah. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang unik dan tidak bisa dibandingkan secara langsung. Namun ada pelajaran berharga yang bisa diambil untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam tarik ulur pusat-daerah, tiga area kebijakan pendidikan perlu diperjelas, yakni kebijakan kurikulum dan UN, pembiayaan, serta pendidik dan tenaga kependidikan. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memuat delapan

⁶ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 30 Agustus 2012

standar. Empat di antaranya—standar isi dan standar kompetensi (menyangkut kurikulum), standar pembiayaan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan mengandung nilai strategis dalam pencapaian visi pembangunan pendidikan sementara empat lainnya terlalu instrumental dan teknis (misalnya, standar sarana dan prasarana mengatur jumlah minimal ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, dsb.).

Standar pembiayaan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan juga memegang peran strategis dalam pembangunan pendidikan secara nasional. Belajar dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang berhasil (Kanada, Finlandia, Jepang, Korea, dan Singapura), dibutuhkan komitmen serius terhadap kebijakan pembiayaan dan rekrutmen/pengembangan pendidik. Dalam konteks Indonesia sekarang ini, belum saatnya menyerahkan kedua hal ini sepenuhnya pada komitmen dan kejujuran pemerintah daerah. Ada variasi komitmen dan kompetensi kepala daerah yang masih terlalu besar. Secara nasional, alokasi minimum 20% dari APBN (sekitar Rp.200 triliun pada 2010) untuk pendidikan sudah menghasilkan peningkatan akses terhadap pendidikan melalui besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) namun kualitas masih menjadi masalah besar. Bank Dunia mencatat permasalahan ketidak-efisienan dalam pengeluaran pendidikan.

Pendidikan bermutu untuk semua

Ketika beberapa negara maju sudah beranjak dari kebijakan “pendidikan dasar untuk semua” menuju pengembangan *knowledge workers*, Indonesia masih tetap harus konsisten terhadap komitmen “pendidikan dasar untuk semua” sambil melakukan lompatan strategis agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan bermutu.

Sayangnya, masih ada kesenjangan antara deklarasi komitmen dengan praktik. Di daerah-daerah terpencil, masih banyak anak “lulusan” Sekolah Dasar yang belum kompeten baca-tulis-hitung. Sementara itu, keluarga kelas menengah dan atas berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah berstandar

internasional, baik dalam struktur pemerintah seperti SBI dan RSBI maupun sekolah-sekolah negeri dan swasta yang telah membeli kurikulum asing. Sudah saatnya, pemerintah pusat maupun daerah menggunakan indikator lebih dari sekedar APK dan APM untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan. Pengabaian terhadap anak-anak miskin dalam sistem pendidikan nasional kelak akan berakibat pada ketimpangan dan gejolak sosial yang terlalu mahal.

Kejelasan sasaran: apa yang mau dicapai?

Apakah kita mengejar sebagian negara maju dengan mendorong sebanyak-banyaknya anak muda untuk menjadi sarjana dan *knowledge workers*? Atau kita cukup realistis dengan situasi bahwa sebagian anak muda kita akan menjadi pemimpin yang terdidik sementara sebagian lainnya cukup menjadi terlatih dan terampil? Jawaban YA pada pertanyaan pertama terkesan humanis dan demokratis namun sangat tidak realistis untuk saat ini. Sebaliknya, kita mungkin tidak suka menjawab pertanyaan kedua karena mengingatkan pada rekayasa manusia ke dalam lima kasta: Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Epsilon dalam novel *Brave New World* karya Aldous Huxley walaupun sesungguhnya kecemasan terhadap fenomena kastanisasi muncul dari pengelompokan anak berdasarkan kelas sosial di sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatan standar.

Dalam catatan Bank Dunia, hanya 4% anak berusia 18-20 tahun dari kuintil pendapatan paling rendah yang bisa menikmati pendidikan tinggi. Penyelesaian terhadap permasalahan kesenjangan ini perlu dimulai dari pengakuan terhadap realita kemiskinan yang sedang kita hadapi dan pemahaman mengenai sumber daya yang kita punyai. Strategi penyelesaian masalah perlu dibuat secara bertahap dengan kejelasan sasaran di atas prinsip keadilan bagi semua anak. Pembangunan universitas, politeknik dan akademi komunitas perlu memerhatikan tahapan dan kejelasan sasaran dalam strategi penyelesaian masalah secara jangka panjang. Percepatan dan perluasan pendidikan dengan lebih serius kita harapkan bisa menjadi energi bagi tumbuhnya sikap kepemimpinan

non-partisan dalam beberapa dekade mendatang dalam pembangunan pendidikan yang bertanggung jawab dan kerja keras pemerintah serta masyarakat agar bonus demografi bisa benar-benar berlanjut pada kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Pakta Integritas: Peluang Titik Balik Pendidikan⁷

Dalam rangka menyambut UN tahun 2015, para kepala sekolah dan kepala Dinas Pendidikan melakukan penandatanganan Pakta Integritas untuk mendeklarasikan janji kejujuran. Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan menerima penandatanganan Pakta Integritas oleh 110 kepala sekolah se-Surabaya dengan disaksikan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam hal ini, Surabaya bukanlah yang pertama mendeklarasikan komitmen kejujuran ini. Pada tahun ajaran 2009/2010, DIY menanggung akibat ketidakkulusan tertinggi (meningkat 400%) namun mendapatkan pengakuan dari BSNP sebagai provinsi dengan penyelenggaraan UN paling jujur. Sebagai satu kota yang menuju sembilan besar untuk sistem informasi inovasi pelayanan publik terbaik, sudah saatnya status Surabaya sebagai barometer bagi upaya peningkatan mutu pendidikan beranjak ke tingkat yang lebih tinggi dari sekedar capaian persentase kelulusan UN. Tantangan berikutnya adalah menembus kesemuan dan meraih capaian mutu pendidikan secara nyata dan jujur.

Alasan kejujuran dan hambatan

Kejujuran adalah landasan bagi pengembangan karakter. Sia-sialah berbagai upaya perbaikan pendidikan jika di penghujung perjalanan pada setiap jenjang, peserta didik menyaksikan atau bahkan diarahkan untuk terlibat dalam praktik kecurangan berjamaah mulai dari bocoran soal dan kunci jawaban sampai dengan guru pengawas ujian memberikan jawaban. Perusakan karakter guru dan peserta didik sudah terjadi secara masif di seluruh tanah air melalui penyelenggaraan UN selama dekade terakhir ini

Perencanaan pembangunan pendidikan membutuhkan gambaran nyata dan benar tentang kondisi pendidikan nasional dan daerah. Berbagai indikator seperti angka partisipasi sekolah dan angka kelulusan sekolah tidak akan berarti jika perolehannya ternyata merupakan kebohongan publik. Strategi pengembangan

⁷ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 9 April 2014

pendidikan yang berlandaskan data-data semu juga tidak akan efektif karena tidak tepat sasaran.

Hambatan utama dalam gerakan titik balik menuju kejujuran dalam penyelenggaraan UN justru tidak berasal dari lingkungan pendidikan, melainkan dari lingkaran politik yang makin dikukuhkan di media massa. Pemanfaatan "prestasi" daerah maupun nasional berdasarkan indikator semu kelulusan UN 100% serta berbagai capaian lainnya dilakukan untuk kepentingan pencitraan kepemimpinan politik. Pencitraan ini ibarat nyala api yang mendapat bahan bakar dari pemberitaan di media massa yang sering menyoroti angka kelulusan daerah pada akhir tahun akademik.

Tekanan berlapis dari kepala daerah kepada kepala dinas yang kemudian dilanjutkan kepada pengawas dan seterusnya kepada kepala sekolah berujung pada fenomena kecurangan berjamaah yang sudah sangat gamblang dilihat oleh masyarakat. Kecurangan yang disaksikan dan bahkan ikut dilakukan oleh para anak muda yang diharapkan akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan tentunya akan menjadi penyakit yang mematikan.

Tindakan konkret

Tampaknya, kecurangan berjamaah ini sudah mencapai titik jenuh pada berbagai kalangan. Untungnya, beberapa daerah sudah sampai pada titik kesadaran untuk berbalik ke titik nol dan mulai dari kejujuran. Tekad Walikota bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya dan juga beberapa daerah lain untuk menegakkan integritas dalam penyelenggaraan UN perlu diapresiasi dan didukung. Jika landasan kejujuran ini disertai kerja keras yang efektif dan ternyata bisa menghasilkan kelulusan yang tetap tinggi tentunya akan bisa menjadi sumber inspirasi daerah lain. Akan tetapi, jika kejujuran ini kemudian harus dibayar dengan harga angka ketidak-lulusan yang meningkat pada tahap awal, komitmen kejujuran harus lebih didukung dan dikukuhkan. Peserta didik, guru, kepala dinas dan bahkan kepala daerah pun tidak perlu malu dengan situasi ini. Ada banyak sekali variabel yang kemudian harus ditelaah. Melalui komunikasi publik yang jelas, masyarakat justru

akan merasa bangga terhadap kepala daerah yang berani bersikap jujur, menanggung risiko kejujurannya, dan menentang arus demi pembentukan karakter mulia para orang muda. Dunia pendidikan mencatat keberanian Kepala Dinas Pendidikan DIY Prof. Suwarsih Madya yang menanggung risiko kemerosotan angka kelulusan pada tahun ajaran 2009/2010 sebagai harga dari suatu kejujuran. Kepercayaan publik terhadap pimpinan perlu dibangun di atas fondasi kejujuran. Masyarakat sudah makin cerdas dan tidak lagi mudah dibohongi.

Komitmen kejujuran tidak cukup hanya pada penandatanganan pakta integritas. Komitmen ini perlu dijaga dengan langkah-langkah konkret dan serius. Pertama-tama, segala kemungkinan terjadinya ketidak-jujuran harus dipikirkan dan diakhiri. Pengalaman bertahun-tahun dalam penyelenggaraan UN seharusnya sudah bisa menjadi bekal untuk upaya pencegahan kecurangan UN mulai dari penggandaan soal, distribusi, administrasi, koreksi, sampai dengan pelaporan.

Kedua, pelanggaran dalam UN tidak semestinya ditolerir dengan label *ekses* dan *oknum*. Ini bukan persoalan persentase dalam statistik. Dalam pendidikan, rasio kecurangan yang sangat kecil pun sudah menjadi persoalan sangat serius karena akan sangat merusak karakter anak dan bangsa. Nila setitik rusak susu sebelanga. Setelah pakta integritas, tindakan sangat tegas perlu diberlakukan untuk memberikan efek jera. Skandal kecurangan guru dalam ujian ternyata juga terjadi di Amerika Serikat. Juri memutuskan kepala dinas pendidikan beserta 35 pimpinan sekolah dan guru bersalah atas manipulasi nilai ujian di negara bagian Atlanta pada akhir Maret 2013. Kepala Dinas, Dr. Beverly Hall yang pernah dinobatkan sebagai Kepala Dinas teladan pada 2009 diancam hukuman penjara 45 tahun. Sistem pendidikan Atlanta telah menghabiskan \$2,5 juta untuk investigasi pelanggaran ini.

Ketiga, refleksi atas fenomena perlu ditindak-lanjuti dengan perbaikan sistem. Temuan paling penting dalam skandal di Atlanta adalah bahwa sistem imbalan bagi guru dan pejabat yang berhasil menaikkan nilai ujian dan hukuman bagi yang tidak justru telah

memicu pelanggaran kode etik pendidik. Maka dari itu, sistem UN di negara ini seyogyanya harus diinvestigasi dan ditinjau ulang.

Akhirnya, kejujuran tidak berarti kebodohan dan kegagalan. Kemerosotan drastis angka kelulusan UN di DI Yogyakarta hanya terjadi di tahun awal gerakan kejujuran dihidupkan. Dengan kerja keras, kinerja pendidikan di provinsi ini menjadi lebih baik dari tahun ke tahun bukan hanya dari statistik melainkan juga dari motivasi dan moral para insan pendidikan di dalamnya. Seorang pengawas sekolah dari Kabupaten Sleman, Yulia Sri Prihartini, membanggakan kinerja pendidikan di provinsinya dan melakukan tugasnya mendampingi sekolah dan para guru dengan sepenuh hati karena dia tidak ditekan untuk melakukan pekerjaan manipulasi yang bertentangan dengan nuraninya. Kebanggaan dan kegembiraan seorang pendidik dalam melakukan tugas merupakan modal dasar yang tidak dicatat dalam statistik namun akan mengantarkan anak muda menjadi pemimpin yang berkarakter dan cerdas.

Kurikulum Anti-Korupsi Bukan Solusi⁸

Menindak-lanjuti sebuah diskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan pernah mengumumkan rencana-rencana untuk memasukkan satu modul anti korupsi pada Kurikulum 2011 (*The Jakarta Post*, 23 Desember 2010). Hal ini tentu saja sebuah niat yang mulia untuk mengajari anak-anak menjadi jujur dan bermoral. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran untuk menanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Penyusunan sebuah modul anti-korupsi untuk diintegrasikan ke dalam Kurikulum 2011 mungkin sebuah tugas yang spesifik dan konkret yang dapat diwujudkan dalam dalam waktu dekat. Akan tetapi, mentransformasi nilai-nilai kejujuran pada kaum muda kita membutuhkan lebih dari sekedar dokumen-dokumen kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan lembar kerja tentang anti-korupsi.

Di tahun 1920, Hugh Hartshorne dan M.A. May melakukan serangkaian studi kepada 11.000 peserta didik sekolah yang berusia antara delapan hingga enam belas tahun untuk mengukur kejujuran dengan cara memberikan mereka berbagai macam bentuk ujian. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kejujuran bukanlah sebuah ciri khusus yang fundamental dan secara signifikan dipengaruhi oleh situasi. Para peneliti menuliskan bahwa “kebanyakan dari anak-anak tersebut akan berbohong pada situasi tertentu dan tidak pada situasi-situasi lainnya. Berbohong, berbuat curang, dan mencuri seperti yang diukur oleh situasi-situasi ujian yang digunakan dalam studi ini sangatlah tidak berkaitan.”

Sebuah studi lain dalam pengenalan karakter dilakukan oleh dua psikolog dari Princeton University yang bernama John Darley dan Daniel Batson (1973). Kedua peneliti ini mereka ulang sebuah simulasi dari cerita Alkitab tentang perumpamaan Orang Samaria yang Murah Hati dan mengkondisikan kelompok-kelompok seminari teologi Princeton dalam situasi-situasi yang berbeda. Studi ini menyimpulkan bahwa putusan akan hati seseorang tidak begitu

⁸ Artikel ini pernah dimuat di *The Jakarta Post* pada 25 Januari 2011 dengan judul asli “*Anti-corruption Curriculum Is Not The Solution*”

penting ketimbang konteks langsung perilaku yang ditampilkan. Bahkan ketika satu kelompok dari para seminaris ini berpikir tentang cerita Orang Samaria yang Murah Hati, mereka tetap tidak tergerak untuk menolong seorang korban di sepanjang jalan mereka dan memilih untuk tetap pergi berlalu.

Dalam buku terlarisnya berjudul *The Tipping Point*, Malcolm Gladwell berpendapat lebih jauh bahwa tindakan kriminal memiliki sifat menular. Gladwell mengutip teori *The Broken Window* (Jendela yang Pecah) yang dikemukakan oleh James Wilson dan George Kelling yang menyatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil yang tidak terelakkan dari ketidak-teraturan. Jika sebuah jendela yang pecah dan ditinggal tanpa diperbaiki, orang-orang yang berjalan melewatinya akan menyimpulkan bahwa tidak seorangpun yang peduli. Tidak lama, beberapa jendela yang lain juga akan pecah dan pikiran anarkis akan segera berkembang dan menyebarluas. Teori ini juga dapat diterapkan pada kebiasaan berlaku curang di antara anak-anak sekolah. Berbohong, mencontek, dan mencuri yang dilakukan oleh para peserta didik akan tumbuh sebagai sebuah embrio perilaku korupsi di kemudian hari ketika mereka beranjak dewasa. Lebih buruk lagi, tindakan mencontek yang didukung oleh para guru mereka dan sistem pendidikan seperti pada kasus pembenaran cara apapun agar bisa lulus Ujian Nasional (UN) akan lebih jauh menguatkan pembentukan kebiasaan-kebiasaan dan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan korupsi. Selain itu, lingkungan eksternal di luar sekolah menunjukkan bahwa nilai-nilai dan perilaku-perilaku korupsi berhasil menemukan cara untuk mengalahkan sistem di negara kita. Hal-hal ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat kuat yang diserap oleh para peserta didik sekolah dibandingkan dengan kurikulum anti-korupsi yang didiktekan kepada mereka.

Sebagai sebuah tindakan kriminal, korupsi merajalela. Berita baiknya adalah seperti halnya wabah yang dapat ditanggulangi melalui pengendalian lingkungan, kecenderungan untuk melakukan perilaku-perilaku korupsi juga dapat dicegah. Dalam berbagai cara, anak-anak secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Situasi-situasi dapat dan seharusnya dibentuk sedemikian rupa

sehingga tindakan mencontek dan berbohong dapat dihalangi. Usia sekolah adalah kesempatan dan periode untuk membentuk kebiasaan untuk menanamkan karakter-karakter integritas.

Kunci untuk pendidikan karakter yang efektif di sekolah-sekolah adalah bukan dengan mengembangkan modul-modul untuk ditambahkan ke dalam kurikulum yang akan lebih jauh membuat kewalahan para guru; hal ini dikarenakan cakupan kurikulum yang sudah terlalu luas dalam menjamin penguasaan selama proses belajar mengajar. Sedangkan, terdapat cara-cara yang lebih efektif lainnya untuk menanamkan kejujuran dan integritas pada anak-anak muda melalui sekolah-sekolah.

Yang pertama dan utama, gerakan untuk pembentukan perilaku anti-korupsi seharusnya bukan sebuah kebijakan yang dari atas ke bawah (*top-down*) melalui modul-modul dari pemerintah pusat yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Apa yang pasti akan mengikuti kemudian adalah sebuah pembelajaran hafalan yang membuat para murid berhenti pada tingkatan menghafal. Pembentukan nilai-nilai dan perilaku-perilaku anti-korupsi seharusnya tumbuh sebagai sebuah gerakan sosial yang berpusat pada masing-masing sekolah sebagai unit operasional. Menanamkan karakter-karakter integritas seharusnya dilakukan dari sekolah ke sekolah dan dari individu ke individu. Pada tahap ini dimana budaya korupsi tidak terkendali, kuantitas hendaknya tidak dijadikan sebagai sebuah indikator kesuksesan. Maka dari itu, untuk memulai sebuah efek wabah nilai-nilai dan perilaku-perilaku anti-korupsi untuk menyebar, inisiatif-inisiatif dengan skala kecil di berbagai tempat seharusnya dimulai dan dikembangkan.

Berdasarkan penemuan dalam bidang ilmu syaraf (*neurosains*) dan psikologi sosial, Gladwell mengutip angka ajaib 150 dalam teorinya yang bernama *The Power of The Few* dengan memulai wabah yang menggerakkan banyak orang. Agar berfungsi dengan baik dan tertanam dalam hubungan-hubungan sosial yang efektif, sebuah komunitas sebaiknya membatasi ukurannya hingga kurang lebih 150 anggota. Sekolah-sekolah kecil seharusnya mendapatkan keuntungan dengan menciptakan situasi-situasi yang mendukung

pembentukan kebiasaan bersikap jujur dan berintegritas dari satu orang ke orang lain. Sementara itu, sekolah-sekolah yang besar seharusnya berusaha untuk mencari cara untuk memberikan perhatian yang lebih kepada masing-masing peserta didik secara individu dengan cara membagi kelompok peserta didik ke dalam kelompok-kelompok mentoring dan supervisi yang lebih kecil.

Kemudian, betulkan jendela yang rusak itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan patut diberi penghargaan atas upayanya merevisi kebijakan tentang UN dengan cara memberikan otoritas kepada sekolah sebagai partner dalam menentukan syarat-syarat kelulusan dan menjadikan UN bukan sebagai acuan utama kelulusan. Pedoman yang kemudian harus dilakukan adalah menggerakkan para guru dan peserta didik. Perilaku mencontek atau berbuat curang, berbohong, dan mencuri seharusnya ditindak tegas. Hal ini tidak hanya berlaku dalam lingkup ujian tetapi juga pada hal-hal lain seperti sertifikasi guru, penggunaan anggaran sekolah, dan akreditasi sekolah.

Lebih jauh, ini adalah waktu yang tepat untuk mendesain sebuah proses pembelajaran dan asesmen dimana mencontek tidak lagi relevan. Para murid seharusnya dinilai bukan melalui seberapa banyak fakta yang mereka bisa hafal tetapi lebih kepada seberapa baik mereka bisa menyelesaikan masalah, sejauh mana kreativitas mereka bisa berguna bagi masyarakat, dan seberapa efektif kinerja mereka dalam mengkomunikasikan pikiran-pikiran mereka kepada orang lain. Ujian pilihan ganda yang terstandarisasi umumnya dirancang untuk target berskala besar sebagaimana ujian tersebut dapat memenuhi tujuan deskriptif statistik dari proses tertentu. Sebagai tambahan, dimensi-dimensi lain dari progresi (peningkatan) atau regresi (penurunan) hanya dapat digambarkan oleh penilaian yang lebih kualitatif dan personal.

Kecenderungan untuk mentransformasi budaya anti-korupsi dengan memulai dari sekolah sudah tepat. Pembentukan kebiasaan seharusnya dimulai sejak dini. Ekspektasi-ekspektasi yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya secara fundamental bermanfaat sebagai hasrat politik

yang murni dalam rangka memicu pergerakan nasional melawan korupsi. Gerakan nasional ini akan efektif jika, dan hanya jika, proses belajar mengajar tidak dipusatkan kepada modul-modul yang berstandar nasional tetapi pada peneladanan sosial dari pengembangan karakter.

Menyambut Kurikulum 2013⁹

Wacana yang berkembang di masyarakat terkait dengan Kurikulum 2013 sudah sangat marak. Ada berbagai persepsi dan kritik yang sudah berkembang dan perlu dihargai sebagai bagian dari proses pematangan kurikulum yang sedang disusun. Terlepas dari cemooh "ganti menteri, ganti kurikulum" dari kalangan masyarakat, kurikulum memang harus senantiasa berubah seiring dengan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, kritik dari kalangan industri justru diarahkan pada keengganan dunia pendidikan untuk merespon perubahan dalam masyarakat dan mentransformasi diri.

Selama era reformasi, ini adalah ketiga kalinya kurikulum ditelaah dan dikembangkan dalam skala nasional setelah Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Publik sedang menantikan bagaimana kelanjutan Kurikulum 2013 ini dan apa yang akan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk perbaikan kurikulum selanjutnya serta dampak apa yang bisa diharapkan pada keluaran sistem pendidikan di masa mendatang sebagai hasil dari intervensi pemerintah melalui pengembangan kurikulum ini.

Substansi perubahan

Dua substansi yang ramai diperbincangkan di media massa terkait dengan perubahan kurikulum adalah pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam belajar. Secara mendasar, ada empat elemen perubahan dalam Kurikulum 2013, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar), Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan memerhatikan pengembangan nilai, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan empat Kompetensi Inti (penghayatan dan pengamalan agama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan) menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar pada setiap

⁹ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 5 Desember 2012

kelas. Perubahan Standar Isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif (Standar Proses). Perubahan pada Standar Proses juga berarti perubahan strategi pembelajaran yang menuntut guru untuk merancang dan mengelola proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan di mana peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.

Perubahan Struktur Kurikulum telah memancing reaksi pro-kontra terkait dengan pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Matematika pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Integrasi Kompetensi Dasar yang biasanya diwadahi dalam mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia menuntut guru untuk terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogi mereka agar proses pembelajaran tematik-integratif bisa mengantarkan peserta didik mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Sebagai bagian penting dalam rangkaian desain kurikulum, Standar Penilaian pun seyogyanya perlu berubah di kemudian hari. Penilaian yang mengukur hanya hasil pencapaian kompetensi harus bergeser menjadi penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan hasil dan proses.

Proses pengembangan kurikulum

Pengembangan Kurikulum 2013 ini merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang, mulai dari Wakil Presiden, para birokrat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian lain yang terkait, akademisi, budayawan, agamawan, ilmuwan, pengembang kurikulum, dan guru. Proses panjang dan intensif dalam pengembangan Kurikulum 2013 meramu dan mengolah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Tentu saja adu argumentasi di antara anggota tim pengarah, tim inti, dan tim teknis pengembangan selama proses tidak

bisa dihindari malah justru memperkaya dan mematangkan desain kurikulum yang baru.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan uji publik yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 2012 dan 2013 diharapkan bisa melibatkan para pemangku kepentingan dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Dalam era demokrasi, partisipasi dan keterlibatan publik akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kurikulum yang sedang dipersiapkan untuk dilaksanakan pada tahun ajaran 2013. Rasa kepemilikan ini akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum dengan lebih efektif dibandingkan dengan imposisi dari otoritas pendidikan terhadap satuan pendidikan dan masyarakat. Tentu saja, rancangan Kurikulum 2013 tidak mungkin sudah memuaskan semua pihak secara optimal. Demikian pula, tidak semua anggota masyarakat yang mempunyai aspirasi terhadap sistem pendidikan nasional bisa ikut dilibatkan dalam kegiatan uji publik.

Di negara yang sedang memperjuangkan dan memelihara demokrasi, ada banyak saluran penyampaian aspirasi di luar kegiatan uji publik yang secara resmi diadakan oleh pemerintah. Kecemasan dan kritikan yang sudah diungkapkan di media massa selama ini bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Masukan yang diharapkan dari publik mencakup—tapi tidak terbatas pada—perspektif tentang Kompetensi Inti yang melandasi penjabaran Kompetensi Dasar pada setiap jenjang, struktur kurikulum, pengintegrasian IPA dan IPS pada jenjang SD, penambahan jam belajar, penghapusan penjurusan di SMA, dan optimalisasi potensi keberhasilan kurikulum.

Dalam teori kurikulum, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum—termasuk pembelajaran—dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, setiap kurikulum mempunyai potensi keberhasilan dan

faktor penghambat. Termasuk dalam faktor penentu keberhasilan adalah komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru, dan desain penilaian belajar peserta didik.

Apakah Kurikulum 2013 ini sudah memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tentunya masih memerlukan komitmen, perjuangan, dan kerja keras para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kesiapan para pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana pada tingkat tata kelola pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran.

Reformasi Kurikulum Pendidikan Nasional¹⁰

Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan sangat mendasar dalam era globalisasi. Hal ini serupa dengan apa yang digambarkan oleh Charles Dickens, *'tis the best of times and the worst of times* (ini adalah masa paling baik dan sekaligus paling buruk). Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia namun kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia.

Dinamika globalisasi

Dalam beberapa tahun terakhir ini, topik globalisasi telah memasuki wacana akademis dan menjadi fokus diskusi dalam dunia pendidikan. Sebagian fenomena globalisasi juga mulai muncul dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia. Tentu saja dinamika globalisasi mengandung berbagai implikasi bagi pendidikan dan nasionalisme baru Indonesia.

Salah satu gejala delokalisasi dalam pendidikan adalah penggunaan bahasa. Di Indonesia, bahasa Inggris secara resmi diajarkan dalam kurikulum mulai dari kelas 1 SLTP. Namun banyak sekolah telah mengajarkan bahasa Inggris sejak kelas 1 SD. Bahkan, taman kanak-kanak dan kelompok bermain juga tidak mau ketinggalan mengajarkan bahasa Inggris.

Beberapa sekolah “unggulan” mengklaim penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sebagian atau keseluruhan proses belajar mengajar. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar juga berkaitan erat dengan adopsi kurikulum asing di Indonesia. Ada beberapa produk kurikulum dan ujian dari luar negeri yang sudah (atau pernah dijajaki untuk) dipakai di sekolah-sekolah di Indonesia yang mengklaim diri sebagai sekolah internasional, semi internasional, atau nasional plus.

¹⁰ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 18 September 2012

Jumlah anak Indonesia yang mengikuti program kurikulum dan evaluasi asing memang masih teramat sedikit. Mereka bisa disebut sebagai *the privileged few* yang mengejar keunggulan dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dalam dunia pendidikan, tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan selalu menjadi isu sangat menarik untuk dikaji. Ketika ada banyak gedung sekolah ambruk dan ada anak yang bunuh diri karena tidak mampu membayar biaya sekolah, segelintir anak sedang menikmati proses belajar dengan sarana dan prasarana kelas dunia.

Pendidikan sudah menjadi komoditas yang makin menarik. Suatu fenomena menarik dalam hal pembiayaan pendidikan menunjukkan gejala industrialisasi sekolah. Semakin mahal suatu sekolah, justru semakin laku. Semakin sekolah dikatakan plus, unggulan, atau berbau internasional, orang semakin tergiur untuk memasukinya. Bahkan ada fenomena menarik yang berkembang. Beberapa pemain dari kalangan bisnis mengalihkan perhatian dan investasi mereka pada industri persekolahan. Bahkan beberapa sekolah mahal didirikan dan dikaitkan dengan pengembangan suatu kompleks perumahan elit. Sekolah-sekolah nasional plus di kota-kota besar di Indonesia dimiliki oleh pebisnis tingkat nasional dan didirikan dengan mengandalkan jaringan multinasional berupa adopsi kurikulum dan staf pengajar asing.

Era persaingan global dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi dan melanda dunia pendidikan. Di jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa di berbagai universitas terkemuka di Indonesia melakukan aksi menentang biaya tinggi pendidikan tinggi. Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini perguruan tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjaringan mahasiswa baru untuk mendatangkan dana.

Perdebatan antara anti-otonomi dan pro-otonomi perguruan tinggi tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu. Kelompok yang menentang otonomi perguruan tinggi berpandangan negara harus bertanggung jawab atas pendidikan dan menanggung pembiayaan perguruan tinggi negeri. Mereka mengkhawatirkan privatisasi perguruan tinggi akan menutup akses bagi calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu dan fenomena komersialisasi ini justru akan menurunkan komitmen dan mutu pendidikan tinggi. Gejala McDonaldisasi pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai bagian dari gerakan neo-liberalisme yang menjelma dalam kebijakan pasar bebas dan mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi berbagai aset pemerintah. Heru Nugroho dkk (2002) menyoroti kontroversi otonomi perguruan tinggi di UGM dan menganggap kebijakan tersebut telah mengkhianati ideologi negara dan UUD 1945.

Sementara itu, kebijakan privatisasi pendidikan tinggi ini nampaknya akan terus dijalankan. Dua alasan yang sering dikemukakan adalah ketidak-mampuan pemerintah membiayai pendidikan tinggi dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi negeri. Namun bila tanpa perhitungan kuota yang tepat dan sistem penunjang aksesibilitas, elitisme dalam pendidikan tinggi akan mengancam proses demokratisasi di Indonesia. Pendidikan yang diharapkan menjadi jembatan bagi pemerolehan akses ekonomi, politik, hukum, dan budaya secara lebih merata menjadi roboh.

Berkurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan mengarah pada gejala privatisasi pendidikan. Dikotomi sekolah negeri dan swasta menjadi kabur dan persaingan antar sekolah akan makin seru. Akibat langsung dari privatisasi pendidikan adalah segregasi peserta didik berdasarkan status sosioekonomi. Atau walaupun fenomena itu sudah terjadi di beberapa kota, pemisahan antara peserta didik dari keluarga miskin dan kaya akan makin jelas dan kukuh. Peserta didik- dari keluarga miskin tidak akan mampu menanggung biaya yang makin mencekik sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang minimalis (baca: miskin) Sementara itu, peserta didik- dari kelas

menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini mendapatkan iuran pendidikan yang memadai dari peserta didik, sekolah-sekolah tersebut juga akan mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi sekolah yang sudah baik akan menjadi (atau mempunyai kesempatan) untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, sekolah yang miskin akan makin terperosok dalam kebangkrutan.

Kemana arah pendidikan Indonesia?

Menghentikan laju *the privileged few* dalam mengejar keunggulan melalui regulasi dari birokrasi bukan solusi yang tepat dan bijak. Jarum jam sudah tidak bisa diputar kembali dan arus globalisasi sudah tidak terbendung. Dua poin—keunggulan dan pemerataan pendidikan—harus diupayakan secara serius dan sistematis sampai kesenjangan dalam dunia pendidikan bisa makin diminimalkan dan pendidikan bisa menjadi jembatan bagi proses demokratisasi bangsa dan kebangkitan nasionalisme baru di Indonesia.

Dalam dinamika globalisasi, anak-anak bangsa tercecer dalam berbagai sekolah yang beragam menurut latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda. Negara belum mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sampai saat ini, belum nampak adanya pembenahan yang signifikan dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Muncul pertanyaan besar: Kemana arah pendidikan di Indonesia?

Pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan membentuk masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan yang masih menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk

memastikan reformasi bangsa sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berada pada rel yang tepat.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan bukan hanya *state building* dan *nation building* melainkan juga *capacity building*. Birokrasi pendidikan di tingkat nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk melakukan tindakan instrumental dan teknis seperti UN. Dengan kebijakan otonomi daerah, setiap kabupaten perlu difasilitasi untuk mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat namun bermutu tinggi. Pendidikan berbasis masyarakat ini diharapkan bisa menjadi lahan persemaian bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali berbagai persoalan dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya-upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Perubahan Kurikulum: Berkah atau Masalah bagi Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja¹¹

Di negara manapun di dunia, perubahan kurikulum selalu dibicarakan di kalangan elit pendidikan maupun masyarakat luas. Terdapat berbagai persepsi dan kritik yang berkembang dan, baik dalam proses evaluasi maupun penyusunan kurikulum, dinamika wacana yang perlu dihargai sebagai bagian dari proses pematangan kurikulum yang sedang disusun. Dalam era demokrasi, partisipasi dan keterlibatan publik akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kurikulum. Rasa kepemilikan ini akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum dengan lebih efektif dibandingkan dengan imposisi dari otoritas pendidikan terhadap satuan pendidikan dan masyarakat.

Terlepas dari cemooh "ganti menteri, ganti kurikulum" dari kalangan masyarakat, kurikulum memang harus senantiasa berubah seiring dengan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kritik dari kalangan industri justru diarahkan pada keengganan dunia pendidikan untuk merespon perubahan dalam masyarakat dan metransformasi diri.

Selama era reformasi, ini adalah kali keempat kurikulum ditelaah, dievaluasi dan dikembangkan dalam skala nasional setelah Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dan Kurikulum 2013 yang masih berada dalam tahap evaluasi. Beberapa lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan secara langsung Kurikulum 2013 lebih dari satu tahun diminta meneruskan pelaksanaan Kurikulum 2013 di bawah mentoring dan evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama satu semester diminta untuk kembali melaksanakan Kurikulum 2006. Dalam masa pemerintahan yang baru ini, pertanyaan yang sering muncul dalam forum publik adalah soal keberlanjutan pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah "akankah pemerintah memilih melanjutkan pekerjaan pelaksanaan

¹¹ Artikel ini adalah materi *Forum Group Discussion* di *Kompas* pada 4 Juni 2014

Kurikulum 2013, kembali menggunakan Kurikulum 2006 ataukah merumuskan kurikulum baru yang lain?

Artikel ini akan membahas secara prinsipil proses perubahan kurikulum, keterkaitan antara visi pendidikan dengan perubahan kurikulum, potensi keberhasilan atau kegagalan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional dan dunia kerja.

Proses perubahan kurikulum

Dalam teori kurikulum, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, evaluasi kurikulum terdahulu, analisis kebutuhan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum—termasuk pembelajaran—dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, setiap kurikulum mempunyai potensi keberhasilan dan faktor penghambat. Termasuk dalam faktor penentu keberhasilan adalah komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru, dan desain penilaian belajar peserta didik. Apakah suatu kurikulum akan memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tentunya memerlukan komitmen, perjuangan, dan kerja keras para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kesiapan para pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana pada tingkat tata kelola pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran.

Di negara yang sedang memperjuangkan dan memelihara demokrasi, ada banyak saluran penyampaian aspirasi di luar kegiatan uji publik yang secara resmi diadakan oleh pemerintah. Kecemasan dan kritikan yang sudah diungkapkan di media massa selama ini bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Kesadaran dan keterlibatan publik yang meningkat sangat penting bagi pengembangan kurikulum. Pemahaman publik yang tepat akan meningkatkan manfaat kurikulum bagi guru, peserta didik, dan

warga masyarakat. Apresiasi masyarakat terhadap kurikulum akan membentuk visi dan misi bersama, efisiensi satuan kerja kurikulum, ketepatan penggunaan anggaran, pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan, pengaturan program-program penunjang, evaluasi program, dan akhirnya hubungan masyarakat yang efektif.

Refleksi visi-misi pendidikan

Mencermati visi dan misi dalam bidang pendidikan oleh kedua mantan kandidat presiden pada pemilu tahun 2014 mengarahkan kita untuk berupaya menggali filosofi pendidikan yang melandasi gagasan pendidikan yang sudah disampaikan kepada masyarakat, substansi perubahan kurikulum yang akan/mungkin akan dilakukan (lagi) serta poin-poin yang masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Terdapat beberapa kesamaan dalam misi pendidikan kedua mantan kandidat presiden yang berjibaku dalam Pemilu tahun 2014, di antaranya mengenai wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara yang sudah mulai diperkenalkan pada Kabinet Presiden SBY dengan istilah Pendidikan Menengah Universal sebagai kelanjutan dari program BOS dalam wajib belajar 9 tahun. Kedua kandidat presiden yang bersaing dalam Pemilu 2014 mengemukakan pendidikan karakter sebagai landasan kurikulum nasional. Dari pemaparan visi-misi pendidikan mereka, tampak adanya implikasi perubahan pada Kurikulum 2013 yang saat itu baru saja diluncurkan dan dijalankan. Selain pendidikan karakter, Mantan Kandidat Presiden Nomor Urut 1 berkeinginan memasukkan Matematika dan bahasa Inggris dalam kurikulum SD dimana selama ini bahasa Inggris bukan termasuk mata pelajaran wajib. Mencermati konstelasi penggunaan bahasa internasional dan mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kebijakan mewajibkan bahasa Inggris pada jenjang SD merupakan pemikiran positif. Sebagian SD di kota besar memang sudah mengajarkan bahasa Inggris namun sebagian besar SD di seluruh Nusantara belum mempunyai kapasitas menawarkan bahasa Inggris dalam kurikulum lokal mereka. Memasukkan bahasa Inggris secara resmi dalam kurikulum SD merupakan keputusan antisipatif dan

bersemangat demi cita-cita pemerataan kesempatan. Kebijakan ini kemudian perlu didukung dengan perencanaan yang matang untuk kurikulum bahasa Inggris yang tepat dan persiapan tenaga pendidik bahasa Inggris. Dalam pemaparannya, nominal-nominal seperti tunjangan profesi guru Rp. 4 juta/bulan dan dana perbaikan fasilitas Rp. 150 juta per sekolah serta perekrutan 800 ribu guru dalam lima tahun tampak cukup spesifik namun terkesan sebagai janji-janji yang bersifat populis.

Di pihak lain, Mantan Kandidat Presiden Nomor Urut 2 mengajukan jargon “Revolusi Mental” sebagai semangat perubahan kurikulum yang diajukan. Pendidikan Karakter sebagai landasan kurikulum (Lie, *Kompas* 2 Juni 2014, hal 7)—jika sungguh-sungguh dilaksanakan dengan benar—niscaya akan membawa berkah dahsyat dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Pengembangan karakter adalah landasan bagi prestasi moral dan akademik yang berkelanjutan. Saya berharap alokasi persentase (dalam kurikulum SD, 80% pendidikan karakter, etika, dan budi pekerti dan 20% ilmu pengetahuan, pada tingkat SMP, 60-40% untuk pendidikan karakter, dan pada tingkat SMA 20%) tidak diterjemahkan menjadi pembagian jam pelajaran, kisi-kisi, teritori guru bidang pelajaran serta penyekatan kurikulum dalam implementasinya melainkan sebagai ajakan untuk menelaah kembali apa yang telah hilang di sekolah-sekolah kita. Dengan tekanan yang dihadapi dalam kehidupan profesional seorang guru, mulai dari target angka kelulusan ujian, standar mutu, kompetisi untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan peserta didik, sampai dengan kebutuhan guru sendiri atas kesejahteraan yang tidak tercukupi, pendidikan karakter telah tersisihkan.

Satu poin berbeda yang dikemukakan oleh pasangan Jokowi-JK saat itu adalah “Kami tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional—termasuk di dalamnya Ujian Nasional.” Mencermati realita dalam dunia pendidikan sebelum-sebelumnya, praksis UN sudah seharusnya dihentikan karena nilai-nilai ekonomis (target angka kelulusan, sistem insentif dan hukuman bagi para guru, pengukuran prestasi sekolah dan daerah berdasarkan kelulusan UN) yang melandasi

penyelenggaraan UN telah menggerus nilai-nilai etis dan moral. Selama bertahun-tahun, berbagai manipulasi dalam penyelenggaraan UN yang tidak lagi bisa diatasi oleh birokrasi pendidikan maupun aparat kepolisian telah merusak karakter anak, karakter sekolah, dan karakter masyarakat secara masif. Keterlibatan puluhan guru dalam pencurian soal-soal UN di Lamongan pada tahun 2014 merupakan fenomena pucuk gunung es kerusakan karakter bangsa yang sedang terjadi. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah alternatif penilaian pembelajaran dan sistem akuntabilitas sekolah yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pelaksanaan UN tahun 2015 di semua jenjang telah dilaksanakan dengan perspektif yang diharapkan banyak pihak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terpilih, Anies Baswedan, mengesahkan bahwa UN mulai tahun 2015 ini tidak menentukan kelulusan dan hanya digunakan sebagai alat ukur kompetensi siswa dan peta kinerja sekolah (*Kompas*, 15 April 2015). Diharapkan kemudian, dinamika penyelenggaraan UN dapat dijalankan sesuai dengan perannya dalam menjadi alat ukur pemetaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini kemudian otomatis memicu pergantian istilah UN (Ujian Nasional) menjadi EN (Evaluasi Nasional).

Potensi Keberhasilan atau Kontribusi Kurikulum

Terdapat beberapa isu penting yang terkait dengan potensi keberhasilan dan kontribusi kurikulum terhadap dunia pendidikan dan dunia kerja. Pertama, koherensi antara tujuan pendidikan, aliran kurikulum yang digunakan serta praksis kurikulum. Dalam hal ini, pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan beberapa kurikulum sebelumnya seharusnya dapat dijadikan masukan baik bagi upaya penyempurnaan maupun perubahan kurikulum.

Isu kedua adalah kemandirian sikap dalam menentukan tujuan dan target kurikulum. Partisipasi Indonesia dalam berbagai tes internasional (sejak tahun 1999 pada TIMMS dan tahun 2000 pada PISA) menunjukkan capaian yang masih masuk dalam kategori rendah. Jebloknya posisi Indonesia selama beberapa kali partisipasi

tampaknya belum mampu mendorong otoritas sistem pendidikan nasional untuk mendongkrak mutu pendidikan. Bahkan, kegagalan dalam tes-tes internasional ini tampaknya semakin membuat Indonesia terjebak dalam sindrom “mengejar ketertinggalan.”

Besarnya jumlah penduduk usia sekolah, kompleksitas situasi geografis, serta keberagaman budaya di Indonesia merupakan tantangan luar biasa bagi pengelola otoritas sistem pendidikan nasional. Jumlah besar anak usia sekolah di Indonesia dan juga pengukuran indeks pembangunan telah membuat perhatian terfokus pada indikator kuantitas seperti angka partisipasi sekolah, angka kelulusan UN, angka melek aksara, dsb. Perubahan penekanan dari segi kuantitas menjadi kualitas adalah tantangan bagi pemerintahan yang baru ini. Ketika anggaran sebesar 20% untuk pendidikan sudah dipenuhi dan angka partisipasi sekolah sudah dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun, kualitas peserta didik di Indonesia masih tergolong sangat rendah dalam berbagai perbandingan ujian internasional. Kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas seharusnya memperhatikan keseluruhan proses mulai dari hulu (cita-cita dan tujuan pendidikan), peta jalan (rencana strategis dan program aksi), kesiapan para pemangku kepentingan dan sarana prasarana, sampai dengan hilir (profil lulusan sekolah yang diharapkan).

Kualitas berkelanjutan sebagai acuan yang pertama memang mengarah pada paradigma *life-long learning* atau pembelajaran sepanjang hayat. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses yang tidak berkesudahan dalam kehidupan anak manusia. Selama ini praktik-praktik pendidikan sudah terlalu terkecoh dengan pemberitahuan (baca: indoktrinasi) jawaban-jawaban yang benar kepada peserta didik. Akibatnya, peserta didik menjadi terlalu terbebani dengan tugas-tugas yang cenderung bersifat hafalan dan sebaliknya kurang terlatih dalam proses pencarian jawaban dan menjadi sangat bergantung pada guru yang pada gilirannya ternyata juga bergantung pada aturan-aturan yang mengikat dalam sistem. Perolehan pengetahuan menjadi tujuan utama pendidikan dan dalam proses ini kompetensi menjadi terabaikan dalam praktiknya.

Yang perlu mendapat sorotan utama dalam peningkatan kualitas berkelanjutan adalah profesionalisme para pekerja kurikulum—terutama dosen di jenjang pendidikan tinggi dan guru di jenjang sebelumnya. Dalam desain dan pelaksanaannya, kurikulum melewati beberapa tahapan. Seringkali ada celah yang cukup lebar antara kurikulum ideal yang direkomendasikan dengan kurikulum yang terlaksana di ruang kelas. Kurikulum yang ideal perlu ditunjang dengan komitmen dan pengadaaan dana. Dukungan komitmen nyata ini juga kemudian perlu disertai dengan peningkatan profesionalisme pengajar yang meliputi peningkatan kesejahteraan, mutu, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Berkaitan dengan kebutuhan terhadap kualitas adalah efisiensi dan pemerintahan yang jujur dan bersih. Besarnya belanja pegawai dan guru ternyata belum mampu mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia meskipun Indonesia termasuk negara dengan rasio perbandingan guru-murid yang sangat baik (1: 20 untuk semua jenjang dan 1:12 untuk sekolah menengah) dimana rasio rata-rata dunia adalah 1:31.

Apakah perubahan kurikulum akan membawa berkah atau masalah dalam dunia pendidikan dan kerja bergantung pada komitmen terhadap visi-misi pendidikan, komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan *stakeholders* pendidikan serta koherensi antara ideologi, aliran kurikulum dan praksis kurikulum. Ideologi yang mendasari suatu aliran kurikulum tertentu akan sangat menentukan perilaku masyarakatnya dan arah kemajuan (atau kemunduran) bangsa tersebut. Tapi aliran-aliran yang nampak dalam suatu bentuk kurikulum tertentu bisa juga merupakan akibat dari berbagai proses sosial yang terkait satu sama lain. Identifikasi keenam aliran kurikulum (Eisner dan Vallance, 1974) menemukan lima orientasi kurikulum: proses kognitif, rasionalisme akademis, relevansi personal, adaptasi dan rekonstruksi sosial dan kurikulum sebagai teknologi. Orientasi proses kognitif mengarahkan proses kurikulum untuk membantu anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar dan belajar bagaimana berpikir. Rasionalisme akademis menanamkan pertumbuhan intelektual dalam mata pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kurikulum juga perlu memberikan ruang untuk menekankan pentingnya kebermaknaan

pribadi masing-masing peserta didik. Akhirnya, adaptasi dan rekonstruksi sosial menghendaki tujuan-tujuan pendidikan dari analisis masyarakat atas perilaku-perilaku yang diharapkan dari para lulusan sekolah.

Dehumanisasi Pendidikan¹²

Dalam novelnya yang berjudul *Brave New World* yang ditulis tahun 1931 jenis mulai dari Alfa Plus, Beta sampai dengan Epsilon. Dengan kecerdasan dan kemampuan super, manusia jenis Alfa Plus menempati posisi penting dalam masyarakat dan mendapatkan berbagai privilese. Sebaliknya, manusia Epsilon bertubuh kerdil dan bodoh sehingga mereka harus puas bisa bekerja sebagai penjaga *lift* atau tangga berjalan. Setiap manusia merasa puas dengan kemampuan dan peran masing-masing dalam masyarakat karena memang sudah dikondisikan demikian sejak proses penciptaan di laboratorium. Proses pembelajaran dan kondisi emosional anak dikontrol melalui mesin dan obat-obatan. Alhasil, masyarakat di dunia baru ini memang nampak teratur. Tidak ada kekacauan, kejahatan, atau bahkan protes.

Pada pelaksanaannya, pengelompokan anak berdasarkan kemampuan akademis dan finansial ini akan membawa dampak sangat serius bagi proses pendidikan anak-anak bangsa dan perubahan dalam masyarakat. Pemisahan anak berdasarkan kemampuan akademis dan kecerdasan memang tidak bisa dihindari sama sekali. Dalam era komersialisasi sekolah saat ini, fenomena segregasi yang nampak pada munculnya sekolah-sekolah "unggulan" dan "buangan" makin kentara seiring dengan segregasi pemukiman berdasarkan kelas sosio ekonomi dan persaingan antar peserta didik maupun antar sekolah. Namun, fakta ini tidak berarti rencana pemerintah untuk melegalkan pembagian jalur pendidikan formal bisa dibenarkan begitu saja. Di balik beberapa keuntungan yang mungkin bisa didapatkan dari kebijakan ini, pembagian jalur pendidikan formal akan mengarah pada proses dehumanisasi anak manusia seperti yang terjadi pada masyarakat distopia di *Brave New World*.

Pengelompokan akademis

Kebijakan dan praktik pengelompokan anak berdasarkan kemampuan akademis (*ability grouping*) baik di dalam kelas,

¹² Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 7 April 2005

sekolah, maupun antar sekolah merupakan salah satu topik penelitian dan perbincangan kontroversial di kalangan para pendidik. Pencarian di mesin pencari *Google* dengan kata kunci *ability grouping* menghasilkan hampir dua juta artikel dan situs. Tulisan ini menjadi relevan karena praktik pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan akademis masih terjadi di banyak sekolah. Para pendidik yang mendukung praktek ini menyebutkan kemudahan bagi para pengajar untuk memfokuskan pengajaran pada satu tingkatan kemampuan peserta didik dan menyesuaikan kecepatan pengajaran dengan kebutuhan kelompok yang homogen. Selain itu, anak-anak "pandai" seharusnya diberikan tantangan lebih dan kesempatan untuk maju lebih cepat dari rekan-rekannya yang kurang pandai.

Kebanyakan artikel dan penelitian justru mengkritisi praktik pembagian peserta didik berdasarkan kemampuan akademis dengan beberapa alasan. Pertama, kriteria yang biasanya digunakan untuk membagi peserta didik seringkali merupakan persepsi subjektif dan pemahaman yang sempit mengenai konsep kecerdasan anak. Kedua, pengelompokan akan menimbulkan pelabelan anak (pintar, bodoh, cepat, lamban) dan kerancuan antara konsep kecepatan belajar dengan kapasitas belajar. Ketiga, penempatan anak pada kelompok atau jalur yang berbeda akan mengarah pada harapan, target, dan ekspektasi yang berbeda pula terhadap anak padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar anak terkait secara positif dengan ekspektasi guru dan mitra belajarnya. Sekali anak dimasukkan dalam satu kelompok tertentu, kemungkinannya sangat besar anak tersebut akan tetap tinggal di kelompok itu sampai akhir masa sekolahnya. Vonis mengenai kemampuan anak pada masa pendidikan sama dengan ramalan yang akan menjadi kenyataan. Bahkan selepas dari masa sekolah, label ini akan terus melekat dalam diri anak. Di *Harvard Educational Review* (1996), Welner dan Oakes mendesak agar pengadilan turun tangan dan melarang pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan akademis. Mengajar di kelas yang berisi anak-anak dengan tingkat dan jenis kemampuan yang berbeda memang tidak mudah bagi guru.

Metode pengajaran satu arah (ceramah, misalnya) tidak akan efektif. Tapi justru inilah tantangan bagi guru dalam proses pengembangan profesionalisme mereka untuk meningkatkan pendekatan dan metodologi pengajaran. Juga tantangan bagi birokrasi pendidikan untuk memfasilitasi guru dalam pengembangan profesionalisme mereka.

Di sisi lain, tantangan lebih yang diberikan kepada anak-anak "pandai" seharusnya tidak hanya berupa materi lebih sulit yang akan memacu perkembangan kognisi mereka semata. Anak-anak yang dimasukkan dalam kategori "pandai" seharusnya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan afeksi, kesabaran, dan kedewasaan emosional untuk bisa belajar bersama dengan anak-anak dengan kapasitas dan kecepatan belajar yang berbeda.

Pengelompokan sosio-ekonomi

Pembagian jalur juga bisa dilakukan berdasarkan kemampuan finansial anak. Dampak yang akan timbul dari kebijakan ini amat serius dan membawa berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang homogen. Anak-anak dari keluarga mampu akan berinteraksi dengan anak-anak lain yang setara secara sosioekonomi demikian pula dengan anak-anak kurang mampu. Padahal seharusnya anak-anak dari berbagai latar belakang sosioekonomi bisa saling berinteraksi dan memperkaya dengan pengalaman hidup mereka masing-masing. Sempitnya lingkungan belajar selama masa sekolah akan membuat anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan empati dan solidaritas terhadap orang lain yang berbeda. Anak perlu belajar mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk mengenal dan menghargai manusia lain sebagai seorang individu yang utuh dan bukan sebagai anggota suatu kelompok yang asing dan mengancam.

Realita di masyarakat dewasa ini, terutama di kota-kota besar, memang sudah menunjukkan pemisahan warga masyarakat berdasarkan kelas seperti yang terlihat di lingkungan pemukiman, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat rekreasi, dan bahkan tempat ibadah. Yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat kebijakan

pendidikan adalah mendesain model pendidikan yang bisa menyiapkan anak-anak agar nantinya mereka bisa menjadi agen perubahan dan mendobrak berbagai sekat dalam masyarakat. Jika pembagian jalur pendidikan formal standar dan mandiri ditujukan untuk memudahkan alokasi beasiswa bagi para peserta didik yang kurang mampu, solusi tambal sulam ini sangat tidak bertanggung jawab. Berbagai kebocoran dan penyelewengan dana subsidi pendidikan di berbagai tempat seharusnya ditindak-lanjuti dengan upaya penegakan hukum yang tegas, bukannya dengan kebijakan yang akan menimbulkan dampak sangat destruktif dalam proses pendidikan anak.

Di balik segala keteraturan dalam masyarakat *Brave New World* seperti yang dijanjikan dalam jargon mereka Komunitas, Identitas, dan Stabilitas, ada proses dehumanisasi manusia. Pembagian anak ke dalam jalur pendidikan formal standar atau mandiri di Indonesia juga akan menghasilkan komunitas anak bangsa yang tersekat-sekat, identitas sebagai hasil dari proses yang diskriminatif, dan stabilitas yang hanya menguntungkan penguasa. Di balik segala tatanan yang nampaknya teratur itu muncul suatu kegamangan karena segala upaya pengelompokan dan pengkondisian manusia sesuai label yang diciptakan penguasa telah merebut kebebasan manusia untuk menjadi dirinya sendiri dan mencapai yang terbaik yang dia bisa. Jangan sampai kecenderungan penguasa untuk melenyapkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan mengacaukan dunia pendidikan. Setelah rumah-rumah kumuh dan para PKL digusur dan dihilangkan dari pandangan, akan dibawa kemanakah anak-anak "miskin dan bodoh"? Tidak ada jalan pintas atau solusi tambal sulam yang akan membawa dampak efektif dalam proses pendidikan anak. Untuk mengatasi berbagai kerumitan dalam sistem pendidikan nasional, air mata juga dibutuhkan. Seperti kata Shakespeare dalam *Othello*, "*If after every tempest came such calms, may the winds blow till they wakened death*" (Jika setiap badai berakhir dengan kedamaian, semoga angin bertiup sampai membangunkan kematian).

Kesetaraan Pendidikan untuk Para Komunitas Marjinal¹³

Di balik semua program dan bantuan dari pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan organisasi-organisasi kemanusiaan, anak-anak di sekolah-sekolah di daerah terpencil tetap terpinggirkan dan tertinggal. Data statistik resmi (dari BPS, misalnya) mengindikasikan kesenjangan-kesenjangan lintas provinsi terutama di tingkat SMP ke atas. Visitasi-visitasi ke sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil memunculkan sebuah gambaran yang mengusik dari kesenjangan-kesenjangan yang kejam. Sementara beberapa orang menikmati hak istimewa di beberapa kota besar dan memiliki akses ke pendidikan kelas dunia, anak-anak di daerah terpencil mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam sistem. Banyak tantangan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil di beberapa bagian Sumatera, Kalimantan, dan Papua termasuk kurangnya guru yang kompeten dan berdedikasi, kurangnya akses, dan diskontinuitas antara budaya murid di rumah dan budaya sekolah.

Secara umum, negara Indonesia tidak kekurangan jumlah guru. Rasio perbandingan 2,7 juta guru dan 40 juta anak-anak usia sekolah di Indonesia sudah sangat sesuai. Namun, masalahnya adalah pada pendistribusian para guru tersebut pada lintas provinsi. Kebanyakan para guru menghindari penempatan di daerah-daerah terpencil. Semakin terpencil area tersebut, semakin terbatas bagi para peserta didik untuk mengalami pembelajaran yang memenuhi standar nasional. Tingkat ketidakhadiran guru yang tidak terkendali di daerah-daerah ini dan otoritas pendidikan lokal tidak melaksanakan tugas pemantauan, supervisi, dan evaluasi di lokasi-lokasi tersebut.

Lebih jauh, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas berhubungan dengan lemahnya kondisi ekonomi dan situasi geografis. Di beberapa daerah terpencil di Papua, anak-anak harus

¹³ Artikel ini pernah dimuat di *The Jakarta Post* pada 24 September 2011 dengan judul asli "Education for the Marginalized"

berjalan selama beberapa hari dan meninggalkan kenyamanan tinggal bersama orang tua mereka untuk sampai di sekolah terdekat. Tentu saja, hanya murid-murid yang memiliki motivasi yang paling tinggi saja yang mau menempuh pengorbanan pribadi sedemikian demi sebuah tujuan jangka panjang menimba ilmu. Kebanyakan dari anak-anak (dan orang tua) tersebut kemudian akan mengalah pada kondisi kemelaratan yang melanda disana. Sementara perpisahan dalam jangka waktu panjang dengan para orang tua pada usia yang masih muda tidak disarankan pada kasus-kasus kebanyakan, asrama kemudian menjadi sebuah pilihan yang dibutuhkan untuk menyediakan akses yang lebih baik.

Tantangan terakhir dalam diskontinuitas antara budaya peserta didik di rumah dan budaya sekolah adalah yang paling tersembunyi dan merintangi. Sudah saatnya kita refleksikan kembali tindakan-tindakan kita dalam kerangka semboyan yang selalu dipuja-puja yakni “Bhinneka Tunggal Ika” – Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dalam konteks pendidikan formal, apa yang unggul dalam dominasi adalah kesatuan *di atas* keberagaman. Dengan menggunakan istilah keseragaman, para murid diharuskan menyesuaikan diri dengan budaya dan norma-norma yang berlaku di sekolah. Lebih buruk lagi, di beberapa kasus, para guru memandang rendah budaya lokal para murid dan melihatnya sebagai sebuah rintangan untuk pembelajaran dan *mainstreaming* (berada pada kondisi dominan). Banyak guru yang datang dari Jawa dan daerah-daerah yang lebih maju lainnya yang mengajar di daerah-daerah terpencil masih memegang teguh susunan hirarkis yang meletakkan mereka di sebuah posisi yang tinggi atau superior atas pengetahuan dan kebijaksanaan dan menganggap para peserta didik tersebut “subjek” yang lebih rendah atau *inferior*. Kegagalan sekolah dalam memberikan perhatian pada komunitas-komunitas yang terpinggirkan dilihat sebagai hal yang tak terelakkan dan ketidakpedulian para pengajar yang merupakan faktor yang memengaruhi proses pembelajaran seorang individu. Banyak studi penelitian yang menunjukkan bahwa upaya memisahkan individu-individu dari identitas-identitas budayanya merupakan hal yang menciderai harga diri dan berpengaruh negatif pada pencapaian

akademik. Para guru yang berkeinginan untuk ditempatkan di daerah manapun selain tempat kelahirannya seharusnya mendapatkan pelatihan dan orientasi etnografis. Dan, akan jauh lebih baik lagi jika sekolah-sekolah tinggi keguruan menggabungkan sesi-sesi kepedulian lintas budaya dan pemahaman sebagai bagian dari program *pre-service*.

Di berbagai media, fokus seringkali diberikan kepada beberapa individu yang dapat bertahan pada kondisi lingkungannya dan bahkan berhasil menempuh segala rintangan. Kompetisi-kompetisi bertipe olimpiade terkadang menghasilkan para individu yang sedemikian. Fenomena ini dapat juga digunakan secara politis untuk menyembunyikan kegagalan-kegagalan kebijakan atau untuk mendapatkan uang secara komersial dari pemerintah daerah yang telah putus asa. Hal ini bisa menjadi tindakan yang menipu dan berbahaya yang dapat dianalogikan seperti pada peristiwa pemberian permen kepada anak-anak kurang gizi. Entah kita suka atau tidak, hal ini telah menjadi bagian dari realita kita sebagai suatu bangsa. Menyelamatkan para peserta didik dari ketertinggalan berkepanjangan membutuhkan sebuah periode panjang dari kerja keras yang dilandaskan kepada itikad baik atas visi bersama dari bangsa tersebut dan pada pemahaman yang sesuai atas pendidikan bagi komunitas-komunitas yang kurang beruntung.

Evaluasi Pendidikan: Proses Pengeroposan Pendidikan dan Harapan¹⁴

Tercatat tiga persoalan mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia yang akan mempercepat proses pengeroposan dalam dunia pendidikan di tanah air bila tidak solusi yang ditawarkan. Tiga persoalan ini merupakan produk implementasi kebijakan publik bidang pendidikan yang memang sudah dianggap kontroversial sejak penyusunannya. Persoalan mendasar yang menuai banyak protes dan kritikan dari para pemangku kepentingan bidang pendidikan adalah UN, program sertifikasi guru, dan badan hukum pendidikan.

21 Mei 2007 mencatat peristiwa bersejarah dalam dunia pendidikan ketika Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menolak eksepsi para tergugat yang terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dan mengabulkan gugatan warga negara (murid, orang tua, dan perwakilan masyarakat) untuk mengubah kebijakan UN. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak. Majelis hakim juga memerintahkan para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di semua daerah sebelum melaksanakan UN. Peristiwa yang cukup fenomenal ini menunjukkan otonomi yudikatif dalam menyelesaikan persoalan di dunia pendidikan. Kita mesti terus berharap pada kemandirian pilar yudikatif dan konsistensi DPR walaupun pemerintah seolah-olah tidak mau tahu bahwa kebijakan publik UN sangat bermasalah dan tetap diberlakukan. Berbagai kontradiksi seputar UN yang sudah pernah dikemukakan di ruang publik seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji ulang kebijakan UN yang dipayungi oleh PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Inisiatif baik dari pemerintah mulai tahun 2015 ini dalam menelaah kembali UN dengan mengubah kebijakan peran UN sebagai penentuan

¹⁴ Artikel ini adalah materi seminar di SMA Kolese Gonzaga pada 5 Mei 2012

kelulusan siswa menjadi alat ukur yang tidak menentukan kelulusan siswa kemudian sungguh patut dihargai.

Di sisi lain, program sertifikasi guru yang juga merupakan produk PP No. 19/2005 dan UU 14/2005 tentang guru dan dosen juga telah banyak disorot. Raka Joni (2007) menunjukkan adanya “cacat ontologik” dalam konsep kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diturunkan dari Empat Pilar Belajar UNESCO. Sementara, persoalan konseptual pendidikan profesional guru masih belum terselesaikan, program portofolio sudah langsung dijalankan. Sungguh sangat absurd tindakan menggunakan berkas-berkas yang dikumpulkan dalam portofolio untuk menilai kompetensi seorang guru. Dan ketika guru-guru yang beruntung mendapatkan jatah sedang berlomba-lomba mengumpulkan portofolio untuk memperoleh sertifikasi demi perolehan tunjangan profesi dan fungsional, berbagai eksekusi (keikut-sertaan dalam program pelatihan hanya demi sertifikat, manipulasi berkas, dan kolusi antara pemilik portofolio dan penilai) sangat menodai profesi guru dan bahkan melemparkan guru pada titik nadir dalam perjalanan profesinya.

Ketiga, dampak neoliberalisasi sudah pula terasa dalam bidang pendidikan. Pada Desember 2008, fenomena komodifikasi pendidikan semakin dikukuhkan ketika RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sudah mengalami cukup banyak proses revisi jadi disahkan para anggota dewan. Kebijakan publik yang satu ini semakin melegalkan praksis membebani peserta didik dengan biaya pendidikan yang semakin mahal serta mematikan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk yayasan pendidikan. Untungnya pada tanggal 31 Maret 2010, amar putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dibacakan dan serta merta membatalkan UU BHP yang penuh dengan polemik sejak diusulkan. Hal ini kemudian diharapkan menjadi peringatan bagi dunia pendidikan bahwa paham neoliberalisme sudah dan akan terus mengancam pendidikan Indonesia jika tidak ada tindakan preventif dan itikad baik pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjamin para peserta didik di Indonesia mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak tanpa harus

membebani orang tua atau wali murid secara finansial dalam penyelenggaraannya.

Pada intinya, ketiga persoalan mendasar tersebut sudah berperan dalam proses pengeroposan sendi-sendi pendidikan di Indonesia. Yang perlu dihindari adalah apatisme dan keputus-asaan warga masyarakat dalam menghadapi pengeroposan ini. Tindakan 58 anggota masyarakat terhadap kebijakan UN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan titik awal kesadaran publik bahwa warga masyarakat tidak boleh tinggal diam jika ada kebijakan publik yang membodohi dan merugikan masyarakat dan peringatan bagi pejabat publik untuk tidak membuat dan memberlakukan kebijakan publik dengan semena-mena. Masyarakat yang peduli pada pendidikan sangat diharapkan untuk mencermati berbagai kebijakan publik bidang pendidikan yang dibuat dengan asumsi masyarakat bisa dijadikan objek.

Dengan demikian, proses politis dan pedagogis dalam penyusunan dan pemberlakuan kebijakan publik pendidikan bisa terlaksana secara demokratis dan terjadi demi kepentingan masyarakat luas. Kita berharap warga masyarakat bisa menjadi semakin cerdas dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor primordial dalam menentukan pilihan partai ataupun calon seharusnya digantikan dengan pertimbangan rasional demi kepentingan masyarakat umum.

Kebijakan Buku yang Memberdayakan¹⁵

Kebijakan pemerintah untuk membeli hak cipta buku pelajaran seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dulu bernama Kementerian Pendidikan Nasional No 2 Tahun 2008 telah menyulut banyak kontroversi. Junaidi Gafar (*Kompas*, 24 Maret 2008) mengkhawatirkan program ini gagal karena permasalahan buku pelajaran di Indonesia “tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan” semata. Gafar juga mencemaskan dampak mematikan pada industri penerbitan jika pemerintah “memaksakan membeli hak cipta buku pelajaran.” Sebaliknya, Rab A Broto (*Kompas 7 April 2008*) menyambut gembira kebijakan ini karena “penerbit selama ini sudah terlalu banyak menanggung untung dan kurang memedulikan kemaslahatan orang banyak.” Fenomena yang terjadi di lapangan sekilas menunjukkan sistem mirip mafia yang menyangkut oknum penerbitan & percetakan, oknum birokrat di Kementerian, oknum makelar, sampai para kepala sekolah dan guru terjalin sangat rapi dan sistematis.

Tujuan mulia

Peraturan ini memang patut disambut positif karena diharapkan menjadi alternatif bagi jeritan masyarakat atas mahalnya buku pelajaran dan pergantian buku pelajaran hampir setiap tahun karena seringnya modifikasi kurikulum dari pemerintah. Pemerintah memang berhak dan berkewajiban untuk menyusun regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat umum dan memastikan akses terhadap pendidikan bermutu tidak terhambat oleh bervariasinya harga buku. Tanpa regulasi, eksploitasi pasar buku pelajaran tidak hanya menyudutkan masyarakat tetapi juga mempengaruhi etika birokrat dan pendidik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa alokasi sampai dengan 35% dari harga buku (kepada toko buku) dijadikan iming-iming bagi para oknum birokrat dan pendidik yang berwewenang memutuskan buku mana yang akan dipakai sebagai bahan ajar. Bahkan dengan regulasipun, kecenderungan berkolusi antara pasar buku pelajaran dengan masyarakat pendidik tidak bisa diberantas sepenuhnya. Tanpa

¹⁵ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 23 April 2008

upaya penegakan hukum yang tegas, akan tetap saja ada oknum birokrat dan guru yang menjadi pengecer buku pelajaran dan menantang ancaman sanksi yang sudah ditetapkan oleh Permendiknas No. 26 Tahun 2005.

Agar Permendiknas No. 2 Tahun 2008 bisa mengatasi permasalahan keterjangkauan buku pelajaran, pelaksanaan kebijakan ini perlu mengantisipasi beberapa hal. Pertama, ketika pemerintah telah melaksanakan hak dan kewajiban regulasi, eksekusi dari hulu ke hilir oleh pemerintah atau badan kepanjangan tangan pemerintah (Badan Standar Nasional Pendidikan) mengandung risiko terbentuknya tirani kekuasaan dalam lahan baru. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan dana untuk memberi hibah kepada calon penulis buku, menilai kelayakan, dan membeli hak cipta (Pasal 3 dan 4) serta mengatur perijinan, distribusi dan penjualan melalui jalur birokrasi dan koperasi sekolah (Pasal 8 dan 11). Tawaran pemerintah untuk membeli hak cipta akan cukup menggiurkan untuk sebagian individu calon penulis yang tergoda untuk memuluskan jalan bersama dengan oknum yang berwenang menilai kelayakan pakainya. Mekanisme yang menjamin transparansi memang krusial dibutuhkan. Tanpa mekanisme dan transparansi, dikhawatirkan mutu buku pelajaran yang diloloskan akan menjadi taruhannya. Selama ini, di balik segala kekurangan pasar industri buku pelajaran, kompetisi bebas antar penerbit telah membangun mekanisme seleksi penulis yang dengan sendirinya mengembangkan kualitas buku-buku yang lolos dalam proses seleksi ini.

Untuk menghindari tirani birokrasi pendidikan, pelaksanaan kebijakan tentang buku pelajaran perlu menciptakan ruang kemitraan dan kesetaraan dengan pasar penerbit buku pelajaran dan terus berupaya memberdayakan masyarakat pendidik. Harus diakui, penerbit sudah mempunyai pengalaman dalam proses produksi & pendistribusian yang bisa dimanfaatkan untuk meyukseskan program buku murah bagi anak sekolah.

Kedua, kebijakan buku ini juga perlu memberikan ruang pilihan bagi masyarakat. Pengalaman penerbit dalam industri buku

memungkinkan mereka membuat buku-buku bermutu baik dari segi isi maupun grafis dan cetakan. Pasal 11 dalam Permendiknas No. 2 tahun 2008 melarang peredaran buku penerbit oleh aparat birokrasi dan pendidik. Pasal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan kolusi antara penerbit dan pendidik. Di balik tujuan mulia ini, pasal ini seyogyanya tidak membatasi hak pilih terhadap buku-buku yang dianggap lebih bermutu.

Ketiga, mengharapkan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan Permendiknas No. 2/2008 seperti yang diungkapkan Broto (*Kompas 7 April 2008*) pada saat ini masih membutuhkan perjalanan panjang. Keberdayaan masyarakat pendidikan terhadap kebijakan publik dan praktiknya—bahkan yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat sendiri—masih belum cukup memadai untuk menjadi pilar kekuatan yang setara dengan pilar negara dan pasar. Bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan pasar buku pelajaran, masyarakat pendidik cenderung ikut terbawa arus pasar. Pada titik ini, seyogyanya pihak penerbit sudah bisa mengambil pelajaran berharga dari salah satu celah yang sudah terjadi di bidang pendidikan dan berupaya memperbaiki situasi. Kebijakan rabat yang mengatas-namakan proses distribusi dan secara terselubung digunakan untuk memanfaatkan birokrasi dan pendidik untuk mengeruk untung seharusnya bisa digunakan untuk membangun kapasitas masyarakat pendidik. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menemukan penulis buku bermutu seharusnya bisa menjadi lahan tanggung jawab sosial bagi penerbit untuk ikut memberikan pelatihan berkelanjutan bagi para calon penulis.

Kegagalan Kurikulum Bahasa Inggris

Upaya perbaikan mutu pendidikan yang serius seyogyanya juga melibatkan tindakan evaluasi terhadap keterkaitan antara ujian dan kurikulum. Di berbagai daerah di Indonesia, peserta ujian mengalami kesulitan dalam ujian *listening* bahasa Inggris. Kesulitan ini bukan hanya disebabkan oleh alasan teknis (misalnya, *tape player* yang tidak berfungsi optimal) melainkan juga kurangnya kompetensi peserta didik dalam menyimak dan memahami pembicaraan dalam materi ujian. Fenomena ini menarik untuk dicermati dan dijadikan bahan evaluasi dan refleksi atas desain dan implementasi kurikulum bahasa Inggris (atau bahasa asing lainnya). Kenapa sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam ujian *listening*? Apakah mereka semua tidak kompeten? Siapa/apa yang salah dalam hal ini? Materi ujiannya atau proses pengajarannya?

Perencanaan kurikulum bukan sekedar menulis dokumen silabus serta RPP dan mengurus tender buku paket. Perencanaan kurikulum menyangkut suatu proses yang cukup kompleks dan perlu dilaksanakan secara komprehensif. Dalam tahap awal, kurikulum dirancang mulai dari perumusan berbagai ide, gagasan, dan pokok pikiran yang dikumpulkan dari pemikiran para pakar, kajian kebutuhan masyarakat dan kajian keilmuan. Bentuk awal ini disebut kurikulum ideal atau cita-cita. Selanjutnya, kurikulum ideal ini diolah, diubah dan direvisi, disusun, dan diajukan sebagai kurikulum standar (baik untuk tingkat nasional maupun daerah) yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurikulum mengalami perubahan lebih lanjut dalam tahapan implementasi di ruang kelas. Apa yang sudah dirumuskan dan dituliskan dalam kurikulum standar belum tentu dilaksanakan oleh guru di kelas karena berbagai alasan mulai dari kurangnya kompetensi guru, perbedaan interpretasi, sampai dengan ketidaktersediaan sumber daya pembelajaran. Maka dari itu, pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru merupakan bagian krusial dari perencanaan kurikulum. Sebagus apapun suatu kurikulum

ditulis tidak akan terlaksana dengan optimal jika pembinaan guru diabaikan dan sarana/prasarana penunjang tidak memadai.

Selanjutnya, kurikulum yang sudah diajarkan guru kepada peserta didik akan diuji secara periodik. Seyogyanya pula, harus ada keterkaitan antara yang sudah diajarkan dengan yang diujikan. “Ujikan apa yang Anda sudah ajarkan” (*test what you teach*) adalah pengetahuan dasar yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap guru. Fenomena kecemasan seputar pelaksanaan Ujian Nasional yang muncul dan ditangkap di media setiap tahun justru bertolak belakang dengan pengetahuan dasar itu. Ketika kecemasan makin menumpuk sehubungan dengan pelaksanaan ujian, sekolah, guru, pengajar bimbingan belajar, dan orang tua mencekoki peserta didik dengan soal-soal tes. Mau tidak mau, upaya penjejalan ini akan mengambil waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk proses belajar mengajar. Sekolah malah terjebak dan berubah menjadi tidak lebih dari bimbingan belajar. Guru yang seharusnya menjadi fasilitator yang mendampingi, mengamati, dan menilai kegiatan dan interaksi peserta didik juga ikut terjebak dan berubah menjadi mesin distribusi soal-soal latihan dan koreksi jawaban peserta didik. Dengan kata lain, praktik yang terjadi justru “ajarkan apa yang akan diujikan” (*teach what you test*).

Tahap terakhir dalam proses kurikulum mengacu pada seberapa banyak dan efektif peserta didik benar-benar menyerap apa yang sudah dirumuskan, diajarkan, dan diujikan. Refleksi penting bagi para pendidik dan pembuat kebijakan, apakah peserta didik sudah mengalami suatu perubahan dan pertumbuhan selama proses kurikulum ini?

Tinjauan proses desain dan implementasi kurikulum di atas bisa dipakai untuk mencermati kegagalan peserta didik dalam menghadapi ujian *listening*. Perubahan drastis dalam tahap perumusan kurikulum standar terjadi di tahun 1984 ketika temuan-temuan baru dalam proses pembelajaran bahasa kedua/asing menjadi wacana di kalangan peneliti dan pengajar bahasa. Pengajaran bahasa asing bergeser dari model behaviorisme ke konstruktivisme. Bahasa dipandang sebagai suatu fenomena sosial

dan pengajaran bahasa seharusnya lebih menekankan pada penggunaannya bukan pada struktur bahasa. Mengacu pada paradigma baru ini, Kurikulum 1984 dan 1994 kemudian bercita-cita membangun kemampuan peserta didik dengan pendekatan komunikatif.

Pada praktiknya, kenyataan yang terjadi di ruang kelas masih jauh dari apa yang dicita-citakan dalam kurikulum 1984 dan 1994. Buku paket masih berorientasi pada struktur bahasa (Purwo, 1990). Pengajaran di kelas masih sangat berfokus pada hafalan aturan berbahasa tanpa konteks. Selain itu, sebagian besar guru bahasa Inggris di Indonesia belum kompeten dan lancar berbahasa Inggris. Jika gurunya saja belum lancar berbahasa Inggris dengan benar, bagaimana mereka bisa mengajak peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Inggris? Di beberapa daerah yang kekurangan guru, pelajaran bahasa Inggris malah ditangani oleh para guru yang tidak punya latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Maka, tidak heran peserta didik menjadi bingung dan gagap ketika mendengarkan rekaman berbahasa Inggris dalam UN (apalagi jika diucapkan oleh penutur asli). Memang ada segelintir peserta didik yang cukup lancar berbahasa Inggris namun kompetensi ini biasanya diperoleh peserta didik bukan melalui jalur sekolah formal melainkan melalui kursus privat.

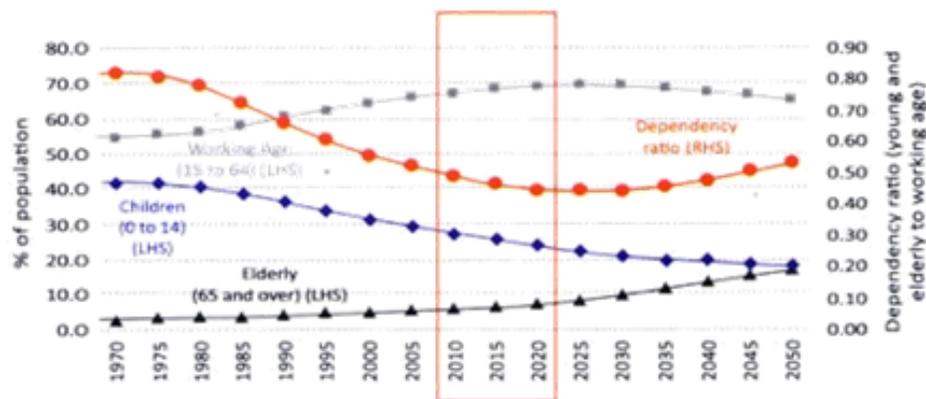
Mengingat keberagaman populasi peserta didik di seluruh Indonesia dan variasi kebutuhan masyarakat, para pendidik dan pembuat kebijakan perlu menelaah ulang tujuan, desain, dan implementasi kurikulum bahasa Inggris. Secara realistis, tidak semua anak di Indonesia mempunyai kesempatan dan kebutuhan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dalam konteks seperti ini, alokasi pengajaran bahasa Inggris selama 12 tahun x (sedikitnya) 2 jam seminggu merupakan sesuatu yang *mubadzir*. Dan seandainya, bahasa Inggris tetap diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah menengah dengan alasan pemerataan akses, setiap daerah seyogyanya mempunyai kebebasan untuk menentukan tujuan dan desain kurikulum bahasa Inggris sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Di beberapa daerah kemampuan baca dapat lebih dipentingkan. Namun di daerah lain (misalnya daerah pemasok

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri), mungkin peserta didik perlu mengembangkan kompetensi berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris walaupun daerah itu seyogyanya juga mempunyai strategi jangka panjang pengembangan manusia dan tidak terjebak sebagai pemasok TKI bergaji minimal.

Sesuai dengan tinjauan proses desain dan implementasi kurikulum, di tahun-tahun mendatang, jangan sampai ada lagi UN berbentuk rekaman kaset untuk pelajaran *listening* bahasa Inggris yang diberlakukan untuk semua anak di Indonesia. Tindakan ini hanya menjadi lelucon belaka dan menambah kekonyolan dalam sistem pendidikan nasional kita.

Permasalahan Pendidikan: Catatan untuk Kepemimpinan Nasional 2014¹⁶

Tiga dekade mendatang ini merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menikmati dan memanfaatkan Bonus Demografi (*The World Bank, 2010*). Ketika banyak negara mapan sedang menderita sindrom *The Graying of the Society* dan menanggung beban membesarnya kelompok masyarakat lanjut usia yang harus ditopang oleh kelompok masyarakat usia produktif yang semakin menciut, Indonesia justru mempunyai potensi sangat besar untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan situasi demografi yang sangat menguntungkan. Dalam dekade 2010 sampai dengan 2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif (15 s/d 64 tahun) sebesar 70% sementara anak-anak berusia 0-14 tahun berkisar di bawah 30% dan penduduk usia lanjut tidak lebih besar dari 10%. Grafik di bawah ini menunjukkan momentum Bonus Demografi tersebut:



Source: The World Bank

Potensi pertumbuhan ini akan menjadi kenyataan jika prakondisi bisa dipenuhi, yakni persiapan penduduk usia produktif yang terdidik dan sehat. Orang-orang muda usia produktif yang sehat, terampil, dan kompeten akan memberikan kontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu pemerhati yang skeptis terhadap situasi bonus demografi ini justru mencemaskan ancaman bom demografis jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perhatian kepada

¹⁶ Artikel ini adalah materi *Forum Discussion Group* yang diselenggarakan oleh *Metro TV* pada 28-29 April 2013

orang muda dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka (Hardjono, 2012). Kecemasan ini mengacu pada tesis Gunmar Heinsohn, profesor ilmu sosial di Universitas Bremen, direktur Raphael-Lemkin Institute for Comparative Genocide Reseach, yang menemukan dalam penelitiannya keterkaitan antara jumlah penduduk usia muda dengan kekacauan dan kekerasan sosial. Melalui studi sejarah, Heinsohn menunjukkan bahwa jumlah orang muda yang tidak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dan penghasilan yang memuaskan akan berubah menjadi bom demografis karena jumlah besar energi muda yang tidak puas memuat resiko tinggi untuk menjadi sumber ketidak-stabilan sosial dan politis. Secara spesifik, Heinsohn menulis, "*When 30 % or more of a nation's male inhabitants are in the 15-29 age bracket and there is no sufficient employment, the result is chaos, violence and upheaval.*"

Dalam kerangka Hausmann, Rodric, dan Velasco (2005), pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan mengalami beberapa hambatan potensial, di antaranya rendahnya mutu sumber daya manusia. Pohon diagnostik dalam kerangka HRV mengeksplorasi kelayakan dipekerjakan (*employability*). Pendekatan kelayakan pekerja melihat masalah dari sudut pandang pendidikan individu dan kondisi kesehatan yang mereka bawa ke pekerjaan.

Dalam konteks ini, peningkatan layanan dasar pendidikan (dan kesehatan) merupakan prasyarat mutlak bagi segala upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan masyarakat di Indonesia. Kegagalan dalam bidang pendidikan dituding sebagai penghambat kemajuan perekonomian. Analisis kelayakan kerja (*employability*) di Jawa Timur, misalnya, menunjukkan beberapa temuan yang memprihatinkan (The World Bank, 2011). Rendahnya kualitas sumber daya manusia dkuatirkan akan menjadi kendala bagi produktivitas tenaga kerja di Jawa Timur. Mayoritas angkatan kerja di Jawa Timur berketerampilan rendah. Pada tahun 2009, 55% angkatan kerja di Jawa Timur adalah lulusan SD atau lebih rendah termasuk 21% dari total angkatan kerja yang belum pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak menyelesaikan sekolah dasar. Hanya 6% dari angkatan kerja di Jawa Timur yang pernah mendapatkan

pendidikan pasca SMA. Kawasan perkotaan mempunyai angkatan kerja yang lebih terdidik dibandingkan kawasan pedesaan. 44% angkatan kerja di perkotaan lulusan SMA dibandingkan hanya 15% di pedesaan. Selain itu, indikator pencapaian pendidikan di Jawa Timur seperti angka melek huruf dan lama tahun bersekolah lebih rendah dibandingkan di provinsi lain di Jawa dan angka rata-rata nasional. Pada tahun 2008, angka melek huruf pria dan perempuan di Jawa Timur adalah 92% dan 83%, lebih rendah dibandingkan angka nasional, yaitu 95% dan 89% serta pencapaian di DKI, yaitu 99,6% dan 97,9%. Demikian pula, rata-rata tahun bersekolah di Jawa Timur lebih rendah secara signifikan, yaitu 7,5 tahun untuk laki-laki dan 6,4 tahun untuk perempuan, dibandingkan dengan DKI Jakarta (10,7 tahun untuk laki-laki dan 9,7 tahun untuk perempuan) dan tingkat nasional (8,0 tahun untuk laki-laki dan 7,1 tahun untuk perempuan). Meskipun akses terhadap pendidikan dasar sudah cukup besar di Jawa Timur, akses terhadap pendidikan menengah masih rendah dan menjadi persoalan di banyak kabupaten. Pada tahun 2009, angka partisipasi murni di Jawa Timur adalah 95% untuk SD, 70% untuk SMP, dan 48% untuk SMA. Program wajib belajar 9 tahun yang sudah dicanangkan pemerintah masih belum berhasil. Situasi pendidikan di luar Jawa, terutama di daerah tertinggal, bahkan makin menyedihkan. Di atas kertas, berbagai survey (misalnya angka melek huruf dan angka partisipasi murni) menunjukkan disparitas yang sangat memprihatinkan antar provinsi dan daerah.

Kurikulum dan UN

Kebijakan kurikulum termasuk substantif karena memuat apa yang penting dan harus diajarkan. Polemik standar kurikulum terus terjadi di kalangan pakar pendidikan. Perbandingan antar negara menjadi materi argumen oleh kedua belah pihak pengusung maupun penentang standar kurikulum. Pakar pendukung kebijakan standar kurikulum berpendapat standar nasional dibutuhkan sebagai acuan untuk memperbaiki mutu pendidikan sementara para penentang mengkhawatirkan standar nasional akan mengarah pada reduksi esensi pendidikan dan minimalisasi pencapaian. Tidak ada bukti cukup kuat yang mendukung korelasi standar nasional dengan

kemajuan pendidikan di negara-negara lain. Bahkan, sentralisasi standar nasional kurikulum di China tidak mengurangi kesenjangan capaian akademik di antara peserta didik dari berbagai daerah (Yong Zhao, 2010).

Finlandia sering menjadi acuan sebagai negara maju dengan mutu dan capaian pendidikan yang cemerlang. Negara ini mempunyai sistem standar nasional namun menyerahkan implementasi dan penilaian pada komunitas lokal. Bangsa Indonesia membutuhkan kesatuan visi tentang tujuan pendidikan dan *the Indonesian Dream* secara nasional dengan eksekusi yang menghargai keberagaman di tingkat lokal. Standar seharusnya menjadi arahan dan ideal, bukan hasil yang harus dicapai. Keunggulan membutuhkan perjuangan menuju yang ideal bukan kepatuhan terhadap ekspektasi minimal.

Terlepas dari cemooh "ganti menteri, ganti kurikulum" dari kalangan masyarakat, kurikulum memang harus senantiasa berubah seiring dengan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kritik dari kalangan industri justru diarahkan pada keengganan dunia pendidikan untuk merespon perubahan dalam masyarakat dan metransformasi diri.

Dalam teori kurikulum, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum—termasuk pembelajaran—dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, setiap kurikulum mempunyai potensi keberhasilan dan faktor penghambat. Termasuk dalam faktor penentu keberhasilan adalah komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru, dan desain penilaian belajar peserta didik. Apakah Kurikulum 2013 ini akan memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tentunya masih memerlukan komitmen, perjuangan, dan kerja keras para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, kepercayaan dan

dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kesiapan para pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana pada tingkat tata kelola pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran.

Terkait erat dengan kurikulum adalah penilaian hasil belajar atau dikenal oleh publik sebagai ujian. Dalam permasalahan sentralisasi-desentralisasi, UN mendapat sorotan secara terus menerus sampai pada titik kulminasi April 2013 ketika administrasi UN terhambat oleh keterlambatan pencetakan dan distribusi soal yang menyebabkan penundaan UN SMA di 11 provinsi. Walaupun kritikan terhadap UN terus dilayangkan dan Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan masyarakat lewat *citizen law suit* soal penyelenggaraan UN pada 2009, pemerintah tetap melaksanakan UN dengan alasan kebutuhan standarisasi.

Perbaikan sistem penilaian pendidikan mencakup tiga isu sentra: prinsip penilaian belajar, kredibilitas penyelenggaraan, dan perbaikan administrasi. Pertama, prinsip penilaian belajar. Ada berbagai macam tujuan, bentuk, dan format penilaian belajar. Salah satu pepatah yang juga berlaku dalam penilaian belajar—*Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts* (tidak semua yang bermakna bisa dihitung dan tidak semua yang bisa dihitung bermakna) mensyaratkan adanya penilaian alternatif dan otentik dalam PBM. Ujian berbentuk pilihan ganda seperti UN tentu saja tidak memadai untuk menilai prestasi, kemajuan, maupun kekurangan peserta didik. Kedua, pelanggaran dalam penyelenggaraan tidak semestinya ditolerir dengan label *ekses* dan *oknum*. Ini bukan persoalan persentase dalam statistik. Dalam pendidikan, rasio pelanggaran (yang dianggap) sangat kecil sudah menjadi persoalan sangat serius karena memberikan dampak modeling negatif yang akan sangat merusak proses pendidikan karakter anak dan bangsa. Pemberitaan mengenai bocornya soal-soal UN dan beredarnya kunci jawaban sudah menurunkan kredibilitas ujian itu sendiri. Ketiga, perbaikan sistem membutuhkan evaluasi secara terus menerus. Soal-soal maupun sistem administrasi tes seperti TOEFL dan yang semacamnya sering menjadi bahan kajian terbuka dalam forum-forum para pakar dan peneliti. Bahkan, soal-soal dalam tes terdahulu bisa diakses publik secara

terbuka. Selama beberapa dekade pelaksanaannya, ada banyak sekali perubahan dan kemajuan mendasar. Mekanisme evaluasi internal maupun hasil kajian publik telah memungkinkan tes-tes tersebut meningkatkan kesahihan dan keterandalannya secara berkelanjutan.

Pembiayaan

Standar pembiayaan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan juga memegang peran strategis dalam pembangunan pendidikan secara nasional. Belajar dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang berhasil (Kanada, Finlandia, Jepang, Korea, dan Singapura), dibutuhkan komitmen serius terhadap kebijakan pembiayaan dan rekrutmen/pengembangan pendidik. Dalam konteks Indonesia saat ini, belum saatnya menyerahkan kedua hal ini sepenuhnya pada komitmen dan kejujuran pemerintah daerah. Ada variasi komitmen dan kompetensi kepala daerah yang masih terlalu besar, sehingga disparitas antar daerah masih mengusik rasa kebangsaan.

Pendidik dan tenaga kependidikan

Faktor lain yang terkait dengan kegagalan kurikulum adalah lepasnya peran guru dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Agar kurikulum beroperasi dengan efektif, tidak cukup hanya menyusun suatu dokumen dengan kata-kata bagus dan jargon menarik. Sebagai satu bagian sentral dari kurikulum (dalam arti yang luas, baca Glatthorn, 1987), guru sangat menentukan apakah kurikulum yang digunakan akan efektif atau tidak. Dalam konteks ideal, guru terlibat mulai dari tahap persiapan penyusunan kurikulum, proses pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks ini, dibutuhkan guru yang profesional, kompeten, berdedikasi, kreatif, dan inovatif. Dalam konteks persekolahan di Indonesia yang sesungguhnya, guru diposisikan sebagai operator untuk menyampaikan kurikulum yang "teacher-proof." Posisi guru sebagai operator ini tampak nyata di banyak ruang kelas baik dalam kurikulum yang diakui atau ditengarai sebagai "teacher-proof" seperti PPSP misalnya ataupun dalam kurikulum yang

seharusnya guru berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kompeten seperti dalam Kurikulum CBSA, KBK, KTSP, dan Kurikulum 2013 yang tengah diujikan keberhasilannya.

Kemerosotan mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukkan dalam berbagai data survei tingkat internasional seperti TIMSS dan Indeks Pembangunan Manusia tidak bisa dilepaskan dari rendahnya mutu guru karena guru mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Sudah cukup banyak artikel ditulis mengenai rendahnya mutu guru (misalnya Suparno, 2004). Ditengarai kekurangan minat di antara orang muda berkualitas untuk menjadi guru disebabkan salah satunya oleh minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi (Priyono, 2004).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru berupa program sertifikasi guru dan pemberian tunjangan profesi ternyata belum cukup berhasil meningkatkan mutu guru dan prestasi peserta didik. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kompetensi antara guru yang sudah disertifikasi dan yang belum serta tidak ada dampak positif dari sertifikasi guru pada prestasi peserta didik (2012). Program sertifikasi guru perlu diintegrasikan dengan program peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan mulai dari masa pra-jabatan sampai dengan pelatihan dalam masa jabatan.

Mengubah kuantitas menjadi kualitas

Besarnya jumlah penduduk usia sekolah, kompleksitas situasi geografis, serta keberagaman budaya di Indonesia memang merupakan tantangan luar biasa bagi pengelola otoritas sistem pendidikan nasional. Jumlah besar anak usia sekolah di Indonesia dan juga pengukuran indeks pembangunan telah membuat perhatian terfokus pada indikator kuantitas seperti angka partisipasi sekolah, rerata lama sekolah, harapan lama sekolah, dsb. Tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang adalah

mengubah kuantitas menjadi kualitas. Ketika anggaran 20% untuk pendidikan sudah dipenuhi dan angka partisipasi sekolah sudah dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun, kualitas peserta didik di Indonesia masih tergolong sangat rendah dalam berbagai perbandingan ujian internasional. Kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas seharusnya memperhatikan keseluruhan proses mulai dari hulu (cita-cita dan tujuan pendidikan), peta jalan (rencana strategis dan program aksi), kesiapan para *stakeholders* dan sarana prasarana, sampai dengan hilir (profil lulusan sekolah yang diharapkan). Agenda Mantan Kandidat Presiden No. 1 Prabowo-Hatta untuk merekrut 800.000 guru dan memberi tunjangan profesi sebesar Rp.4 juta per bulan serta dana fasilitas Rp.150 juta per sekolah terkesan sangat populis dan kurang berlandaskan data. Janji populis ini akan mengalami kendala dalam implementasinya.

Menghentikan model-model penyeragaman yang dikemukakan dalam visi misi Jokowi-JK termasuk kebijakan UN bisa menjadi terobosan dalam strategi peningkatan mutu pendidikan. Indonesia memang terlalu besar dan terlalu kompleks untuk dikelola dengan model yang sama. Pekerjaan dan capaian yang dibebankan kepada otoritas sistem pendidikan nasional memang terlalu berat dan rumit untuk diatasi dalam model penyeragaman apalagi tanpa koordinasi efektif dengan kementerian yang lain. Padahal di balik berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh sistem pendidikan nasional, telah terdokumentasi beberapa inisiatif dan program baik berbasis masyarakat ataupun pemerintah daerah yang membanggakan dan bisa menginspirasi upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan di daerah-daerah lain. Presiden dan wakil presiden dan kabinetnya harus bekerja keras dan cerdas untuk memastikan visi-misinya bukan sekedar jargon dan agenda perbaikan pendidikan bisa mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi warga negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian serta bermartabat di dunia internasional.

Pendidikan Alternatif dan Perubahan Sosial¹⁷

Pendidikan anak bangsa tidak terjadi di ruang hampa melainkan berada dalam realita perubahan sosial yang sangat dahsyat. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan sistim pendidikan yang terdiri dari sentra keluarga, masyarakat, media, dan sekolah. Masyarakat modern (atau pascamodern) ditandai dengan renggangnya hubungan antar manusia karena keterasingan masing-masing. Tanggung jawab pendidikan generasi muda telah ditumpukan dengan berat sebelah kepada lembaga-lembaga pendidikan formal terutama sekolah.

Sentra yang pertama, keluarga, merupakan cerminan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat membawa dampak dan perubahan dalam struktur, bentuk maupun nilai-nilai keluarga. Konsep keluarga inti dengan satu bapak yang bekerja mencari nafkah, satu ibu yang mengayomi dengan penuh kasih sayang di rumah, dan anak-anak yang bahagia dan mendapat cukup perhatian sudah sulit dipertahankan dalam era pascamodern. Keluarga pascamodern diwarnai dengan kedua orang tua yang sama-sama mencari nafkah, angka perceraian yang meroket, keluarga dengan satu orang tua saja dan juga keluarga yang mempekerjakan anak-anak mereka. Globalisasi telah membawa berbagai kemajuan sekaligus penyakit sosial. Kemiskinan struktural yang menimpa kaum marjinal telah merampok masa kanak-kanak dari sebagian anak dan memaksa mereka menjadi pekerja.

Dulu orang tua dianggap sosok yang bijaksana dan sudah cukup tahu cara-cara mengasuh dan mendidik anak. Sejalan dengan peranan ibu dalam keluarga, anak dianggap polos dan membutuhkan pengarahan serta perlindungan orang tua. Sebaliknya, dalam pandangan pascamodern, anak-anak dianggap kompeten: siap dan mampu menghadapi kegetiran hidup. Pandangan baru ini muncul bukan karena anak memang sudah kompeten melainkan karena orang tua dan masyarakat pascamodern **membutuhkan** anak yang kompeten: anak yang mampu menerima kenyataan perceraian orang tua, yang tidak

¹⁷ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 14 September 2005

tergoncang melihat kesadisan pembunuhan baik di televisi maupun dalam kehidupan nyata, yang mampu mencari nafkah di jalan untuk disetorkan kepada orang tua atau kepala kelompok mereka, serta yang mampu menghadapi berbagai kekacauan dalam masyarakat. Pandangan anak kompeten ini ditayangkan media dalam film-film seperti *Home Alone* dimana seorang bocah bisa mengalahkan bandit-bandit kejam sendirian dan *Daun di atas Bantal* yang menyuguhkan gambaran tekanan yang dialami tiga bocah yatim piatu untuk bertahan hidup tanpa orang tua sebagai tokoh panutan.

Sementara itu, lingkungan masyarakat dianggap bukan tempat bagi generasi muda untuk belajar bagaimana bertingkah laku karena banyak kenyataan yang merupakan hal yang harus diubah. Banyak kebobrokan dalam masyarakat menjadi kontraproduktif dalam proses pendidikan anak. Belum adanya kesadaran tentang pentingnya lingkungan yang sehat, masih rendahnya kepatuhan kepada hukum yang berlaku, anarkisme, serta praktik negosiasi antara penguasa dan penegak hukum dengan pelanggar hukum menunjukkan betapa masyarakat belum menjadi tempat pendidikan yang sehat bagi anak. Hal ini diperparah dengan rekaman berbagai kerusakan dalam masyarakat baik berupa fakta, opini atas fakta, simbolisasi, anekdot maupun distorsinya dalam media massa yang telah menjadi bahan pembelajaran tidak resmi bagi anak.

Dalam konteks sosial ini, sekolah dijadikan tumpuan harapan untuk mendidik generasi muda. Sekolah telah menanggung beban yang kurang seimbang dalam proses pendidikan anak-anak muda karena sebagian beban ini adalah tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Sekolah telah menerima pelemparan tanggung jawab ini dengan berbagai alasan mulai dari alasan moral dan sosial, penugasan dari yang berkuasa (negara), sampai dengan alasan finansial (uang SPP dan lain-lain dari orang tua untuk membayar pelaksanaan tanggung jawab ini). Padahal dalam kenyataannya, sekolah (formal) tidak lagi mampu menanggung beban sosial ini.

Kekurang-sadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan merupakan fenomena pedang bermata dua. Seperti pada APBN dan APBD, anggaran rumah tangga untuk pendidikan (formal) dalam kebanyakan keluarga di Indonesia masih sangat rendah. Fenomena ini bisa jadi merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap signifikansi proses pendidikan dalam sistem sekolah formal untuk merubah kualitas hidup. Proses yang terjadi di sekolah dianggap sebagai ritual formalitas yang berkisar dari menjemukan sampai dengan menyiksa anak namun perlu dilakukan agar mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah berupa ijazah untuk bisa memasuki jenjang selanjutnya. Sekolah kemudian hanya dianggap sebagai lembaga pemberi ijazah. Di tingkat perguruan tinggi, terungkapnya kasus pembelian gelar dan ijazah sebagai jalan pintas yang juga melibatkan beberapa pejabat dan anggota dewan merupakan pucuk gunung es dari ketidakpercayaan terhadap proses pembelajaran dalam sistem formal.

Bagi keluarga miskin, harga yang harus mereka bayar untuk membeli ijazah ini terlalu mahal sehingga putus sekolah merupakan konsekuensi logis. Sedangkan bagi keluarga yang mampu secara finansial, biaya minimal untuk mengikuti formalitas perolehan ijazah direlakan asal tidak terlalu menggerogoti anggaran rumah tangga. Di beberapa sekolah swasta yang tidak menetapkan uang sumbangan masuk yang sama untuk setiap peserta didik, proses tawar menawar—seperti layaknya terjadi di pasar tradisional—antara orang tua/wali dengan panitia penerimaan peserta didik baru merupakan ritual rutin yang mengawali proses pendidikan anak di sekolah tersebut. Ketidakrelaan orang tua untuk membayar biaya pendidikan sebesar yang seharusnya mereka tanggung ini menunjukkan rendahnya kepedulian warga masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sendiri. Biaya yang lebih besar sebetulnya dianggarkan untuk pendidikan non-formal (les pelajaran, musik, seni, sanggar dan sebagainya). Yang menggembirakan, sekolah-sekolah alternatif yang diprakarsai lembaga-lembaga swadaya masyarakat didirikan untuk menampung anak-anak miskin yang sudah tidak bisa diakomodasi

secara optimal di sekolah-sekolah formal. Ketika masyarakat tergerak untuk mengambil alih kembali pendidikan, muncul pendidikan alternatif yang diprakarsai sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Ada sanggar anak, sekolah anak rakyat, komunitas pinggir kali, dan sebagainya. Di kalangan kelas menengah, muncul gerakan *homeschooling* sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sekolah formal. Walaupun masih bersifat sporadis dan belum cukup banyak dibanding kompleksitas berbagai permasalahan dalam masyarakat, upaya-upaya alternatif ini merupakan dinamika proses negosiasi dimensi formal dan non-formal pendidikan.

Ketika sekolah-sekolah formal (baik negeri maupun swasta) sudah terjebak dalam hegemoni negara dan tidak berdaya untuk mengakhiri gejala dehumanisasi dalam pendidikan dan ketika lembaga-lembaga pelatihan non-formal (kursus dan lembaga bimbingan belajar) juga ikut terjebak dalam industrialisasi dan komodifikasi ilmu pengetahuan dan keterampilan, beberapa lembaga swadaya masyarakat memprakarsai sekolah-sekolah alternatif yang diharapkan bisa menembus kebekuan dan status quo dalam sistem pendidikan nasional.

Sejarah panjang intervensi negara dalam sistem pendidikan para warganya telah ikut mengikis kepedulian dan kemampuan masyarakat. Kasus anak Sekolah Dasar yang bunuh diri karena tidak bisa bayar SPP hanya menyengat sebagian warga sampai dengan rasa belas kasihan belaka namun tidak cukup serius untuk membangkitkan kesadaran dan gerakan dari masyarakat secara signifikan untuk memperbaiki dirinya sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti kata Habermas, "*before a society can effectively intervene in its own course, it must first develop a subsystem that specializes in producing collectively binding decisions.*" Berbagai kegiatan pendidikan alternatif sedang melakukan suatu perjalanan panjang yang diharapkan akan bisa mengajak masyarakat memberdayakan dan mengatur diri demi kebaikan di masa depan.

Pendidikan dan Kemiskinan¹⁸

Masyarakat mempunyai harapan terhadap pendidikan untuk mengatasi kemiskinan struktural bangsa. Pendidikan dianggap bisa memotong lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan yang baik dan tepat dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan sehingga individu terdidik dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan produktivitas serta pemerolehan akses dan sumber daya namun gambaran masa penerimaan peserta didik baru di berbagai daerah seperti yang direkam di media massa menunjukkan ironi pendidikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pendidikan dasar gratis rupanya hanya janji belaka pada masa kampanye dan pemilihan pimpinan daerah maupun pusat. Pendidikan selalu menjadi isu kampanye yang sangat menarik dan strategi pemenangan suara yang jitu. Namun ketika pemilihan sudah usai, lain ceritanya. Anak-anak miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan dan pedalaman tetap saja kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang layak. Di perkotaan, sekolah-sekolah berlomba-lomba meningkatkan sarana dan prasarana dengan menaikkan pungutan. Sebaliknya, di pedesaan dan pedalaman, sekolah tidak mengenakan pungutan karena memang tidak ada lagi yang bisa dipungut namun peserta didik harus puas dengan kondisi sekolah yang jauh dari layak. Di pedalaman Kalimantan, NTT, dan Papua, seringkali peserta didik satu sekolah dibimbing hanya oleh satu atau dua orang guru saja. Dalam daftar, ada nama-nama sejumlah guru tapi mereka tidak hadir di sekolah. Selain itu, baik peserta didik maupun guru tidak mempunyai buku paket.

Sementara segelintir sekolah di perkotaan berlomba-lomba menjadi sekolah berstandar internasional dengan berbagai sarana dan prasarana yang mewah dan keluarga kaya tidak berkeberatan membayar jutaan rupiah per bulan, keluarga miskin kebingungan mencari sekolah layak yang terjangkau bagi anak-anak mereka. Bagi seorang pekerja dengan upah minimum, berbagai biaya yang dikenakan (mulai dari sumbangan masuk, biaya daftar ulang, biaya

¹⁸ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 9 Juli 2007

kegiatan, biaya ujian, dan sebagainya) yang bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah serasa seperti vonis yang mengukuhkan keberadaan mereka dalam jurang kemiskinan. Ternyata dana BOS dan dana-dana pengentasan kemiskinan seperti Jaring Pengaman Sosial tidak mampu memotong mata rantai kemiskinan.

Dalam buku *Education for 1.3 Billion*, mantan Wakil Perdana Menteri China Li LanQing mengemukakan komitmen pembangunan dan reformasi pendidikan dengan menambah anggaran pendidikan dan membuat kebijakan transparansi anggaran. Anggaran pendidikan di setiap daerah dan sekolah diumumkan kepada publik serta dimonitor dan diaudit untuk mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan dan memberantas korupsi.

Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu adalah tanggung jawab pemerintah. Fenomena distorsi tanggung jawab secara sengaja maupun tidak sengaja tercermin pada ungkapan "pendidikan adalah tanggung jawab kita semua." Slogan ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawab. Demikian pula dengan menggunakan kondisi kemiskinan negara sebagai alasan untuk melemparkan tanggung jawab kepada publik dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menanggung pembiayaan pendidikan. Justru dalam kemiskinan, pemerintah seharusnya memprioritaskan pendidikan sebagai strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan bermutu adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak ini bagi semua anak tanpa terkecuali.

Disparitas mutu antar sekolah seolah-olah tidak dapat lagi dihindari. Ketika kompetisi pasar bebas yang melanda bidang pendidikan memungkinkan segelintir sekolah untuk mencapai keunggulan dan sebagian anak Indonesia untuk menikmati pendidikan kelas dunia, pemerintah seharusnya berbuat lebih banyak untuk menghentikan pelanggaran hak anak-anak yang telah tersisihkan dalam kompetisi melalui kebijakan pembiayaan pendidikan yang memihak pada rakyat. Menurut Konvensi Hak Anak, anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, perlindungan,

perkembangan, dan partisipasi. Selain itu, Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan agar tidak putus sekolah.

Ada beberapa alternatif solusi. Dalam era desentralisasi pendidikan, peran pemerintah daerah sangat besar dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Belajar dari pengalaman China, pemerintah pusat menaikkan gaji guru secara signifikan secara nasional dan menyediakan perumahan guru. Selanjutnya, pemerintah daerah menganggarkan pembiayaan pendidikan di tingkat lokal dan masih bisa mengajukan subsidi dari pemerintah pusat untuk berbagai program dengan syarat bersedia diaudit dan mempertanggung-jawabkan kepada publik. Selain itu, sekolah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dikenai plafon pungutan yang bisa ditarik dari peserta didik. Sekolah swasta yang tidak menerima subsidi diperbolehkan menarik pungutan secara bebas namun harus mengumumkan anggaran belanja dan pendapatannya kepada publik untuk menghindari komersialisasi pendidikan. Alternatif lain adalah regulasi dalam rangka pemerataan akses pendidikan bermutu kepada semua anak. Ketika dorongan untuk menjadi unggul di kalangan keluarga mampu dan sekolah favorit tidak bisa dibendung lagi dengan penetapan plafon, regulasi bisa dilandaskan pada asas "menarik sebanyak mungkin dari yang mampu dan memberi kesempatan kepada yang tidak mampu." Pemerintah daerah perlu menetapkan kuota agar sekolah-sekolah favorit dan mahal menyediakan sekian persen dari bangku mereka untuk anak-anak miskin secara gratis. Tentunya persentase ini bisa disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah.

Akhirnya, ketika pemerintah masih belum sanggup memenuhi kewajibannya, tanggung jawab sosial dari korporasi perlu dimanfaatkan dengan baik demi kemaslahatan publik. Sumbangan dana dari korporasi memang dibutuhkan karena anggaran dari pemerintah belum mencukupi kebutuhan sementara masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan. Namun, peran korporasi ini tidak bisa dan tidak seharusnya mengalihkan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan.

Bab 3

Guru dan

Pengembangan Profesionalisme

Waspada *Bullet*-isasi Pendidikan¹⁹

Selama dekade terakhir, perlombaan teknologi di dunia pendidikan telah mencapai puncaknya dan berubah menjadi suatu wabah yang menyebarluas. Banyak sekolah telah mengikuti tren populer ini dengan menempatkan seperangkat komputer dan proyektor LCD (*Liquid Crystal Display*) di setiap ruang kelas. Bukan buku-buku pegangan mata pelajaran, spidol, dan sebuah map tebal yang berisi kertas transparan untuk presentasi dengan OHP (*Overhead Projector*), para guru sekarang membawa *USB stick* untuk mengajar. Pelajaran sekarang disampaikan dengan menggunakan tampilan-tampilan presentasi *PowerPoint*. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, proses-proses pembelajaran dituangkan dalam frasa-frasa yang ditampilkan dalam poin-poin atau *bullets*.

Kotak Pandora sekarang telah terbuka dengan semua keajaiban dan perangkapnya. Teknologi internet telah mempermudah para guru dalam menyiapkan materi-materi dengan kecanggihan visual dan efek-efek suara. Teks, gambar, dan film dapat diunduh dalam hitungan detik dan siap untuk digunakan di dalam kelas. Dalam hiruk-pikuk teknologi ini, sebuah pertanyaan muncul, “Bagaimana cara teknologi meningkatkan pembelajaran peserta didik?” Sebelum wabah ini menyebarluas tak terkendali di Indonesia, pertanyaan ini harus dijawab terlebih dulu.

“Akar permasalahan dari *PowerPoint presentation* adalah bukan pada kata ‘*power*’ atau ‘*point*’, namun pada ‘*presentation*’-nya” kata Marc Isseks dalam artikelnya yang berjudul “*How PowerPoint is Killing Education*” (Bagaimana *PowerPoint* Membunuh Pendidikan). Ketika para guru mereduksi isi kurikulum menjadi poin-poin dalam *bullets*, pembelajaran peserta didik dikorbankan. Terdapat tiga masalah yang muncul dalam perlombaan teknologi di antara para pendidik ini.

Pertama, euforia dalam menggunakan teknologi di praktik-praktik pengajaran telah direduksi menjadi presentasi-presentasi *PowerPoint* dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran. Para guru terperangkap dalam khayalan-pencitraan-diri menjadi seorang yang

¹⁹ Artikel ini pernah dimuat di *The Jakarta Post* pada 9 April 2011 dengan judul asli “*Bulletization of Education*”

melek teknologi di depan murid-murid mereka. Beberapa guru bahkan lebih disibukkan dengan menghiasi *PowerPoint* mereka dengan efek-efek multimedia yang sebenarnya bersifat mengganggu ketimbang menyibukkan diri dengan menjamin bahan ajar sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam isi kurikulum

Kedua, melalui presentasi-presentasi *PowerPoint*, para guru menjadikan diri mereka sebagai model-model dari pembelajaran yang buruk. Pemikiran-pemikiran direduksi menjadi fragmen-fragmen – frasa dan klausa – sehingga para peserta didik jarang mempunyai kesempatan untuk membaca model-model kalimat utuh yang ditampilkan pada tiap *slide*. Lebih buruk lagi, ketika (dan jika) para peserta didik sendiri berkesempatan membuka internet, mereka cepat atau lambat akan menemukan bahwa banyak dari para guru mereka hanya salin-tempel (*copy-paste*) materi-materi mereka dari internet. Para peserta didik, juga, pada akhirnya akan mencontoh kebiasaan-kebiasaan para guru ini. Plagiarisme kemudian menjadi dasar penggunaan teknologi di sekolah-sekolah. Berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai seorang guru, para peserta didik sangat bagus dalam memoles keterampilan-keterampilan presentasi mereka untuk mendapatkan poin yang baik untuk karya mereka. Jika para guru tidak memiliki sebuah fokus yang jelas, mereka akan dengan mudah dibelokkan oleh format presentasi itu beserta dengan segala variasi multimedia-nya sendiri ketimbang substansi-nya.

Ketiga, presentasi sejatinya adalah bersifat satu arah. Ketika para guru melakukan presentasi, para peserta didik duduk dengan tenang dan disuguhi materi-materi secara pasif. Interaksi guru-murid dan murid-murid dikacaukan ketika para guru menggunakan teknologi dengan tidak bijaksana. Layar-layar LCD tidak jauh berbeda dengan papan tulis konvensional. Terlepas dari keprihatinan-keprihatinan yang muncul, adalah tidak bijak untuk ikut membuang sesuatu hal yang baik ketika ingin membuang hal yang buruk. Teknologi tentu saja memiliki hal-hal baik yang seharusnya dikombinasikan dalam proses belajar mengajar. Untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi dalam praktik-praktik pendidikan, saya menyarankan solusi-solusi berikut ini.

Program pengembangan profesionalisme seharusnya menjadwalkan sesi-sesi tentang penggunaan teknologi. Para guru seharusnya belajar tidak hanya masalah teknis dalam menggunakan teknologi informasi dan keterampilan-keterampilan dalam menggunakannya tetapi yang lebih penting adalah alasan di balik penggunaan teknologi tersebut. Sebelum sekolah-sekolah memutuskan untuk menghiasi kelas-kelas mereka dengan komputer dan LCD, mereka seharusnya terlebih dulu menilai kapasitas guru mereka dan turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan. Sebagian dari penghargaan atas kinerja guru kemudian dapat diperhitungkan dengan penguasaan teknologi informasi sebagai faktor tambahan. Seorang guru yang sangat terampil, kompeten dan efektif dalam menggunakan komputer dan internet sebagai sebuah alat untuk meningkatkan pembelajaran dan membuat dampak yang baik bagi kehidupan para peserta didik ketimbang sebagai tameng untuk menutup-nutupi ketidak-mampuannya untuk menarik hati dan pikiran peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Akibatnya, sesi-sesi dalam penggunaan teknologi dan alasan di baliknya seharusnya juga diberikan kepada para pengawas sekolah. Sebuah langkah awal untuk perkembangan guru yang efektif adalah dengan menetapkan ekspektasi-ekspektasi yang jelas. Beberapa yang termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah-sekolah. Ketika melakukan observasi sekolah, para pengawas sekolah dan pejabat sekolah seyogyanya tidak dengan mudah terkesan dengan *PowerPoint slides* yang berwarna-warni dengan efek-efek suara dan visual yang mutakhir tetapi seharusnya lebih fokus kepada esensi-esensi pembelajaran seperti tugas-tugas sekolah yang diberikan, interaksi, komunikasi, pemikiran kritis, dan keterampilan-keterampilan memecahkan masalah dan kreativitas. Lebih jauh, monitoring kinerja guru dapat juga secara sebagian dilaksanakan oleh para peserta didik di tingkat SMA. Mengikutsertakan para murid dalam mengevaluasi para guru mereka dapat menjadi sebuah proses pembelajaran tentang kemandirian dan menempatkan para murid sebagai subjek-subjek pembelajaran.

Sebuah kalimat kiasan berbunyi “teknologi adalah seorang

pelayan yang baik tetapi seorang tuan yang kurang baik”. Oleh sebab itu, tetap berfokus dengan tepat pada orang dan bukan pada teknologi – akan membantu sekolah-sekolah mengintegrasikan teknologi informasi dengan lancar dan menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Seperti halnya dengan alat lain, *PowerPoint* akan menjadi usang suatu hari nanti dan dapat digantikan dengan beberapa produk lain. Tidaklah begitu penting seberapa mutakhir dan rumitnya sebuah alat. Marilah kita tidak dibingungkan mengenai penggunaan sebuah alat karena hal yang lebih penting adalah tujuan dan isi yang disampaikan melalui penggunaan alat tersebut.

Guru, Mengajar Apa atau Siapa?²⁰

Pada saat ini, ketika guru-guru yang beruntung mendapatkan jatah sedang berlomba-lomba mengumpulkan portofolio untuk memperoleh sertifikasi demi perolehan tunjangan profesi dan fungsional, berbagai eksekusi (keikut-sertaan dalam program pelatihan hanya demi sertifikat, manipulasi berkas, dan kolusi antara pemilik portofolio dan penilai) sangat menodai profesi guru dan bahkan melemparkan guru pada titik nadir dalam perjalanan profesinya.

Dalam refleksi menyambut Hari Guru yang jatuh setiap tanggal 15 Oktober, profil Ny. Liem Khing Nio (89) dan Dobyohadiatmodjo (88), guru di zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Kemerdekaan yang ditulis dalam Tonny D. Widiastono (editor), *Pendidikan Manusia Indonesia* memberikan contoh sosok guru yang pantang menyerah, tulus, ikhlas, terus berkarya dan berprestasi hebat. Kedua sosok guru ini melakukan pekerjaan mengajar dan mendidik sebagai bagian dari perjalanan dan panggilan hidup mereka. Mereka memaknai setiap tindakan dan ucapannya sebagai bagian dari perjalanan panjang untuk melayani anak-anak manusia dalam sejarah peradaban. Guru-guru ini senantiasa bersinar di tengah-tengah gambaran suram para guru saat ini.

Dalam bukunya, *The Courage to Teach*, Parker Palmer (2003) mengatakan bahwa menjadi guru bukan sekedar melakukan pekerjaan biasa melainkan juga memenuhi panggilan hati dan melakukan perjalanan spiritual. Selanjutnya, Palmer juga berpendapat, dalam perjalanan profesinya, seorang guru secara terus menerus mengaitkan tiga hal, yakni dirinya sendiri dengan peserta didik dan bidang pengetahuan/keterampilan yang diampunya.

Yang pertama, proses penemuan diri seorang guru dalam perjalanan panggilannya adalah proses penemuan dan pengukuhan identitas dan integritas. Setiap guru seharusnya menggali dirinya sendiri, menemukan identitasnya sendiri, dan mengembangkan gaya serta metode dan teknik mengajar yang paling sesuai dengan dirinya sendiri untuk menyinarkan aura terbaiknya yang bisa menerangi para peserta didiknya. Penemuan dan kesadaran diri ini kemudian akan menjadi modal bagi guru untuk mempertahankan

²⁰ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 24 November 2007

integritasnya dan menjadi dirinya sendiri secara utuh sesuai dengan harkat kemanusiaannya.

Sayangnya, dalam realita perjalanan profesi guru terdapat banyak hambatan termasuk dari budaya, birokrasi dan sistem pendidikan itu sendiri yang menghalangi panggilan guru untuk mempertahankan identitas dan integritasnya. Seharusnya berperan sebagai aktor dalam proses pembudayaan, transformasi nilai-nilai, dan rekonstruksi masyarakat, sebagian guru malah melakukan pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les privat bagi peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangannya sendiri, memfasilitasi kecurangan dalam pelaksanaan UN, ikut menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan komisi paling memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup mulut atas beberapa tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelola sekolah.

Dua hal berikutnya yang terkait dalam perjalanan seorang guru adalah peserta didik dan mata pelajaran yang diampu. Satu pertanyaan yang bisa diajukan kepada para guru adalah *Apakah Anda mengajar bahasa Inggris/Matematika/IPS/IPA atau apakah Anda mengajar anak?* Jawaban langsung (tanpa refleksi) kebanyakan guru adalah *Saya mengajar kedua-duanya*. Jawaban ini tampak sederhana dan memang benar. Namun refleksi lebih dalam terhadap praksis pengajaran menunjukkan bahwa *mengajar kedua-duanya* tidak selalu (bisa) dilakukan. Dalam tingkat kebijakan dan praksis pendidikan formal, bahkan ada konsensus bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin besar kecenderungan mengajar bidang disiplin daripada peserta didik. Guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar dianggap lebih generalis dan lebih memahami psikologi anak dibanding guru-guru sekolah menengah dan perguruan tinggi yang lebih spesialis.

Dalam praksis pendidikan formal, biasanya guru pada jenjang yang lebih tinggi mendapatkan penghargaan (baik materi maupun prestise) yang lebih tinggi daripada guru TK dan SD. Banyak pengelola sekolah memberi gaji yang lebih besar kepada guru SMP dan SMA daripada kepada guru TK dan SD. Sikap ini dilandasi suatu asumsi bahwa *apa* yang diajarkan jauh lebih penting daripada *siapa* yang diajar. Padahal, pendidikan dasar memberikan landasan

bukan hanya bagi pembentukan karakter melainkan juga pengembangan kapasitas intelektual dan keterampilan seorang anak.

Pemilihan mata pelajaran yang diampu (bisa dilakukan sebelum atau dalam masa jabatan) seharusnya dilakukan dalam kesadaran dan keterkaitan dengan identitas dan integritas setiap guru. Dalam menjalankan profesinya, ada proses penyatuan diri dengan bidang yang diampu. *The messenger is the message*. Salah satu indikator proses penyatuan diri dengan bidang ini adalah kecintaan terhadap apa yang diajarkan (termasuk berbagai kaidah dalam disiplin ilmunya) dan keyakinan bahwa apa yang diajarkan akan membawa suatu perubahan dan kebaikan dalam kehidupan peserta didik sebagaimana pengetahuan, keterampilan dan nilai yang terkandung dalam bidang yang diampu itu sudah membawa kebaikan bagi kehidupan sang guru sendiri.

Selanjutnya, untuk mengajar kedua-duanya (mata pelajaran dan peserta didik), seorang guru tidak berhenti hanya pada peran sebagai *the messenger who delivers the message*. Identitas dan integritas seorang guru memungkinkannya untuk menyapa setiap pribadi peserta didik, menyentuh hatinya, dan membebaskannya untuk menemukan guru dari dalam dirinya sendiri. Parker Palmer menyebut *the teacher within*. Implikasi dari pemahaman ini adalah seorang guru sejati dipanggil untuk membebaskan peserta didiknya bukan hanya dari ketidak-tahuan melainkan juga membebaskan peserta didiknya dari ketergantungan kepada sang guru. Seorang guru dipanggil untuk membebaskan peserta didik dari ketidak-sadaran bahwa sebenarnya si peserta didik mempunyai gurunya sendiri, yakni yang ada di dalam dirinya sendiri, yang akan terus membimbing dan memimpinnya sepanjang hayat.

Guru sebagai Pekerja Budaya dalam Undang Undang Guru dan Dosen²¹

Kemerosotan mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukkan dalam berbagai data survei tingkat internasional seperti TIMSS dan Indeks Pembangunan Manusia tidak bisa dilepaskan dari rendahnya mutu guru karena guru mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Sudah cukup banyak artikel ditulis mengenai rendahnya mutu guru. Ditengarai kekurangan minat di antara orang muda berkualitas untuk menjadi guru disebabkan salah satunya oleh minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi (Priyono, 2004).

Di tengah-tengah keprihatinan terhadap kemerosotan mutu dan status guru, Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diluncurkan sebagai suatu itikad baik untuk mengatur dan memberikan jaminan terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan profesionalisme guru. Berbagai dialog publik memang perlu diselenggarakan dan dilanjutkan agar pemaknaan terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen bisa terus berkembang dan memungkinkan para guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berbagai tanggapan atas UU Guru dan Dosen serta Kode Etik Guru sudah muncul. Hal ini merupakan indikasi positif mengenai kepedulian masyarakat atas berbagai persoalan yang terkait dengan profesi guru dan pendidikan.

Dalam kerangka peningkatan mutu, satu permasalahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan. Seharusnya, pendidikan menghormati dan menghargai martabat manusia beserta dengan segala hak asasinya. Peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiaannya sebagai subjek melalui proses pendidikan tapi yang sedang terjadi justru sebaliknya. Ada terlalu banyak contoh dalam praktik-praktik di sekolah yang menunjukkan betapa peserta didik sudah diperlakukan sebagai objek demi kepentingan ideologi, politik, industri, dan bisnis. Guru

²¹ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 18 Maret 2005

sebagai pendidik tidak mampu mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena para guru sendiri merasa terjebak sebagai objek dalam sistem pendidikan nasional. Persoalan di bawah ini hanya sebagian kecil dari realita dehumanisasi yang dihadapi guru dan sudah sangat lama disorot masyarakat:

1. Dengan gaji dan tunjangan yang sangat tidak memadai, guru menjadi terlalu sibuk dengan upaya mencari penghasilan tambahan sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik diabaikan atau tidak dilakukan dengan sepenuh hati.
2. Terseret dalam upaya mencari penghasilan tambahan ini, sebagian guru malah melakukan pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les privat bagi peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangannya sendiri, ikut menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan komisi paling memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup mulut atas beberapa tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelola sekolah.
3. Dengan jam mengajar yang panjang dan tugas administratif yang membebani, guru sudah tidak punya waktu untuk membaca dan mengembangkan diri. Pengetahuan, wawasan dan kreativitas guru sulit berkembang. Akibatnya, peserta didik mau bertahan duduk di hadapan guru di dalam kelas hanya karena mereka harus bertahan sebelum bel berbunyi dan menyelesaikan satu jenjang untuk mendapatkan ijazah.
4. Dengan berbagai kepahitan dan kegetiran hidup sebagai objek dalam sistem pendidikan nasional, sebagian guru belum mampu mengembangkan mekanisme untuk mengelola emosi negatif mereka sehingga harus mengumpat di kelas, mengasihani diri sendiri atau memperlakukan peserta didik dengan kasar.

Tentu saja di berbagai tempat masih ada banyak guru yang cerdas, cemerlang dan berhati nurani. Guru-guru ini senantiasa bersinar di tengah-tengah gambaran suram para guru seperti di atas.

Dikotomi pekerjaan dan panggilan

UU Guru dan Dosen yang lalu mungkin disusun dengan suatu itikad baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan

profesi keguruan. Ada yang memposisikan guru sebagai pekerja budaya (*cultural worker*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak personal dan profesionalnya. Memang selama ini, guru seringkali diperlakukan secara semena-mena oleh pemerintah maupun sebagian pengelola sekolah swasta. Sebagai pekerja, guru berhak mendapatkan kebebasan akademis dan berserikat, rasa aman dan jaminan keselamatan, cuti (Pasal 40), tunjangan kesehatan (Pasal 39), dan gaji (Pasal 52) yang layak dan berhak mendapatkan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang layak (Pasal 63 dan 67).

Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dianggap tidak memuat ketentuan yang mengatur guru, UU Guru dan Dosen diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum agar guru tidak lagi di PHK secara sepihak, dieksploitasi waktu dan tenaganya dengan upah yang sangat tidak memadai serta tidak diberikan kesempatan untuk berkembang sebagai seorang profesional.

Guru bukanlah buruh. Menjadi guru (sejati) merupakan panggilan hati. Bagi seorang guru sejati, tugas utamanya adalah membantu peserta didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh (Driyarkara, 1980). Apapun situasinya, guru pertama-tama tidak berpikir untuk dirinya sendiri melainkan untuk peserta didiknya. Bagi seorang guru yang digerakkan oleh panggilan hati, layanan konseling bagi anak didik yang sedang depresi dan mau bunuh diri di hari libur resmi pemerintah akan tetap dilakukan walaupun dia tahu sekolah tidak membayarnya uang lembur seperti ditetapkan dalam Pasal 15 dan 16. Betapapun pergumulan untuk memperjuangkan tingkat kesejahteraan yang layak bagi guru sebagai pekerja, yang membedakan guru yang sejati dengan yang tidak adalah bagaimana mereka masing-masing memaknai profesi keguruannya. Yang satu menjalaninya sebagai suatu panggilan hidup sedangkan yang lainnya melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah. Di antara kedua model ini tentunya ada gradasi dan dinamika pertumbuhan atau kemerosotan.

Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menafikan hak atas kesejahteraan bagi para guru atas nama panggilan hati (agar pemerintah dan sebagian pengelola sekolah bisa terus bertindak

semena-mena terhadap guru). Pada ujung yang lain dari itikad baik para penyusun UU Guru dan Dosen untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru adalah kemungkinan penyalahgunaan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut oleh sebagian guru untuk menutupi kekurangan kompetensi dan dedikasi. Berbagai kebebasan dalam hak professional guru seperti yang diatur dalam Pasal 8, misalnya, akan sangat mudah dimanfaatkan oleh guru yang tidak bertanggung jawab jika pelaksanaan undang-undang ini di tingkat sekolah tidak disertai dengan mekanisme yang jelas. Intinya, jangan sampai undang-undang guru ini bukannya melindungi guru-guru yang layak mendapatkan penghargaan malah menjadi alat bagi beberapa guru yang pandai memanfaatkan suatu produk hukum untuk kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi, suatu itikad baik malah akan menodai dunia pendidikan dan membawa dampak serius bagi proses pendidikan anak karena bagaimanapun guru seharusnya masih menjadi figur yang *digugu lan ditiru*.

Bahwa guru punya peran sangat penting dan harus dihargai tidak saya gugat. Agar pendidikan bisa memanusiakan manusia dan memperlakukan peserta didik sebagai subjek, guru sebagai pendidik terlebih dahulu harus diperlakukan sebagai subjek. UU Guru dan Dosen sudah berusaha memberikan perlindungan dan penghargaan yang lebih pantas kepada guru sebagai pekerja. Akan tetapi, segala upaya untuk menempatkan guru sebagai subjek sebaiknya tidak dilepaskan dari tujuan akhir untuk kepentingan peserta didik. Jangan sampai pelaksanaan Undang-Undang guru—dengan segala itikad baiknya—menempatkan guru yang berhadapan dengan pemerintah atau pengelola sekolah dalam relasi buruh-majikan tanpa ada perhatian memadai terhadap tujuan akhir, yakni memanusiakan peserta didik.

Independensi Sertifikasi Guru²²

Peningkatan profesionalisme guru yang coba diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005 (terutama Pasal 15 dan 52) tentang Guru dan Dosen menjadi topik hangat di berbagai media massa dan forum diskusi. Pemberdayaan profesi guru melalui **kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik** diyakini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU Guru dan Dosen, Pasal 8). Irsyad Ridho (*Kompas* 20 Februari 2006) mengkhawatirkan orientasi komodifikasi UU Guru dan Dosen berupa uji kompetensi guru dan sertifikasi guru dan dosen.

Harapan besar disandarkan pada LPTK (lembaga pendidikan guru) untuk ikut menentukan arah kebijakan pendidikan. Namun disinyalir banyak LPTK justru sedang sibuk bersaing dan berusaha merebut bagian kue anggaran dari program pendidikan profesi/kompetensi dan sertifikasi. Senyampang Peraturan Pemerintahnya sedang disusun, perlu ada sistem monitoring dan evaluasi desain dan pelaksanaan program sertifikasi dan uji kompetensi guru.

Kualifikasi akademik

Pasal 9 menyatakan "kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4)." Pasal ini bisa ditafsirkan bahwa guru boleh menempuh program studi non-kependidikan asalkan sudah mencapai S1 atau D4. Memang kenyataannya di lapangan, banyak guru tidak menempuh studi di LPTK. Pemberlakuan pasal ini bisa ditujukan kepada para guru lulusan non-kependidikan yang sudah mengabdikan sebelum disahkannya UU Guru dan Dosen. Namun untuk masa yang akan datang, seharusnya para lulusan SMA atau SMK yang ingin menjadi guru menyiapkan diri sejak awal dengan memulai studi di LPTK.

Pembatasan ini bukan hanya untuk menghindari persaingan antara lulusan LPTK dengan lulusan program studi non LPTK plus sertifikat pendidik tapi juga untuk menyiapkan para calon pendidik secara lebih matang dan profesional. Jika penguasaan materi di

²² Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 2 Maret 2006

LPTK masih diragukan, seharusnya LPTK didorong untuk membenahi diri dan meningkatkan penguasaan bidang studi untuk para calon guru bidang studi.

Kompetensi

Pasal 10 berbunyi "kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi." Pendidikan profesi ini seyogyanya tidak dibatasi pada masa pendidikan formal selama di LPTK. "Untuk menjadi guru yang bermutu, berkualitas dalam banyak hal, perlu jam terbang dan pengalaman di lapangan" (Paul Suparno). Jadi pendidikan profesi ini mestinya meliputi *pre-service training* untuk para calon guru di LPTK dan *in-service training* untuk semua guru secara berkesinambungan. Uji kompetensi memang bukan barang sekali jadi. Pada masa *pre-service training*, LPTK bisa memberikan dan sekaligus menguji kompetensi para calon guru. Tentunya kurikulum LPTK perlu dibenahi agar lebih relevan dengan kebutuhan nyata di sekolah-sekolah. Selain itu, uji kompetensi yang dilakukan di LPTK ini hanya awal dari suatu perjalanan panjang dalam profesi guru.

Selanjutnya pada masa *in-service training*, pimpinan sekolah dan guru pamong bisa berperan membina dan menilai guru. Secara struktural, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai pengawas yang salah satu tugasnya membina dan menilai sekolah. Namun pada saat ini, ada banyak keraguan terhadap kompetensi, integritas, dan dedikasi para pengawas. Perlu ada koordinasi antara LPTK, sekolah, Dinas Pendidikan, LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), dan lembaga independen untuk uji kompetensi terhadap guru pada masa *in-service*.

Sertifikasi

Pasal 11 mengatur "sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi." Pasal ini memuat ketidak-jelasan yang sangat tinggi dan memang masih akan diatur dengan PP. Berbagai pertanyaan muncul. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi? Apakah itu program persiapan sebelum menempuh ujian sertifikasi? Ataukah ujian sertifikasinya itu sendiri? Apakah setiap

LPTK yang terakreditasi bisa memberikan program sertifikasi? Jika hanya beberapa LPTK yang bisa memberikan sertifikasi, apa alasan penunjukan oleh pemerintah? Bagaimana pemerintah bisa memastikan tidak ada potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penunjukan ini?

Secara desain, dua prinsip harus dijalankan agar program sertifikasi ini benar-benar akan bisa menghasilkan guru berkualitas. Kedua prinsip ini mensyaratkan adanya pembatasan antara ujian sertifikasi itu sendiri dengan program persiapannya. Pertama, ujian sertifikasi harus dilaksanakan oleh lembaga independen yang tidak terikat dengan LPTK atau institusi pendidikan manapun. Jika ada pakar dari LPTK yang dilibatkan dalam lembaga independen ini, seharusnya pakar tersebut menghentikan keterikatannya dengan LPTK dan sekolah paling tidak selama masa jabatan dalam lembaga independen yang menguji sertifikasi para guru. Prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas ujian sertifikasi guru. Jalan pintas untuk memperdagangkan tunjangan profesi harus ditutup rapat. Kedua, dengan asumsi kerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bisa dihargai, pemerintah dapat memberikan kebebasan kepada setiap LPTK yang sudah terakreditasi untuk menawarkan program persiapan sertifikasi secara transparan. Biarkan masyarakat guru menggunakan kebebasan untuk memilih program profesi guru dan LPTK yang mereka anggap bermutu dan bisa membantu mereka lulus dalam ujian sertifikasi.

Persaingan secara transparan, objektif, dan akuntabel akan mendorong LPTK untuk berlomba-lomba membenahi diri dan meningkatkan mutu dalam proses yang adil, sehat, dan jujur. Kebebasan ini juga perlu diberikan jika nantinya pemerintah akan memberikan tunjangan program sertifikasi kepada para guru. Besaran tunjangan ini bisa saja diseragamkan tapi biarlah LPTK menentukan harga mereka sendiri dan guru menggunakan kebebasan untuk menentukan di LPTK mana dia akan menggunakan subsidi dana program sertifikasi itu. Toh, pilihan guru akan membawa implikasi bagi dirinya sendiri dan penentuan program serta harga oleh LPTK juga demikian karena yang melakukan ujian sertifikasi adalah lembaga independen yang integritas serta kredibilitasnya tidak bisa ditembus baik oleh guru

yang mengejar tunjangan profesi maupun oleh LPTK yang mengejar subsidi dana program sertifikasi. Pada akhirnya, jika kedua prinsip ini tidak bisa dihormati dan birokrat pendidikan tergoda untuk memproyektikan program sertifikasi dengan menunjuk rekanan tertentu, tujuan pendidikan nasional menjadi taruhannya.

Mari Mulai Serius dengan Evaluasi Nasional Guru²³

Sementara uji kompetensi guru berskala nasional telah secara buruk dilaksanakan, menghilangkan ujian tersebut dan mempercayai para guru, seperti yang disarankan oleh Setiono Sugiharto (*The Jakarta Post*, 4 Agustus 2012) bisa berarti memberikan ekspektasi terlalu berlebihan kepada kemampuan guru untuk mengambil kebijakan atas kualitas pengajaran mereka dan meningkatkan pengembangan profesionalisme mereka.

Adalah benar bahwa beberapa guru mempunyai komitmen dan dedikasi yang sangat tinggi kepada profesi mereka. Para guru yang seperti itu tergerak dari dalam diri untuk ambil bagian dalam peningkatan berkelanjutan dari praktis-praktis mengajar mereka dan pembelajaran peserta didik. Para guru ini sering kali disalahpahami dalam sebuah uji kompetensi guru yang didesain dan dilaksanakan secara tidak sesuai. Sebuah uji kompetensi dengan format pilihan ganda tidak akan memadai untuk menguji dan menampilkan nilai-nilai positif dari para guru tersebut.

Tanpa adanya sistem evaluasi guru yang sesuai bagaimanapun juga pengujian akan kemampuan dan pembelajaran profesional akan terabaikan. Para guru yang baik akan sangat mungkin meningkatkan keterampilan-keterampilan mereka, namun para guru yang berkemampuan biasa-biasa saja atau lemah akan terus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dan tidak akan memberikan hal yang baik kepada peserta didik. Sebuah sistem evaluasi guru yang efektif seharusnya memiliki sebuah tujuan yang dijabarkan secara jelas, menentukan prioritas-prioritas yang sesuai dan kental akan sebuah pendekatan komprehensif.

Uji kompetensi telah diluncurkan dan dikatakan berguna untuk memetakan kualitas guru secara nasional, menelaah ulang kualitas guru yang telah tersertifikasi dan menyesuaikan pemberian kompensasi tambahan tiap tiga bulan sekali. Semua tujuan ini telah menodai dan mengaburkan tujuan dari asesmen guru.

Dalam rangka memetakan kualitas guru, tidak perlu dilaksanakan sebuah pengujian atas semua guru. Sebuah teknik

²³ Artikel ini pernah dimuat di *The Jakarta Post* pada 11 Agustus 2012 dengan judul asli “*Let’s Get Serious about Nationwide Teacher Evaluations*”

pengambilan sampel yang sesuai seharusnya sudah memadai dan lebih dari efisien.

Penyesuaian kompensasi tambahan untuk para guru mungkin bagian dari proses politik di antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan DPR. Maka dari itu, hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan melaksanakan sebuah tes dengan skala yang sedemikian besar. Jika uji kompetensi memang seharusnya ditujukan untuk meninjau ulang kualitas dari guru yang telah tersertifikasi, pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan muncul.

Hingga batas titik mana ujian kompetensi tersebut mengarahkan para guru? Apakah tujuan dari ujian tersebut untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik ataukah hanya untuk meninjau ulang kualitas dari para guru tersebut? Aspek-aspek dari pengajaran yang berkualitas apa saja yang diuji oleh tes tersebut?

Program atau aktivitas apapun dalam sebuah sistem pendidikan seharusnya berujung pada tujuan meningkatkan pembelajaran peserta didik. Memiliki skor yang tinggi pada tes pilihan ganda tersebut tidak serta merta dapat diasumsikan pada peningkatan praktik-praktik pengajaran dan pembelajaran peserta didik. Ketika sistem pendidikan dengan jelas dan konsisten mensyaratkan asesmen dan pertumbuhan bagi masing-masing guru, para guru akan fokus kepada pertumbuhan diri mereka sendiri dan juga pertumbuhan para murid mereka. Sebuah penilaian kinerja guru yang efektif mencakup pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan, pelatihan antar guru sejawat, intervensi dan kepemimpinan kepala sekolah pada tingkat sekolah.

Pada akhirnya, sebuah sistem evaluasi guru yang serius mensyaratkan pihak berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam kaitannya dengan penghargaan bagi para guru yang berprestasi, peningkatan kompetensi bagi para guru yang tidak-terlalu-baik, dan pemecatan bagi para guru yang tidak baik. Sistem ini dilandaskan pada pendirian bahwa “semua guru bisa dan mau untuk belajar” pada tingkat kasus-per-kasus, beberapa guru terbukti tidak mau atau tidak mampu untuk berbuat demikian. Jika asesmen guru memang benar-benar bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik, dibutuhkan sebuah pendekatan komprehensif. Peningkatan kualitas para guru, yang

kemudian akan mengarah pada pembelajaran peserta didik, melangkah jauh melebihi hasil-hasil dari ujian-ujian kompetensi berbentuk pilihan ganda.

Pertumbuhan para guru penting untuk dinilai secara harian. Hal ini berarti bahwa para kepala sekolah harus secara sistematis melaksanakan tanggung jawab pengawasan mereka dengan baik. Sementara para pengawas resmi pendidikan di tingkat daerah jarang melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik, beberapa kepala sekolah telah menjalankan observasi kelas atau mendesain sebuah sistem *mentoring*, observasi dan pengawasan guru sejawat di sekolah-sekolah mereka. Sebagai akibatnya, beberapa pemimpin sekolah telah mengembangkan keterampilan-keterampilan pengawasan yang mumpuni yang kemudian membuat para guru harus memilih antara ditinggal tenggelam atau berenang sepanjang perjalanan karir mereka.

Sebuah bangsa yang serius meningkatkan pembelajaran anak-anak mereka seharusnya mulai dengan cara menunjuk para eksekutif pendidikan yang cukup konsisten membuat pertumbuhan para guru sebagai satu dari prioritas tertinggi dalam strategi pengembangan pendidikan.

Uji kompetensi guru dapat secara positif dianggap sebagai permulaan yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan guru, tapi sayangnya ujian tersebut tetap jauh dari sebuah model yang didesain dengan sesuai untuk evaluasi guru. Untuk meningkatkan pembelajaran murid pemikiran dan usaha lebih seharusnya diintegrasikan menjadi sebuah sistem asesmen kinerja guru yang efektif.

Bab 4

Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Asing²⁴

Ketika pendidikan tinggi sudah menjadi komoditas, persaingan untuk mendapatkan mahasiswa sudah menembus tingkat internasional. Terlebih lagi, ketika beberapa perguruan tinggi negeri menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), pertimbangan ekonomi dan bisnis mendorong berbagai upaya persaingan untuk meningkatkan pendapatan. Mahasiswa asing pun kemudian diincar untuk belajar di fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri di Indonesia (*Kompas*, 20 Juni 2008).

Dua alasan yang disampaikan untuk mendapatkan mahasiswa asing adalah demi mengejar status sebagai perguruan tinggi kelas dunia dan menambah sumber pendapatan PTN. Kedua alasan ini dilandasi kepentingan ekonomi dan pragmatisme yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan bangsa dan dimensi humanisme pendidikan.

Pembatasan untuk kepentingan bangsa

Keberadaan mahasiswa asing memang menjadi salah satu indikator status kelas dunia suatu perguruan tinggi. Sepanjang tahun kita disodori tawaran dari berbagai perguruan tinggi dari berbagai dunia. Perguruan tinggi kelas dunia di negara-negara lain juga membanggakan kehadiran mahasiswa asing dan mencantumkan jumlah negara asal mahasiswa asing ini. Semakin beragam populasi mahasiswa semakin bergengsi perguruan tinggi tersebut. Setiap tahun banyak perguruan tinggi yang mengadakan forum internasional untuk unjuk budaya dan kesenian mahasiswa asing yang sedang studi di sana. Dalam persaingan ini, Singapura bahkan memulai lebih awal dengan “mencuri start” dan menawarkan beasiswa bagi siswa berprestasi lulusan SMP dari negara-negara ASEAN.

Namun, di balik ketatnya kompetisi yang terjadi antar perguruan tinggi dan antar negara dalam memperebutkan mahasiswa asing, sebenarnya perguruan tinggi dari luar negeri tidak gegabah dan masih menghormati kebijakan yang dibuat oleh negara masing-masing untuk melindungi kepentingannya. Tidak semua program studi mereka jual kepada mahasiswa asing.

²⁴ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 25 Juni 2008

Pemilihan program studi mana yang bisa dijual dan mana yang harus diproteksi tentunya dilandasi oleh suatu perencanaan strategis bukan saja demi kepentingan perguruan tinggi tersebut melainkan juga demi kepentingan bangsa dan negara.

Pada umumnya, program studi yang gencar dijual termasuk dalam bidang humaniora, manajemen bisnis, dan teknologi. Agenda tersembunyi dalam kebijakan ini adalah mahasiswa asing yang belajar humaniora dan manajemen bisnis diharapkan menjadi agen pemasaran kebudayaan negara tersebut sementara lulusan program-program studi teknologi akan kembali ke negara asal dengan membawa bukan hanya ilmu pengetahuan melainkan juga preferensi terhadap produk-produk teknologi yang pernah dipelajari dan digunakan selama masa studi. Dengan kata lain, mahasiswa-mahasiswa asing ini menjadi ujung tombak bagi ekspor produk-produk teknologi ke berbagai negara berkembang.

Sebaliknya, banyak negara menutup (atau sangat membatasi) kesempatan bagi mahasiswa asing untuk memasuki fakultas kedokteran. Kanada, Australia, dan Singapura misalnya, sangat gencar mencari mahasiswa asing untuk berbagai jurusan namun tidak sama sekali untuk fakultas kedokteran mereka. Di Amerika Serikat, mahasiswa yang ingin menjadi dokter harus menyelesaikan program *S1*pra-kedokteran atau *pre-med*. Program ini masih terbuka bagi mahasiswa asing. Namun pada jenjang selanjutnya, ada serangkaian tes yang harus diselesaikan sebelum mahasiswa menyelesaikan empat tahun sekolah kedokteran dan kemudian residensi yang bisa memakan waktu antara tiga sampai tujuh tahun. Pada jenjang lanjutan ini, sedikit sekali mahasiswa asing (bahkan yang paling berprestasi sekalipun) yang bisa lolos. Negara-negara maju (yang paling kapitalis sekalipun) merasa perlu melindungi kepentingan nasionalnya dengan menutup atau membatasi kesempatan memasuki fakultas kedokteran karena layanan kesehatan diperuntukan bagi kemashalatan orang banyak. Seharusnya PTN dan PTS di Indonesia bisa belajar untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan berpikir lebih panjang. Masih ada banyak program studi lain yang bisa dijual walaupun PTN masih harus berjuang keras meningkatkan mutu program studi tersebut.

Kuda Troya

Alasan kedua untuk menambah sumber pendapatan PTN merupakan pragmatisme jangka pendek. Ketika rasio dokter dan penduduk di Indonesia masih jauh di bawah standar terutama di luar kota besar (target 2010, 40 dokter umum dan 6 dokter spesialis per 100.000 penduduk), seharusnya anak-anak negeri diprioritaskan untuk mendapatkan kesempatan menjadi dokter bagi bangsanya sendiri. Perdagangan bebas ASEAN 2015 akan membuka pintu bagi modal asing untuk merambah sektor kesehatan di Indonesia.

Ketika kesempatan diberikan kepada bangsa lain, kita bisa membayangkan betapa akan makin terpuruknya layanan kesehatan di Indonesia. Sungguh ironis, mahasiswa dari Malaysia diundang untuk belajar kedokteran di Indonesia sementara orang-orang Indonesia rela membayar lebih tinggi untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih memuaskan di Malaysia dan Singapura. Orang-orang Indonesia yang berduit rela membayar lebih karena merasa mendapatkan layanan spesialis yang setara dengan biaya yang dikeluarkan (*value for money*) di negara tetangga. Pemeriksaan yang lebih teliti dan dokter yang meluangkan lebih banyak waktu untuk konsultasi serta memberikan penjelasan yang lebih seksama sementara sebagian dokter spesialis di Indonesia terkesan terburu-buru menangani pasien entah karena kejar setoran atau karena antrean pasien yang sangat panjang.

Kebutuhan PTN dan PTS untuk meningkatkan pendapatan bisa dipahami. Akan tetapi, menerima mahasiswa asing karena tergiur oleh sumbangan masuk dan SPP yang bisa mereka bayar berkali-kali lipat sama seperti memasukkan kuda troya ke negeri sendiri. Tidak perlu kemampuan intelijen canggih untuk membaca strategi pemasaran pendidikan tinggi di tingkat internasional. Kegegaban dan kebodohan elit pendidikan akan menjerumuskan bangsa di masa mendatang. Seharusnya, beasiswa baik dari pemerintah maupun korporasi diperbanyak untuk memberi kesempatan anak-anak bangsa menjadi dokter bagi bangsanya sendiri dan bersaing dengan rekan-rekan mereka di negara tetangga.

Membedah Industri Pendidikan Tinggi²⁵

Kompetisi global telah melanda dunia pendidikan. Setiap tahun ketika lulusan SMA dan SMK bersaing untuk mendapatkan institusi pilihan, perguruan tinggipun berlomba-lomba mempromosikan diri dan menjaring calon-calon mahasiswa potensial. “Potensial” bisa berarti kemampuan akademis atau finansial yang memadai. Tidak mau kalah dengan promosi gencar perguruan-perguruan tinggi dari luar negeri, perguruan-perguruan tinggi swasta (PTS) melakukan berbagai upaya pemasaran dan menjadikan dunia pendidikan tinggi tampak seperti bisnis dan industri. Kini beberapa perguruan tinggi negeripun tidak mau ketinggalan dengan membuka jalur khusus atau ekstensi.

Persaingan merebut kue

Tahun terakhir pada jenjang SMA umumnya berakhir pada sekitar bulan Mei. Lulusan SMA/SMK kemudian mendapatkan surat tanda tamat belajar (STTB) dan surat tanda kelulusan (STK) sekitar bulan Juni. Namun sebelum mengikuti UN, sebagian murid SMA/SMK—terutama yang angka-angka di rapornya sampai dengan semester 5 memenuhi atau melampaui rata-rata—sudah mendapatkan kursi di perguruan tinggi.

Hal ini dikarenakan beberapa perguruan tinggi sudah melaksanakan ujian seleksi masuk dan menerima calon dari lulusan SMA/SMK sekitar bulan Maret dan April. Bahkan, ada pula perguruan tinggi yang sudah memulai seleksi gelombang pertama pada bulan Januari dan Februari. Seleksi mahasiswa baru pun menjadi makin dini karena perguruan tinggi berlomba-lomba memajukan tanggal penerimaan mahasiswa baru untuk menjaring mahasiswa pilihan sebelum didahului oleh perguruan tinggi pesaing. Dalam semangat persaingan ini, ada perguruan tinggi yang menetapkan seleksi gelombang pertama pada awal tahun tetapi sebetulnya sudah diam-diam memastikan untuk menerima mahasiswa pilihan sekitar bulan Oktober dan November ketika murid SMA/SMK belum mengikuti ujian akhir semester gasal mereka. Seleksi pra gelombang 1 ini dibungkus dengan nama jalur prestasi, jalur khusus, jalur kerja sama, dan semacamnya.

²⁵ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 17 Juni 2004

Praktik penerimaan mahasiswa baru ketika notabene mereka masih berstatus murid kelas 12 sering menimbulkan protes dari pihak sekolah menengah. Ada keluhan murid kelas 12 yang sudah diterima di perguruan tinggi menunjukkan kecenderungan meremehkan pelajaran dan guru mereka walaupun beberapa perguruan tinggi menjanjikan mereka bisa saja membatalkan penerimaan jika ada laporan dari pihak SMA/SMK mengenai tindakan indisipliner peserta didik tersebut.

Keluhan lain dari pihak SMA adalah kedatangan dan kunjungan perguruan tinggi yang meminta waktu untuk melakukan presentasi kepada para murid kelas 11 dan 12. Saking banyaknya kunjungan ini, kepala dan guru SMA mengkhawatirkan terganggunya jadwal kerja dan pelajaran mereka. Di satu sisi, murid kelas 12 memang membutuhkan informasi dan sosialisasi dari perguruan tinggi. Di sisi lain, jika kepala SMA/SMK melayani setiap permintaan presentasi, waktu pelajaran harus dikorbankan padahal murid kelas 12 juga harus mempersiapkan diri menghadapi UN. Beberapa SMA—terutama yang favorit dan menjadi target potensial PTS—mengakomodasi kedua kebutuhan ini dengan menyediakan satu atau dua hari khusus untuk informasi studi dan mengundang PTS (dalam negeri maupun perwakilan PT luar negeri). Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bersedia membayar sumbangan masuk yang berkisar dari Rp 3 juta sampai dengan di atas Rp 30 juta, pihak perguruan tinggipun tidak berkeberatan membayar sewa stan atau memasang iklan di buku kenangan yang dibuat sekolah. Jadinya, selain memberikan kesempatan bagi peserta didiknya untuk *window shopping* sebelum membuat keputusan akhir, ajang promosi perguruan tinggi ini juga memberi kesempatan bagi SMA untuk mendapatkan dana tambahan yang dialokasikan untuk keperluan sekolah.

Program unggulan

Akreditasi program studi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) merupakan syarat minimal namun tidak cukup memadai untuk dijadikan poin jual. Kini perguruan tinggi berlomba-lomba mengemas dan menonjolkan beberapa program unggulan lain, di antaranya sertifikasi internasional, kerja sama dengan industri, dan kerja sama internasional. Sertifikasi internasional

bisa berupa pengakuan dari organisasi profesi di luar negeri (misalnya ada program bisnis yang mengklaim mendapatkan pengakuan dari AACSB, *American Association of Colleges and Schools of Business*) atau sertifikasi kendali mutu yang biasanya dilakukan di dunia industri (ada PTS yang telah memperoleh ISO 9001).

Keterkaitan antara perguruan tinggi dan dunia kerja merupakan salah satu area yang sering mendapat sorotan. Dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (SK Mendiknas No. 045/U/2002 perihal Kurikulum Inti), pengajaran harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kompetensi yang ditentukan oleh industri terkait dan organisasi profesi. Maka dari itu, kerja sama dengan industri kemudian sering dijadikan poin jual. Beberapa perguruan tinggi mencantumkan pelatihan dan sertifikasi Microsoft, SAP, atau AutoCAD dalam brosur mereka sementara perguruan tinggi lain memasukkan nama-nama perusahaan besar sebagai tempat magang dan penampung lulusan mereka. Kemudian sekarang Kurikulum Perguruan Tinggi harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kerja sama internasional—berupa program transfer, *sandwich*, *double degree* dengan universitas luar negeri, dan pertukaran mahasiswa—sering ditonjolkan sebagai daya tarik karena dipercaya dapat meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi berkualitas internasional. Dalam hal ini, calon mahasiswa dan orang tua perlu jeli dan memperhatikan dua hal. Pertama, apakah institusi luar negeri yang dipasang sebagai mitra memang benar berkualitas. Tidak semua institusi asing bermutu. Perguruan tinggi di Indonesia bisa saja memanfaatkan gengsi dan kelatahan orang Indonesia (termasuk diri mereka sendiri) terhadap label asing. Ada universitas terkemuka di Indonesia yang pernah terkecoh dan mengecoh publik melalui kemitraan dengan institusi yang ternyata malah hanya menawarkan program non gelar dan reputasinya biasa-biasa saja. Kadangkala malah, institusi luar negeri yang dicantumkan menggunakan nama plesetan yang bisa mengecoh. University of Berkley tentu tidak sama dengan University of California at Berkeley dan Nanyang Institute berbeda dengan Nanyang Tehnological University. Kedua, jika institusi luar negeri yang dipasang memang benar bergengsi, apakah betul ada kesepakatan timbal balik antara

kedua institusi. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia tidak segan-segan mencatat nama besar seperti INSEAD, Harvard University, universitas dalam kelompok *Ivy League* atau universitas besar lainnya. Calon mahasiswa perlu bertanya lebih lanjut sejauh apa dan dalam kapasitas apa kesepakatan antara kedua institusi, apakah ada perjanjian tertulis, dan manfaat apa yang bakal diperoleh mahasiswa dalam kerja sama ini.

Tim dan strategi pemasaran

Seperti layaknya perusahaan, banyak perguruan tinggi mempunyai tim marketing khusus walaupun mereka masih sungkan-sungkan menggunakan istilah marketing. Umumnya, tim marketing ini bekerja dengan bendera humas, tim informasi studi atau biro informasi. Di beberapa PTS, tim pemasaran ini bekerja penuh waktu secara profesional dengan armada lengkap mulai dari staf relasi media, presenter, desainer brosur, sampai dengan petugas jaga pameran. Periode sibuk bagi tim ini biasanya antara bulan Oktober sampai dengan Mei tapi mereka bekerja sepanjang tahun. Di luar periode sibuk, tim marketing melakukan pembenahan internal di perguruan tinggi. Mereka merancang prospektus, brosur, dan katalog dengan cetakan dan desain yang tidak kalah mewah dengan prospektus perusahaan multinasional. Selain itu, mereka juga mengkoordinir para dosen dan wakil mahasiswa dari semua program studi yang ada dan melibatkan beberapa di antaranya dalam kegiatan-kegiatan promosi di dalam maupun di luar kampus. Beberapa dosenpun tidak segan-segan menjalankan peran sebagai petugas promosi jurusan dalam kemasan seminar maupun pameran studi.

Selama periode sibuk, berbagai macam kegiatan promosi dilakukan baik PTS maupun PTN. Kegiatan promosi yang berkaitan langsung dengan jurusan adalah lomba untuk tingkat SMA. Program studi Sastra Inggris, misalnya, menyelenggarakan lomba pidato, debat, membaca berita, atau menulis esai dalam bahasa Inggris. Program studi Teknik Informatika merancang lomba desain web atau program *software*. Program studi Desain menantang murid SMA untuk berkreasi dengan berbagai macam desain kreatif. Acara-acara lomba ini juga untuk menarik peserta didik SMA berkunjung ke kampus dan melihat-lihat fasilitas perguruan tinggi.

Selain lomba, beberapa perguruan tinggi juga menyelenggarakan Open House besar-besaran. Ada yang melakukannya di kampus tapi ada pula yang menyewa hotel bintang lima. Dalam acara Open House ini, berbagai keunggulan pada masing-masing program studi dan di tingkat perguruan tinggi dipamerkan melalui presentasi, tayangan video, foto, dan contoh produk. Seakan tidak ingin kehilangan kesempatan, ajang Open House ini juga dipakai untuk menerima pendaftaran dan melaksanakan tes masuk saat itu juga.

Kegiatan promosi tidak hanya dilakukan di kota tempat perguruan tinggi. Tim pemasaran juga melakukan perjalanan ke luar kota bahkan ke luar pulau dalam rangka menjemput bola. Seleksi dan tes masuk juga bisa dilakukan di kota yang dikunjungi sehingga peserta didik tidak harus jauh-jauh meninggalkan kota asalnya untuk berburu perguruan tinggi. Agaknya kini adalah era perguruan tinggi berburu calon mahasiswa. Upaya pemasaran bukan hanya terbatas pada kegiatan promosi sesaat melainkan juga strategi jangka panjang berupa program menjalin relasi dan kerja sama dengan SMA. Dalam beberapa tahun belakangan ini, para kepala sekolah dan guru bimbingan konseling di SMA menjadi orang penting yang diperhatikan dan dimanjakan. Perguruan tinggi menggelar berbagai seminar tahunan dan mengundang mereka dengan menanggung semua biaya transportasi dan akomodasi. Ada pula perguruan tinggi yang melakukan kerja sama secara berkesinambungan misalnya program pendampingan pelajaran teknologi informasi atau revitalisasi perpustakaan di SMA. Tentunya, program kerja sama ini diharapkan bisa menanamkan *brand awareness* di kalangan guru dan murid SMA dan membuat mereka mengingat perguruan tinggi tersebut untuk dipilih di kemudian hari.

Berbicara soal promosi, memang tidak ada kecap nomor 2. Masing-masing perguruan tinggi berupaya menampilkan keunggulan dan nilai jual mereka. Kepala SMA/SMK, calon mahasiswa, dan orang tua perlu mencermati persaingan antar perguruan tinggi dengan cerdas dan bijak dan mempelajari setiap tawaran dengan kritis agar bisa membuat keputusan dan pilihan yang paling baik dan sesuai di antara semua alternatif yang ada.

Privatisasi Pendidikan dan Implikasinya²⁶

Mahasiswa UI dan UNS menggelar aksi penolakan pemberlakuan uang pangkal (*Kompas*, 9 dan 10 Agustus 2004). Gejolak ini telah dan, diperkirakan juga, akan terjadi pada beberapa PTN terkemuka lainnya. Era otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengatur pengelolannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini perguruan tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjaringan mahasiswa baru untuk mendatangkan dana.

Perdebatan antara anti-otonomi dan pro-otonomi perguruan tinggi tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu. Kelompok yang menentang otonomi perguruan tinggi berpandangan negara harus bertanggung jawab atas pendidikan dan menanggung pembiayaan PTN. Mereka mengkhawatirkan privatisasi perguruan tinggi akan menutup akses bagi calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu dan fenomena komersialisasi ini justru akan menurunkan komitmen dan mutu pendidikan tinggi. Bahwa negara sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan tinggi sungguh tidak masuk akal bagi kelompok ini mengingat kebocoran uang negara secara besar-besaran dalam berbagai kasus korupsi telah menempatkan negara ini sebagai yang terkorup di seluruh dunia. Selain itu, eksploitasi sumber-sumber daya yang melibatkan kekuatan asing dan kroni dari dalam negeri sendiri sudah menguras kekayaan bangsa ini. Gejala McDonaldisasi pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai bagian dari gerakan neo-liberalisme yang menjelma dalam kebijakan pasar bebas dan mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi berbagai aset pemerintah. Heru Nugroho dkk (*McDonaldisasi Pendidikan Tinggi*, 2002) menyoroti kontroversi otonomi perguruan tinggi di UGM dan menganggap kebijakan tersebut telah mengkhianati ideologi negara dan UUD 1945.

Sementara itu, kebijakan privatisasi pendidikan tinggi ini nampaknya akan terus dijalankan. Dua alasan yang sering

²⁶ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 5 Juli 2004

dikemukakan adalah ketidakmampuan pemerintah membiayai pendidikan tinggi dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi negeri. Terlepas dari alasannya, kebijakan otonomi perguruan tinggi membawa beberapa implikasi serius—baik positif maupun negatif—yang perlu diantisipasi dan dikaji secara objektif.

Secara positif, dikotomi perguruan tinggi swasta dan negeri bisa mulai dihilangkan. Sebelum era otonomi perguruan tinggi, ada persaingan tidak seimbang antara PTN dan PTS. PTN terbiasa mendapat subsidi dari negara sedangkan PTS harus berjuang menggalang dana agar bisa bertahan padahal tidak semua mahasiswa yang masuk PTN perlu disubsidi dan sebaliknya tidak semua mahasiswa yang ditampung di PTS bisa menanggung sendiri biaya kuliah. Ditengarai, kultur lama PTN sebagai lembaga yang dibiayai negara telah menimbulkan kurangnya efisiensi, etos kerja, semangat pelayanan publik, dan komitmen untuk bersaing dan meningkatkan mutu. Kultur “bekerja baik atau tidak, gajinya sama kecilnya” dan fenomena “kenapa harus melayani mahasiswa karena *toh* bukan mereka yang membayar saya” memang sangat kentara di banyak PTN dibandingkan dengan PTS. Diharapkan, otonomi perguruan tinggi bisa membawa angin segar dan memacu semangat untuk melayani mahasiswa dan publik dengan sebaik-baiknya.

Di balik segala harapan yang terkandung dalam kebijakan otonomi, ada beberapa potensi konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dan dicarikan jalan keluarnya. Para mahasiswa yang menentang pemberlakuan uang sumbangan masuk di UI mengkhawatirkan gejala elitisme di universitas tersebut. Kekhawatiran ini perlu diperhatikan dan tidak bisa dikesampingkan hanya dengan penghiburan adanya program subsidi silang dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Belum jelas apakah pemberlakuan uang sumbangan dan uang kuliah tinggi sudah disertai dengan kuota beasiswa yang memang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi calon mahasiswa. Di negara sekapitalis Amerika Serikat sekalipun, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih sangat diperhatikan. Walaupun perguruan tinggi tidak gratis, ada sistem penunjang yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai kelas mengakses pendidikan sampai pada jenjang yang paling tinggi. Ada sangat banyak program beasiswa dengan berbagai kategori

yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Jika tidak berhasil mendapatkan beasiswa, ada program pinjaman lunak dan tanpa bunga bagi mahasiswa yang bisa dicicil setelah mereka lulus dan bekerja. Tanpa perhitungan kuota yang tepat dan sistem penunjang aksesibilitas, elitisme dalam pendidikan tinggi akan mengancam proses demokratisasi di Indonesia. Pendidikan yang diharapkan menjadi jembatan bagi pemerolehan akses ekonomi, politik, hukum, dan budaya secara lebih merata menjadi roboh.

Dengan kebijakan otonomi pengelolaan keuangan, perguruan tinggi berlomba-lomba menggalakkan strategi dan program yang diperkirakan akan mendatangkan banyak dana. Di sisi lain, perguruan tinggi juga dengan mudahnya akan menutup unit atau program yang dianggap merugikan. Otonomi perguruan tinggi biasanya dilaksanakan secara berjenjang. Fakultas (atau juga program studi) juga diberi hak dan kewajiban menggalang dan mengelola sendiri keuangannya. Konsekuensi logis dari kebijakan ini adalah penutupan program-program studi ilmu-ilmu murni seperti filsafat, sejarah, dan program studi yang dianggap tidak bisa membekali mahasiswa secara langsung untuk mencari nafkah seperti arkeologi, antropologi, sosiologi, sastra Jawa dan sebagainya. Selanjutnya perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia akan dipenuhi dengan program-program studi ekonomi, bisnis, dan teknik serta program-program studi yang berorientasi pada pertukangan (desain grafis, kuliner dsb). Tentu saja hal ini akan mengancam proses terbangunnya wacana ilmu pengetahuan secara kolektif dan pencerahan pemikiran dalam masyarakat.

Selain rasionalitas penutupan beberapa program studi, beberapa unit atau pusat yang dianggap tidak berguna terancam tutup dengan alasan efisiensi keuangan. Kegiatan-kegiatan penelitian yang menghubungkan universitas dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta program pengabdian masyarakat akan terancam keberadaannya jika tidak bisa menggalang dana sendiri dari sumber di luar universitas. Sebagai gantinya, program-program non gelar dan ekstensi makin menjamur karena banyak peminatnya. Maka universitas akan mengalami proses degradasi dari pusat komunitas ilmiah dan pengembangan masyarakat menjadi pusat perbelanjaan pengetahuan dan keterampilan serta kursus-kursus.

Untuk menunjang kebijakan otonomi perguruan tinggi, meritokrasi dilaksanakan dengan menghargai dosen dan karyawan sesuai dengan kinerja dan prestasi nyata, bukan berdasarkan senioritas dan masa kerja. Meritokrasi memang bertujuan baik dan jika dilaksanakan secara konsisten akan memacu orang untuk berprestasi. Namun, tanpa jiwa dan sistem yang matang, meritokrasi yang dilaksanakan akan mengikis idealisme dosen dan karyawan. Mereka akan menghitung pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat berdasarkan jam dan jumlah mahasiswa. Untuk mendapatkan honorarium yang sebesar-besarnya, dosen mengajar sebanyak mungkin jam kuliah dan membimbing sebanyak mungkin mahasiswa.

Akibatnya, kualitas pengajaran dan penelitian dikorbankan. Ada saja dosen yang mempunyai beban lebih dari 30 sks per semester. Ini berarti dosen tersebut seharusnya menyediakan waktu bagi mahasiswa (30 x 50 menit kegiatan tatap muka) + (30 x 60 menit kegiatan terstruktur/terjadual) + (30 x 60 menit kegiatan mandiri) atau 85 jam per minggunya atau rata-rata 14 jam per harinya (85 jam dibagi 6 hari). Dipotong dengan waktu untuk istirahat dan tidur, dosen hanya punya sisa waktu sekitar 2 jam untuk makan, transportasi, dan kegiatan pribadi. Ditambah lagi, dosen juga berlomba-lomba dan berebut berbagai proyek untuk menambah penghasilan. Dalam sulap-sulapan jam semacam ini, biasanya jam untuk mahasiswa yang akan dikurangi dan ini berarti mahasiswa yang menjadi korban pelayanan pendidikan yang rendah.

Akhirnya, keberadaan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam penggalangan dan pengelolaan dana merupakan syarat mutlak bagi kebijakan otonomi perguruan tinggi. Tanpa akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan dana oleh segelintir elit kampus bisa menimbulkan kecurigaan. Jika universitas dalam keadaan minus, akan muncul kecurigaan mengenai ketidak-becusan atau ketidak-jujuran dalam mengelola keuangan. Jika universitas dalam keadaan surplus, kecurigaan ini juga akan mewarnai setiap pergantian pucuk pimpinan karena berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan aset-aset lembaga.

Era persaingan global dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi. Ketidak-mampuan negara dalam membiayai pendidikan tinggi tidak seharusnya membuat perguruan tinggi negeri terperosok dalam jurang pencarian dana dan pengabaian mutu. Jati diri dan misi pendidikan tidak boleh dilupakan. Peranan pendidikan sebagai jembatan bagi demokratisasi masyarakat harus tetap menjadi jiwa dalam setiap strategi menghadapi persaingan di tingkat nasional dan internasional.

Otonomi dan Keterjangkauan Pendidikan Tinggi²⁷

Pada tingkat makro, pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia demi peradaban manusia. Secara pragmatis-ekonomis, pendidikan tinggi akan mengembangkan komunitas warga terdidik, terampil, berbudaya dan berakhlak mulia untuk meningkatkan daya saing bangsa. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang semakin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia demi peradaban manusia. Pada tingkat individual, pendidikan tinggi merupakan salah satu rute yang bisa diambil warga masyarakat untuk mempertahankan atau meningkatkan status dan kelas sosio-ekonomi.

Penempatan permasalahan dalam perspektif berbagai kepentingan dapat membantu memberikan alternatif solusi bagi kebutuhan otonomi dan keterjangkauan terhadap pendidikan tinggi.

Pusaran kepentingan

Komplikasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi—tampak dalam dinamika pro-kontra yang berakhir pada pembatalan UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). DPR dan Pemerintah (Kemendikbud) sebagai pemegang kewenangan berupaya melegalisasi kewenangan pengaturan tata kelola pendidikan tinggi dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. . Rully Chairul Azwar, anggota Komisi X DPR RI menyebutkan tiga permasalahan pendidikan tinggi (keterbatasan daya tampung PT bermutu, keterjangkauan biaya, dan kompetensi-relevansi) sebagai alasan pengesahan UU Pendidikan Tinggi ini. Kalangan akademisi mencemaskan UU Pendidikan Tinggi yang baru akan berakhir pada pegebirian otonomi dalam pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Potensi intervensi pemerintah terhadap perguruan tinggi

²⁷ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 18 Juli 2012

dikhawatirkan seperti soal kurikulum, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat akan menghambat inovasi, kreativitas, dan keunggulan akademik. Bahkan sebagian dari kalangan akademisi ini “merindukan” kembali UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP yang dianggap lebih membawa semangat otonomi. Kalangan akademisi ini juga berupaya menepis kekhawatiran masyarakat bahwa otonomi universitas akan menyebabkan ketiadaan akses bagi masyarakat kurang mampu (Sulistiyowati Irianto, 2012). Meskipun terdapat upaya pembatalan UU Pendidikan Tinggi oleh berbagai kalangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak pembatalan UU Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 April 2014 di hadapan para penggugat yang merupakan kumpulan dari berbagai kalangan akademisi.

Sementara itu, kalangan warga masyarakat (mahasiswa dan sebagian akademisi yang lain) mencemaskan implementasi otonomi sebagai pengurangan akses bagi masyarakat miskin. Wacana “kastanisasi” oleh Darmaningtyas, dkk. dan penolakan terhadap penyeragaman oleh kalangan perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi motor dalam proses pembatalan Undang Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan atau BHP. Komisi X DPR memberi *tagline* yang terdengar populis yakni MPR (Melindungi *Stakeholders*, Pro Rakyat, dan Relevan) untuk UU Pendidikan Tinggi yang baru. Untungnya, MK menyatakan bahwa UU BHP tidak selaras dengan UUD 1945 dan UU tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dengan demikian membatalkan UU BHP pada tanggal 31 Maret 2010. Dengan demikian, masih ada harapan bagi para siswa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan fasilitas pendidikan tinggi yang layak tanpa harus terbebani biaya sekolah yang dirasa cukup memberatkan.

Pendanaan dalam kepentingan keterjangkauan dan mutu

Pada dasarnya pengelolaan perguruan tinggi harus berdasarkan prinsip nirlaba, akuntabilitas, dan transparansi. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan seluruh bangsa Indonesia, bukan golongan tertentu. Karena itu, banyak pihak yang beranggapan, sudah selayaknya pemerintah bertanggung jawab atas pembiayaan PTN, setidaknya mencegah terjadinya privatisasi dan/atau

komersialisasi pendidikan tinggi, sehingga calon dari keluarga miskin tidak terpinggirkan. Namun realita keterbatasan anggaran pemerintah serta komitmen pendidikan dasar untuk semua dan pengalokasian yang lebih besar untuk pendidikan dasar dan menengah menyebabkan pilihan-pilihan yang sulit bagi perguruan tinggi. Dalam era keterbatasan ini, kompetisi untuk merebut sumber-sumber dana dari masyarakat menjadi makin marak. Pada masa pra-BHMN (Badan Hukum Milik Negara), kompetisi hanya terjadi secara kasat mata di kalangan PTS. Namun kini, PTN pun terseret dalam kompetisi ini. Bahkan beberapa PTN tidak segan-segan membuka cabang di kota lain dengan mengirim dosen terbang. Ketika pendidikan tinggi sudah menjadi komoditas, diskriminasi terhadap kalangan miskin akan terjadi secara sistematis dan legal. Pendidikan tinggi yang pro-rakyat menjadi sebuah keharusan mengingat salah satu strategi pembangunan nasional yang didengung-dengungkan adalah pro-rakyat.

Otonomi perguruan tinggi memang menjadi hakikat yang tidak bisa diganggu gugat demi penjaminan mutu dan pencapaian keunggulan. Ini membutuhkan biaya besar. DPR dan Pemerintah sudah menunjukkan niat mulia untuk mengatur dan memastikan tiga permasalahan pendidikan tinggi (keterbatasan daya tampung PT bermutu, keterjangkauan biaya, dan kompetensi-relevansi) bisa diatasi. Namun pasal-pasal dalam UU Pendidikan Tinggi justru berlebihan dalam pengaturan sehingga memang layak untuk dibatalkan. Kebebasan dalam pengelolaan akademik maupun non akademik dalam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus dijamin dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kekhawatiran terhadap PTS “kelas Ruko” yang dilontarkan oleh kalangan PTN terlalu berlebihan karena seiring dengan berjalannya waktu dan pendewasaan masyarakat, PTS semacam ini pada akhirnya harus mengambil pilihan membenahi dan meningkatkan diri atau tumbang dalam persaingan dengan PTS lain dan PTN. Alternatif solusi bagi kebutuhan otonomi dan keterjangkauan terhadap pendidikan tinggi adalah alokasi dana beasiswa oleh suatu badan yang terpisah dari PTN. Bisa saja para Rektor PT terpilih (negeri maupun swasta) menjadi bagian dari badan ini namun penyaluran dana tidak seperti *block grant* yang diberikan langsung kepada PTN.

Mahasiswa dari PTN maupun PTS terpilih bisa mengajukan dan mendapat beasiswa atau pinjaman berdasarkan prestasi dan/atau kebutuhan. Dana disalurkan ke akun mahasiswa di PT dan hanya bisa digunakan untuk biaya pendidikan. Praktik ini dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Singapura. Bahkan beberapa korporasi di Indonesia juga sudah menjalankan program beasiswa ini sebagai bagian CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pada akhirnya solusi ini akan membantu sebagian permasalahan keterjangkauan tanpa intervensi terhadap otonomi perguruan tinggi dalam pencapaian keunggulan akademik. Selain itu, solusi ini juga akan menerobos dikotomi PTN-PTS dan menempatkan tanggung jawab pendidikan tinggi secara bersama-sama oleh negeri dan swasta secara adil dan kompetitif.

Peran Korporasi dalam Pendidikan²⁸

Berkaca dari banyaknya fenomena yang menunjukkan kesulitan pemerintah kabinet terdahulu dalam mengelola pendidikan seperti tampak pada pendanaan pendidikan dasar menengah dan privatisasi perguruan tinggi dalam kesenjangan antara tanggung jawab dan kekuasaan negara, kekuatan pasar makin mengakar dan dalam 20 tahun ke depan akan makin mengubah wajah pendidikan nasional.

Terjepit di antara tiga poros kekuatan era globalisasi (negara-pasar-masyarakat), lembaga-lembaga pendidikan menghadapi tantangan terberat yakni memfasilitasi suatu proses pertumbuhan bagi setiap insan yang terlibat di dalamnya (baik peserta didik, guru, pimpinan dan pengelola). Jika sekolah-sekolah ingin membenahi diri dan meningkatkan mutu dalam pusaran ketiga poros kekuatan ini, pengelola dan pimpinan sekolah perlu membidik dengan tepat dan bijak porsi dan peran masing-masing poros kekuatan.

Kekuatan negara yang dijalankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah melalui Dinas Pendidikan di daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyentuh pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah melalui regulasi, kebijakan pendidikan dan anggaran. Regulasi dan kebijakan pendidikan dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Regulasi dan kebijakan pendidikan mengatur mulai dari standarisasi pendidikan, pembiayaan, pendidikan dan sertifikasi guru, kurikulum sampai dengan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, negara juga mengatur pendidikan melalui kekuasaannya dalam merancang dan melaksanakan anggaran (baik di tingkat nasional maupun daerah). Secara positif, kekuatan negara dibutuhkan karena beberapa alasan. Pertama, pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka dari itu, negara perlu memberi kepastian dan pertanggungjawaban atas pemberian layanan dasar pendidikan bagi semua warganya. Melalui anggaran, negara dapat memastikan standar layanan publik pendidikan bisa dipenuhi secara merata di seluruh

²⁸ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 2 Mei 2007

Indonesia. Kedua, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya bisa memenuhi standarisasi layanan dasar pendidikan dan mengatasi kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia. Akhirnya, persekolahan masih menjadi salah satu perangkat untuk membangun kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kekuatan negara dalam bentuk kebijakan kurikulum, pendidikan guru, dan evaluasi pendidikan menjadi perangkat untuk membentuk nasionalisme secara sistematis dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu pulau ke pulau lainnya. Sebaliknya, secara negatif, kekuatan negara yang berlebihan akan bersifat hegemonik dan mereduksi esensi pendidikan. Ruang-ruang kreatif yang seharusnya dipelihara dalam bidang pendidikan bisa menyempit dan menghilang.

Kekuatan pasar yang mulai merambah dunia pendidikan muncul dalam bentuk sumber-sumber daya yang dimiliki termasuk di antaranya modal dan jejaring ekonomis. Lembaga-lembaga pendidikan juga masuk dalam pusaran kompetisi pasar. Secara positif, kompetisi pasar antar lembaga pendidikan akan membawa kesadaran mengenai kebutuhan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Para pengelola dan pengurus harus mengubah paradigma pengelolaan sekolah sebagai suatu layanan pendidikan. Namun di balik kekuatan pasar yang mendorong kompetisi dalam pendidikan demi perbaikan mutu, prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas tidak sesuai untuk sistem pendidikan karena secara prinsip, pendidikan bermutu adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak ini bagi semua anak tanpa terkecuali.

Sejajar dengan kekuatan negara dan pasar, seharusnya kekuatan masyarakat menjadi salah satu penopang proses demokratisasi suatu bangsa melalui pendidikan. Kekuatan masyarakat bisa menjadi penyeimbang dalam interaksi antar warga dalam ruang publik yang salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan terlalu penting untuk diserahkan kepada pemerintah saja atau dibiarkan bergulir dalam arus pasar. Secara historis, pendidikan dimulai oleh masyarakat untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, peran masyarakat dalam kemajuan pendidikan sangat penting dan perlu terus ditingkatkan agar

menjadi sejajar dengan peran negara dan pasar. Masyarakat bisa memberikan kontribusi berupa sumber-sumber daya berupa dana, jejaring, keterkaitan budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Namun sayangnya, masyarakat yang diharapkan bisa menjadi kekuatan penyeimbang bagi kecenderungan hegemonik negara dan kecenderungan eksploitatif pasar masih sangat lemah dan terjebak dalam kemiskinan struktural.

Peran korporasi dalam pembiayaan pendidikan baik berupa sumbangan langsung kepada institusi pendidikan maupun program-program seperti beasiswa (beswan), penelitian, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility* – CSR). Peran korporasi ini memberikan beberapa kontribusi terhadap dunia pendidikan. Pertama, sumbangan dana dari korporasi memang dibutuhkan karena anggaran dari pemerintah belum mencukupi kebutuhan sementara masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan. Misalnya, program beasiswa sangat membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan memungkinkan mereka untuk mengubah kelas sosial dan ekonomi melalui akses pendidikan. Kedua, program-program yang disponsori korporasi juga memberikan peluang bagi insan-insan pendidikan untuk keluar dari menara gading dan mengenal dunia kerja dan industri karena beberapa korporasi memberikan pelatihan oleh para praktisi kepada para peserta program selain pengenalan berupa kunjungan ke perusahaan atau presentasi korporasi. Pelatihan ini membekali peserta program dengan *soft skills* yang tidak banyak dikelola di perguruan tinggi. Ketiga, peran korporasi bisa menjadi penyeimbang kekuatan negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pendukung masyarakat yang secara umum masih belum berdaya dan terpinggirkan dari akses pendidikan.

Sebaliknya, peran korporasi hendaknya tidak menjadikan lembaga-lembaga pendidikan atau peserta program kehilangan otonomi dan sikap kritisnya. Program-program tanggung jawab sosial seharusnya dilaksanakan bukan demi kepentingan perusahaan semata melainkan demi kemaslahatan publik. Program-program

pengembangan masyarakat seharusnya tidak dilakukan hanya untuk mendapatkan simpati dan membangun citra positif terhadap korporasi melainkan menjadi bagian dari visi dan tujuan bisnis yang lebih manusiawi. Program tanggung jawab sosial merupakan upaya untuk memberikan kembali kepada masyarakat apa yang sudah didapatkan dan menjadi keuntungan bisnis untuk membangun masyarakat tersebut. Pada akhirnya, masyarakat yang sudah makin cerdas dan berdaya (melalui pendidikan) akan menjadi mitra yang lebih seimbang dan menguntungkan korporasi itu sendiri.

Ristek, Universitas, dan Industri

Polemik keberadaan pendidikan tinggi di dalam Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak terlepas dari pemahaman terhadap alasan keberadaan serta tujuan universitas dan realita peran dan kontribusi pendidikan tinggi kepada pembangunan manusia dan bangsa. Struktur baru ini merupakan respon terhadap usulan Forum Rektor Indonesia yang, seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra, merasa terusik dan terbelenggu oleh intervensi aparatus Kemdikbud dalam pengelolaan perguruan tinggi dalam berbagai bentuknya sehingga menjadikan perguruan tinggi hanya sebagai unit pelaksana teknis (UPT).

Daed Joesoef dalam tulisannya "Tujuan Universitas" (*Kompas*, 30 September 2014) mengingatkan bahwa tuntutan menghasilkan riset pada perguruan tinggi adalah salah alamat. Kontribusi perguruan tinggi adalah menghasilkan periset yang akan berkarya bagi industri dan masyarakat luas. Blogger Gurukecil menyayangkan para rektor yang sudah lupa bagaimana rasanya menjadi dosen biasa dan mengelola perguruan tinggi secara keliru sebagai birokrat.

Sementara struktur keberadaan pendidikan tinggi yang dipindahkan dari Kemdikbud ke Kemristek sudah menimbulkan perbincangan, secara "diam-diam" ada fenomena menarik yang mestinya juga menjadi materi perbincangan dan refleksi untuk menentukan dan meneguhkan arah dan tujuan universitas serta keterkaitan universitas dengan masyarakat termasuk bisnis dan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, bermunculan universitas yang didirikan oleh para pelaku bisnis dan industri termasuk konglomerasi dan BUMN.

Kemunculan Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Ciputra, Universitas Podomoro, Sampoerna School of Education, Sekolah Tinggi Semen Indonesia dan STT Telkom hanya merupakan pucuk gunung es. Banyak korporasi sudah menyerah pada situasi ketidak-siapan kerja para lulusan perguruan tinggi dan membentuk lembaga pelatihan secara khusus. Apakah fenomena ini menunjukkan merosotnya kepercayaan pihak bisnis dan industri terhadap proses dan hasil universitas, khususnya terhadap mutu dan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi?

Perbedaan prinsip dan praksis

Ketidak-sabaran dunia bisnis dan industri terhadap kelambanan dunia akademis dalam merespon perubahan telah berakibat pada fenomena ketidak-percayaan terhadap hasil dan proses di dunia akademis. Keterpisahan pendidikan tinggi dengan dunia bisnis dan industri ini bisa terjadi karena memang prinsip yang dianut kedua institusi dalam praksis masing masing memang berbeda. Yang dianggap penting dalam dunia bisnis dan industri adalah **ketepatan** dan **kecepatan**. Dalam kompetisi global, ketepatan dan kecepatan dalam melakukan terobosan merupakan prasyarat bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis dan industri. Sementara itu, perguruan tinggi terikat dalam prinsip **utuh, patuh, dan patuh**.

Prinsip kedua dunia ini justru bisa bertentangan. Ketepatan dan kecepatan yang dibutuhkan oleh dunia bisnis dan industri berkaitan dengan tuntutan efisiensi dan laju sementara pendidikan tinggi diwajibkan oleh sistem untuk melaksanakan proses pendidikan yang utuh. Ketika korporasi menilai bahwa lulusan perguruan tinggi masih belum siap bekerja dan masih harus mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya, mereka bisa saja membuat lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengajarkan kompetensi tertentu yang secara spesifik dibutuhkan oleh perusahaan. Industri radio dan televisi, misalnya, bisa menilai lulusan program studi ilmu komunikasi ternyata masih belum siap bekerja sehingga perusahaan masih harus memberikan pelatihan dan pendidikan. Sementara itu, perguruan tinggi masih belum menunjukkan keberanian untuk membebaskan diri dari belenggu kepatutan dan kepatuhan dengan mengubah kurikulumnya menjadi lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di kalangan perguruan tinggi, tuntutan kepatutan dan kepatuhan sudah menjadi sangat normatif dan, dalam banyak kasus, membelenggu. Selain pelaksanaan tanggung jawab Tri Dharma (mengajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat), seorang dosen masih disibukkan dengan kelengkapan berkas-berkas pembuktian. Pada tingkat individu dosen, berkas-berkas pembuktian ini berkaitan langsung dengan imbalan finansial yang

disebut tunjangan profesi dan kenaikan jabatan akademik. Pada tingkat lembaga, dosen yang bertugas sebagai pejabat struktural terbenam dalam berkas-berkas pembuktian berupa borang-borang akreditasi. Tujuannya mungkin baik, yakni membiasakan perguruan tinggi dalam tertib administratif. Sayangnya, dalam praktiknya, kepatutan dan kepatuhan dalam sistem hanya sebatas pada pembuktian berkas. Notulen rapat, berita acara, presensi, surat tugas, laporan, MOU, sertifikat, artikel jurnal dan masih banyak lagi jenis berkas lainnya sudah membelenggu sebagian besar kaum intelektual pada plafon "Saya sudah melakukannya dengan nilai sekian sks dan ini bukti tertulisnya" dan tidak mendorong para intelektual untuk merefleksikan "Dampak apa yang sudah saya hasilkan dari kegiatan saya? Perubahan apa dalam diri anak didik saya, institusi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masyarakat yang sudah saya hasilkan?"

Dunia akademis telah banyak dikritik sebagai pengukuh kemandegan dan gagal melakukan transformasi diri maupun transformasi lingkungan di sekitarnya. Para akademisi seringkali terjebak dalam kesombongan intelektual dan kesibukan dengan diri mereka sendiri. Sebelum dunia bisnis dan industri meninggalkan dunia akademis lebih jauh lagi, perguruan tinggi perlu membuka diri terhadap dunia luar bukan saja dalam wacana melainkan juga dalam interaksi langsung agar bisa melakukan transformasi diri dan lingkungannya. Kebutuhan dunia akademis untuk membuka diri tidak berarti perguruan tinggi menghambakan dirinya untuk menunjang keberlangsungan dunia bisnis dan industri. Perguruan tinggi dan dunia bisnis-industri mempunyai alasan keberadaan yang sama, yakni melayani kemanusiaan dan melangsungkan peradaban namun melalui peran dan kapasitas yang berbeda.

Perguruan tinggi masih menyimpan kekayaan yang bisa bermanfaat bagi dunia bisnis dan industri. Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi mempunyai rekaman *collective memory*, tradisi keilmuan, dan nilai-nilai keutamaan yang menjadi bagian dari materi pembelajaran. Presiden Soekarno pernah mengatakan JASMERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) jika tidak mau kehilangan arah. Perguruan tinggi juga masih

menjadi tempat formasi orang-orang muda dalam skala besar yang dibutuhkan oleh dunia bisnis dan industri.

Pertemuan para akademisi dan pelaku bisnis-industri perlu diselenggarakan secara berkala untuk saling memperkuat dan menguntungkan satu sama lain. Riset bisa menjadi jembatan antara perguruan tinggi dan dunia bisnis-industri. Namun, penempatan pendidikan tinggi bersama dengan Ristek dalam satu Kementerian semoga tidak menjadikan universitas sebagai Unit Pelaksana Teknis bagi birokrasi yang lain maupun Unit Pendukung Industri. Masyarakat akademis dan masyarakat bisnis perlu beriringan dalam perjalanan transformasi untuk membangun manusia dan bangsa Indonesia yang lebih baik di masa depan. Seperti kata pepatah Afrika, “jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama teman.”

Bab 5

Pendidikan dan Globalisasi

Perluakah Melanjutkan Studi di Luar Negeri?²⁹

Berbagai institusi pendidikan dari luar negeri dengan gencar mempromosikan diri dan mencari pasar di Indonesia. Indonesia sebagai pasar yang menggiurkan merupakan daya tarik tersendiri bagi institusi pendidikan dari berbagai negara. Sebagai contoh, saat ini ada lebih dari 18.000 mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Australia dan pendidikan tinggi merupakan salah satu komoditas dan sumber devisa. Oleh karena itu, tidak heran jika berbagai upaya pemasaran pendidikan dilakukan secara profesional dan kompetitif. Ada pejabat struktural sampai pada tingkat fakultas (biasanya pembantu dekan) yang memang diberi tugas dan tanggung jawab khusus untuk mencari dan merekrut mahasiswa baru di luar negeri. Nampaknya, perguruan tinggi di luar negeri tidak mau ketinggalan dalam kompetisi global.

Gencarnya promosi studi luar negeri dan banyaknya penawaran kadangkala bisa membuat bingung para calon mahasiswa dan orang tua. Orang tua membayar uang kuliah dan biaya hidup yang tidak sedikit bagi studi putra-putrinya dengan harapan bisa membeli pengetahuan dan keterampilan demi masa depan. Mahasiswa dan orang tua perlu mencermati apakah pilihan dan investasi mereka di suatu sekolah dan negara tertentu adalah suatu keputusan yang bijak dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

Pilihan negara

Bagi banyak orang, pilihan negara sangat terkait dengan faktor personal seperti keberadaan sanak saudara, iklim, dan rasa nyaman. Selain itu, pilihan negara juga ditentukan oleh alasan rasional seperti bahasa pengantar, program studi, biaya, jenjang studi dan jarak.

Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Singapura, Australia, dan Selandia Baru dipilih karena bahasa pengantar (bahasa Inggris) sudah diajarkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Persyaratan nilai minimal TOEFL atau IELTS dengan mudah bisa dipenuhi oleh banyak peserta didik. Jika kurang memadai, calon mahasiswa bisa mengikuti kursus persiapan bahasa di negara tujuan maupun di Indonesia.

²⁹ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 20 Maret 2003

Sementara itu, Singapura, Malaysia, dan Australia dipilih karena tidak terlalu jauh. Selain biaya perjalanan yang lebih rendah, orang tua juga merasa lebih nyaman melepaskan anak ke negara tetangga terutama jika anak dikirim melanjutkan studi sejak jenjang sekolah menengah. Fasilitas sekolah berasrama dengan peraturan dan disiplin yang cukup ketat membuat orang tua merasa aman terhadap keselamatan dan pola hidup anak di luar negeri. Selain itu, orang tua memilih Singapura dan Malaysia karena kemiripan budaya dan sebagian dari mereka masih merasa was-was akan terjadi perubahan pola pikir dan gaya hidup anak jika dikirim ke negara Barat. Pemerintah kedua negara ini secara konsisten terus meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan setiap tahun, pemerintah Singapura menyediakan beasiswa bagi peserta didik pilihan di beberapa SMP unggulan. Anak-anak kelas 2 dan 3 SMP yang lulus dalam tes seleksi akan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke kelas 3 *secondary school* pilihan di Singapura. Ketika menyelesaikan kelas 4 *secondary school*, anak-anak ini biasanya juga bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi top di Singapura seperti National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Seringkali, beasiswa pendidikan tinggi juga diberikan oleh perusahaan yang kemudian akan siap menampung tenaga kerja unggulan ketika mereka lulus dari perguruan tinggi. Program pemerintah Singapura ini sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena menjaring bibit-bibit unggul yang tidak mendapatkan kesempatan dan fasilitas berarti di negeri sendiri.

Amerika Serikat, Kanada dan beberapa negara Eropa Barat dipilih karena standar mutu perguruan tinggi mereka dianggap masih tinggi walaupun mutu antar perguruan tinggi tentunya juga sangat bervariasi. Perguruan tinggi kelas dunia di negara-negara ini dengan temuan iptek mereka telah ikut membentuk pencitraan mengenai standar mutu di kalangan masyarakat. Biaya studi (berkisar antara US\$ 10.000 dan US\$ 40.000 per tahun) dan biaya hidup (US\$ 1.000 sampai US\$ 2.000 per bulan) bukan merupakan hambatan bagi sebagian keluarga yang menaruh kepercayaan terhadap standar mutu yang terus dijaga dan ditingkatkan di negara-negara ini.

Di samping itu, sejak 1998, China menjadi salah satu negara tujuan yang paling populer. Tragedi Mei 1998 telah menyulut kepanikan sebagian masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang kemudian mengirim anak-anak mereka untuk melanjutkan studi di China. Anak-anak muda yang dikirim sekitar tahun 1998 itupun telah kembali ke tanah air dan menunjukkan kemahiran berbahasa China. Sejak itu, gelombang pengiriman peserta didik ke China terus meningkat. Sebagai salah satu bahasa internasional, bahasa China mempunyai jumlah penutur paling banyak di dunia dan dua kali lipat dibandingkan bahasa Inggris (Sumber: Ethnologue, 13th Edition). Bahasa China juga digunakan dalam perdagangan antar bangsa di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, biaya studi yang relatif lebih terjangkau (berkisar antara US\$ 2000 sampai US\$ 5000 per tahun) dan biaya hidup yang bahkan lebih rendah daripada di kota besar di Indonesia merupakan daya tarik bagi keluarga kelas menengah yang tidak mampu mengirim anak mereka ke negara Barat.

Dalam era perdagangan bebas, beberapa perguruan tinggi terutama dari Australia bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan membuka kelas persiapan (*Foundation*) di Jakarta dan Surabaya. Umumnya, mereka bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal. Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan kelas 2 SMA bisa diterima di kelas persiapan ini selama 1-2 tahun sebelum melanjutkan studi di Australia. Biaya yang lebih rendah dibandingkan langsung kuliah di Australia dan tidak perlu menunggu lulus SMA merupakan daya tarik bagi sebagian peserta didik.

Program studi

Pilihan program studi sangat berkaitan dengan pilihan institusi dan negara tujuan. Program studi yang dipilih harusnya yang memang sesuai dengan (sesuai urutan prioritas) minat, bakat, dan kebutuhan masyarakat. Yang paling penting tentunya adalah minat. Ada pepatah yang mengatakan, "*Choose a job that you love and you'll never work for the rest of your life.*" Banyak mahasiswa (seringkali juga karena arahan orang tua) sudah terjebak memilih program studi yang populer sekedar karena ikut arus tetapi kemudian menyesali pilihan dan tidak bisa menikmati studi mereka.

Bakat biasanya (walaupun tidak selalu) juga berkaitan dengan minat. Sebelum lulus SMA/SMK, sebaiknya pembelajar sudah mengetahui minat dan bakatnya apa. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengetahui minat bakat adalah dengan tes minat bakat. Namun tes ini bukan satu-satunya cara. Tes ini hanya sekedar alat. Banyak orang tidak membutuhkan tes ini karena proses pengenalan diri sudah berlangsung dengan baik sehingga bisa menentukan sendiri apa minat dan bakatnya. Dalam artian sempit seperti bidang studi dan profesi, kebutuhan masyarakat berubah-ubah setiap saat. Profesi yang sangat populer dua dekade yang lalu (insinyur sipil, misalnya) saat ini sudah tergeser oleh bidang lain (seperti misalnya desain grafis, informatika, manajemen informasi). Muncul pula profesi baru untuk mengimbangi perkembangan dan kebutuhan baru dalam kehidupan. Jurusan-jurusan baru mulai dari *actuarial science* (evaluasi dan manajemen risiko, terutama untuk perusahaan-perusahaan asuransi), *gerontology* (ilmu mengenai proses penuaan dan orang lanjut usia), *occupational therapy* (profesi layanan yang membantu orang-orang cacat untuk berfungsi dalam masyarakat) sampai dengan berbagai macam studi yang berkaitan dengan teknologi informasi cukup banyak menarik mahasiswa peminat. Sebaliknya, ada banyak profesi yang punah karena perubahan jaman dan kemajuan teknologi. Jika kebutuhan masyarakat terhadap bidang studi dan profesi tertentu terus berubah, yang tidak akan berubah adalah kebutuhan masyarakat terhadap orang-orang muda yang punya integritas, kreativitas, dan keinginan untuk menjadikan diri mereka berguna dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Dengan kata lain, prediksi mengenai kebutuhan masyarakat di masa kini dan di masa mendatang boleh saja digunakan sebagai salah satu pedoman dalam memilih program studi tetapi calon mahasiswa sebaiknya tidak terpatok mati pada pilihan program studi. Yang dibutuhkan adalah kemampuan dasar menganalisis, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan kreativitas. Ada banyak tokoh dunia yang berkiprah di luar bidang yang mereka pelajari secara formal. Beberapa contoh termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang belajar kimia, penyanyi country Willie Nelson yang belajar pertanian, dan Yasser Arafat yang

belajar teknik sipil. Selain itu, perguruan tinggi di luar negeri cenderung lebih fleksibel dalam hal pilihan program studi. Jika di Indonesia, sebelum lulus SMA/SMK, calon mahasiswa sudah harus menentukan pilihan jurusan, di beberapa negara, mahasiswa masih mungkin memilih status *undecided* alias belum menentukan pilihan jurusannya.

Mutu institusi

Dalam melakukan seleksi perguruan tinggi di luar negeri, calon mahasiswa dan orang tua bisa menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah akreditasi. Namun berbeda dengan di Indonesia yang proses akreditasi untuk semua program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (badan pemerintah), akreditasi di beberapa negara dilaksanakan oleh badan independen yang kadangkala terkait dengan organisasi profesi. Jadi akreditasi untuk satu jurusan bisa berbeda dengan jurusan yang lain. Bahkan kadangkala, ada beberapa badan akreditasi yang menilai satu program studi. Tentunya, selain status akreditasi itu sendiri, orang tua dan mahasiswa perlu mengetahui kredibilitas badan akreditasi yang menilai. Indikator yang kedua adalah daftar ranking yang banyak dilakukan oleh berbagai badan atau media. Misalnya, majalah US News secara rutin membuat ranking universitas di Amerika Serikat dan McLean untuk ranking universitas di Kanada. Indikator lainnya adalah keterpakaian para lulusan institusi tersebut. Banyak perguruan tinggi membanggakan prestasi mereka dalam memasok lulusan mereka pada perusahaan-perusahaan ternama. Di perguruan tinggi besar, setiap tahun ada acara rekrutmen oleh berbagai perusahaan yang ditangani oleh Kantor Bimbingan Karir.

Fasilitas belajar

Sekali lagi, calon mahasiswa dan orang tua perlu mencermati apakah investasi yang sudah mereka tanam pada suatu perguruan tinggi sudah menunjukkan indikasi dikembalikan lagi kepada mahasiswa dalam bentuk sarana dan prasarana yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

Beberapa perguruan tinggi bahkan tidak mempunyai kampus dan berani menjual gelar dan ijazah dengan harga mahal. Perguruan tinggi yang sudah mapan sekalipun perlu dicermati apakah sudah menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan mahasiswa. Pada perguruan tinggi yang sudah mapan, pihak yayasan dan pimpinan perguruan tinggi biasanya mendapatkan sumber dana yang lain selain dari sumbangan mahasiswa. Mahalnya sarana dan prasarana yang bermutu membuat pihak perguruan tinggi juga menempatkan beberapa pejabat struktural baik di tingkat universitas maupun fakultas dengan tugas khusus mencari dana (*endowment, grant* dsb).

Kultur institusi

Di Amerika Serikat, misalnya, setiap universitas besar mempunyai program *campus tour* gratis kepada masyarakat dan terbuka setiap saat. Secara berkala, mereka mengadakan berbagai lomba untuk peserta didik tingkat SMA/SMK dan acara Open House. Dari perspektif perguruan tinggi tersebut, kegiatan-kegiatan promosi ini merupakan bagian dari promosi mereka dalam upaya memperkenalkan diri dan menarik minat calon mahasiswa. Dari perspektif calon mahasiswa, program ini bisa digunakan sebagai kesempatan untuk mengenal lebih dekat suatu perguruan tinggi. Dalam acara kunjungan ke perguruan tinggi, calon mahasiswa bisa mengenal kultur institusi seperti yang terlihat pada interaksi antara profesor dan mahasiswa, antar profesor, dan antar mahasiswa serta antara civitas akademika dengan komunitas sekitar kampus. Jika kunjungan kampus ini tidak mungkin dilakukan, calon mahasiswa dan orang tua bisa melakukan *virtual campus tour* dengan mengunjungi situs-situs perguruan tinggi. Tentunya jenis tur ini perlu dicermati dengan kritis karena selalu ada kemungkinan tampilan di situs lebih indah dari situasi aslinya. Orang tua dan calon mahasiswa juga bisa menanyakan pada alumni institusi tersebut. Selain itu, konselor studi yang memang bisa dipercaya dan sudah terlatih serta mempunyai data-data bisa pula memberikan layanan profesional dalam pembimbingan dan persiapan studi ke luar negeri. Dalam memilih konselor studi yang baik, orang tua perlu mencermati reputasi, kredibilitas dan kualifikasi konselor studi untuk menghindari pengarahan pada pilihan-pilihan yang merugikan di kemudian hari.

Jika calon mahasiswa mempunyai dukungan finansial yang memadai dari keluarga, pilihan melanjutkan studi di luar negeri merupakan alternatif yang berharga. Ada banyak pilihan program studi, institusi, dan negara yang bisa dipertimbangkan. Keuntungan

yang diperoleh adalah selain keunggulan mutu pendidikan, pembelajar juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan wawasan internasional melalui pengalaman hidup dan interaksi dengan orang-orang dari berbagai negara lain. Tantangan yang harus dihadapi adalah kesiapan mental dan finansial yang harus lebih baik dibandingkan dengan studi di dalam negeri.

Studi di Luar Negeri: Strategi Penyesuaian dalam Sistem Budaya dan Belajar yang Baru³⁰

Ketika peserta didik atau mahasiswa memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri, mereka harus siap untuk melakukan proses penyesuaian diri dalam sistem budaya dan belajar yang baru. Proses penyesuaian diri ini meliputi keterkejutan budaya dan keterkejutan belajar. Keterkejutan budaya adalah proses alamiah yang dialami seseorang yang datang dan menetap di suatu tempat dengan norma-norma budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berbeda. Sedangkan keterkejutan belajar adalah proses penyesuaian dalam menghadapi lingkungan akademis yang baru. Keterkejutan belajar ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan dalam sikap terhadap pengetahuan dan pendekatan-pendekatan terhadap proses pembelajaran dan ujian yang berbeda di negara tujuan dibandingkan dengan di negara asal.

Keterkejutan budaya

Keterkejutan budaya adalah proses transisi yang biasanya dialami oleh peserta didik atau mahasiswa baru di suatu tempat yang berbeda dengan negara asal. Keterkejutan budaya ini umumnya meliputi beberapa tahap. Pada tahap pertama atau yang biasanya dikenal dengan tahap turistik, pendatang baru merasa sangat gembira dan optimistik. Semuanya di negara yang baru nampak sangat indah. Pendatang baru jadi melihat dan menikmati banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia dapatkan di negara asalnya. Misalnya, kalau di negara asal, dia diharapkan atau diwajibkan untuk berpakaian sopan dan rapi di sekolah dan merasakan hal ini sebagai pembatasan atas kebebasannya, di negara yang baru dia bisa mengalami euforia dan begitu menikmati kesempatan untuk berbusana (atau tidak berbusana) dengan sebebas-bebasnya. Sebuah contoh lain, mahasiswa dari Indonesia di kawasan Los Angeles yang sebelumnya hanya melihat kawasan Beverly Hills dari media layar kaca menjadi terkagum-kagum dan gandrung sekali karena dapat mengunjungi daerah itu secara riil.

³⁰ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 15 Oktober 2009

Kemudian akan datang masa kedua yang biasanya ditandai dengan kesepian dan rindu kampung halaman. Seorang mahasiswa yang biasanya tidak menyukai rujak atau bau petis tiba-tiba saja menjadi rela untuk menempuh perjalanan dua-tiga jam untuk berburu petis di toko-toko bahan makanan Asia di kota lain. Tahap ini bisa disusul dengan masa antipati dan kepahitan terhadap berbagai kebiasaan, norma-norma kehidupan, dan nilai-nilai budaya yang ditemui di negara asing. Seperti pada tahap pertama, mahasiswa akan membanding-bandingkan kedua negara. Tapi bedanya, jika pada tahapan pertama, negara baru selalu nampak lebih hebat dan baik, sekarang sikap kritis terhadap negara baru yang lebih diwarnai oleh rasa tidak suka atau kepahitan menjadikan negara asal nampak lebih baik. Perbedaan dalam hubungan kekeluargaan di negara baru (misalnya saja, orang-orang tua yang dititipkan di panti jompo di beberapa negara maju di Barat) dipandang sebagai kurang-pedulian dan tidak adanya sikap kekeluargaan oleh masyarakat Indonesia. Padahal perbedaan ini terjadi semata-mata karena memang tatanan sosial dan budaya memang berbeda dan tidak berarti anak-anak Indonesia lebih mencintai orang tua mereka dibandingkan anak-anak di negara maju tersebut.

Keberhasilan seseorang dalam mengatasi tahapan yang ketiga tadi akan sangat menentukan apakah proses adaptasinya akan memperkaya pengalamannya atau tidak. Pada tahap berikutnya, ada tiga pilihan. Pertama, seseorang bisa menarik dan mengurung diri dari berbagai lingkungan sosial di negara baru tersebut. Pada titik ini, dia merasakan depresi mental yang akan sangat berpengaruh buruk pada studinya. Motivasi belajar jadi menurun dan perasaan gagal akan menghantui. Pilihan yang kedua adalah menerima mentah-mentah berbagai nilai dan norma budaya yang baru. Karena takut dianggap kurang gaul dan jati diri kurang mantap, seseorang bisa mengubah secara drastis gaya hidup dan tata nilainya. Bahkan rekan-rekan bisa kaget dengan perubahan sikap ini, "Wah si X sekarang *kok* lebih Amerika daripada orang Amerika nya sendiri." Sikap ini bisa keterusan sampai ketika dia pulang kembali ke tanah air dan menimbulkan berbagai permasalahan dengan keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan kerja di negara

asal. Kemudian, pilihan ketiga; pilihan yang diambil oleh orang-orang yang mempunyai jati diri dan kedewasaan yang mantap. Perbedaan-perbedaan yang nampak di negara baru tidak dianggap sebagai intimidasi atau lebih jelek dibandingkan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang diperoleh dari negara asal melainkan sebagai perbedaan yang akan memperkaya pengalaman kehidupan seseorang. Ada beberapa kebiasaan dan nilai yang bisa diambil untuk memperkaya budaya sendiri seperti misalnya kebiasaan tepat waktu dan menunggu giliran. Tapi ada juga kebiasaan yang kurang tepat jika diterapkan di negara asal, misalnya memanggil orang yang lebih tua dengan namanya saja tanpa sebutan kehormatan (Bapak, Ibu, Kakak, dan sebagainya).

Keterkejutan belajar

Pendekatan terhadap proses belajar dan ilmu berbeda dari satu negara ke negara lain. Misalnya, mahasiswa-mahasiswa Australia dan Amerika menekankan debat dan argumen dan mengedepankan individualisme sebagai upaya pencarian originalitas serta etos egaliter dalam hubungan dosen dan mahasiswa bisa sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Asia. Di Asia, harmoni dalam kelompok dan komunitas, hormat pada orang tua dan penguasa mendapat nilai tinggi dibandingkan dengan pengembangan pribadi dan individual. Jadi, di ruang-ruang kelas di Australia dan Amerika Serikat, mahasiswa-mahasiswa Asia—terutama yang baru datang—sering merasa enggan dan ragu-ragu untuk menyampaikan opini mereka apalagi jika itu bertentangan dengan opini dosen dan mayoritas kelas.

Mahasiswa Asia cenderung mendalami, menghafalkan, dan langsung mengadopsi pandangan orang-orang yang dipandang mempunyai kekuasaan dan reputasi sedangkan mahasiswa Barat diharapkan untuk mengevaluasi terlebih dahulu dalam relasinya dengan permasalahan mereka sendiri. Di Barat, mengulang dan menulis kembali kata-kata para pakar dianggap sebagai plagiarisme jika sumbernya tidak dikutip. Tindakan ini adalah pelanggaran akademis yang sangat serius dan disamakan dengan menyontek. Di beberapa sekolah, jika terbukti, sanksi akademis bisa berupa dikeluarkannya mahasiswa tersebut dari sekolah.

Pendidikan Asia yang kontemporer memang sudah banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Barat tapi nuansa dari tradisi terdahulu masih melekat dan mempengaruhi sikap dosen dan mahasiswa. Di China dan beberapa negara Asia lain, peserta didik memang disuruh untuk menyalin dan menghafal dengan tepat kata-kata mutiara dan peribahasa dari orang-orang terkenal. Ketepatan (akurasi) dalam pengulangan ini mendapat nilai lebih tinggi daripada originalitas dalam menciptakan kata-kata mutiarnya sendiri.

Dalam pengungkapan gagasanpun, ada perbedaan antara budaya Eropa dan Asia. Dalam budaya Eropa, suatu gagasan diungkapkan secara linear yang dimulai dari ide pokok, diperkuat dengan penjelasan atau contoh-contoh, evaluasi bukti-bukti dan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam budaya Asia, pola sirkuler digunakan dalam suatu kalimat yang meliputi suatu gagasan yang disusun sedemikian sehingga posisi diupayakan untuk menghindari penilaian atau kesimpulan yang terlalu jelas.

Motivasi belajar juga berbeda antara mahasiswa Indonesia dan Barat. Mahasiswa Indonesia belajar giat demi menyenangkan orang tua dan memenuhi harapan keluarga. Dalam konteks mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri, kewajiban untuk memenuhi harapan keluarga dan mengembalikan “utang” kepada keluarga ini menjadi lebih besar karena biaya studi di luar negeri yang relatif lebih tinggi daripada studi di dalam negeri. Studi di luar negeri dianggap sebagai bagian dari investasi keluarga dan anak diharapkan untuk mengembalikannya berupa keberhasilan studi dan membantu ekonomi atau bisnis keluarga di kemudian hari. Sebaliknya, mahasiswa Barat lebih didorong oleh minat dan pengembangan pribadi mereka sendiri.

Tentunya tidak semua negara Barat bisa disamakan. Menurut Dr. Bryan Burke dari UNSW, ada perbedaan antara mahasiswa Australia dan Amerika. Mahasiswa Amerika cenderung lebih bebas berbicara mengenai betapa kerasnya mereka sudah bekerja dan berupaya serta hasil yang mereka capai sedangkan mahasiswa Australia jarang berbicara mengenai kerja keras mereka dan kadang-kadang juga meremehkan nilai baik dalam pelajaran. Mahasiswa Australia mungkin memiliki motivasi yang sama tinggi

dalam belajar dan pencapaian tapi mereka lebih cenderung untuk tidak membicarakannya.

Keberhasilan dalam menjalani proses transisi di sistem budaya dan belajar yang baru akan sangat menentukan keberhasilan studi peserta didik/mahasiswa di luar negeri. Maka dari itu, masa persiapan untuk studi ke luar negeri hendaknya tidak hanya digunakan untuk persiapan administratif seperti pendaftaran dan pengurusan visa melainkan juga untuk persiapan mental, psikologis, pedagogis, dan kultural.

Media, Sentra Keempat Pendidikan³¹

Pendidikan anak bangsa tidak terjadi di ruang hampa melainkan dalam realita perubahan sosial yang sangat dahsyat. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu subsistem dari keseluruhan sistem pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari sentra keluarga, masyarakat, dan sekolah. Masyarakat modern (atau pascamodern) ditandai dengan renggangnya hubungan antar manusia karena keterasingan masing-masing individu. Ayah dan ibu sama-sama sibuk bekerja dan masyarakat luas pun sibuk dengan masalahnya sendiri, maka tanggung jawab pendidikan generasi muda telah ditumpukan dengan berat sebelah kepada lembaga-lembaga pendidikan formal terutama sekolah.

Dalam era informasi, ada sentra keempat yang belum nampak pada era Ki Hajar Dewantara namun kini menjadi sangat krusial dalam proses pendidikan anak yaitu media. Dalam artikel ini, yang dimaksud dengan media adalah segala tampilan informasi dalam bentuk cetak maupun elektronik mulai dari koran, komik, film, televisi, sampai dengan internet. Sentra yang keempat ini sudah semakin menggeser peran keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan anak. Faktanya, secara rata-rata anak dalam masyarakat modern meluangkan jauh lebih banyak waktunya di media sosial atau *online game* dibandingkan dengan orang tuanya. Dalam masyarakat pra era televisi, anak-anak mendapatkan manfaat proses pendidikan dari para tetangga. Ketika seorang anak ketahuan melakukan tindakan nakal, tetangga ikut menegur dan menasehati. Proses pendidikan dalam sentra masyarakat ini dimungkinkan karena masih ada interaksi yang guyub di lingkungan tetangga. Namun kini, terutama di perkotaan, anak-anak lebih banyak mengurung diri di rumah dan berinteraksi dengan karakter-karakter dari dunia maya.

Seperti halnya uang, media bisa menjadi hamba yang baik tapi tuan yang membelenggu. Ada banyak manfaat media yang sangat membantu proses pendidikan anak dan melengkapi kekurangan proses belajar mengajar di sekolah. Bahkan banyak sekolah telah

³¹ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 18 Februari 2005

mendayagunakan media canggih seperti teknologi internet sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Di sisi lain, timbul keprihatinan luar biasa terhadap pengaruh destruktif media terhadap perkembangan nilai-nilai anak. Sebagian kalangan pendidik, orang tua, dan rohaniwan mengeluhkan makin maraknya tayangan berbau kekerasan, pornografi, dan mistis di televisi. . Memang keprihatinan ini bisa dipahami karena rekaman berbagai kerusakan dalam masyarakat baik berupa fakta, opini atas fakta, simbolisasi, anekdot maupun distorsinya dalam media merupakan bahan pembelajaran tidak resmi bagi anak atau dikenal sebagai *the hidden curriculum*.

Sehari-hari anak disuguhi tayangan berisi kekerasan, pornografi, dan mistis sedemikian gencarnya sehingga timbul keprihatinan terhadap dampak destruktif perkembangan nilai dan perilaku anak. Kemudian, muncullah desakan agar Lembaga Sensor bekerja lebih ketat agar negara ikut berperan dan melakukan intervensi. Harapan agar negara melaksanakan fungsi kontrol terhadap berbagai bentuk media komunikasi tidak bisa dilepaskan dari konteks pusran kekuatan globalisasi. Richard Falk (1995) mengingatkan kita bahwa dalam era globalisasi ini ada tiga kekuatan besar di dunia ini, yaitu *state*, *market* dan *civil society*. Apabila *market* dan *state* bersatu menghadapi *civil society*, yang terjadi adalah suatu *inhumane governance*. Apabila *civil society* dan *market* bersatu menghadapi *state*, yang akan terjadi adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap rakyat atau *humane governance*. Apabila *civil society* dan *state* bersatu menghadapi *market*, yang akan terjadi adalah penjinakan *market* yaitu kebijakan-kebijakan yang mengurangi kesewenang-wenangan *market*.

Dengan demikian, peran dan tanggung jawab kontrol seharusnya diserahkan kepada negara dengan persyaratan lembaga negara bisa melaksanakannya dengan adil dan bijak untuk mengurangi kesewenang-wenangan industri hiburan dan media. Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab ini, negara harus bersih dari korupsi dan berpegang teguh bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi dan terutama

jika masyarakat masih lemah, yang akan muncul justru perselingkuhan antara negara dan industri berupa pembukaan ladang dan saluran baru untuk korupsi dan kolusi (ingat kasus perjudian, pelacuran dan sejenisnya), standar ganda, dan interpretasi tunggal atas apa yang boleh diserap dan tidak boleh diserap masyarakat oleh golongan yang sedang berkuasa dan kebetulan menjadi bagian dari pemerintah. Semua dampak ini akan mengarah lebih lanjut pada pelemahan masyarakat.

Harapan berlebihan agar negara melakukan intervensi sebenarnya mencerminkan rasa ketidakberdayaan masyarakat. Ketika kita sudah melihat tumbuhnya benih penguatan kedaulatan rakyat di sektor politik berupa pemilihan langsung oleh rakyat dan tawar menawar rakyat dengan pemerintah, di sektor pendidikan dan budaya seharusnya penguatan masyarakat ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan dengan serius.

Bagi warga masyarakat yang merasa peduli dan prihatin terhadap dampak *the hidden curriculum* yang berasal dari sentra keempat bagi pendidikan anak, ada dua tantangan yang harus dihadapi dan diatasi. Yang pertama, ketika media menampilkan dua sisi (kebaikan dan kejahatannya), energi dan sumber daya masyarakat seharusnya tidak difokuskan hanya untuk menumpas yang jahat saja melainkan juga untuk berlomba-lomba menambah kebaikan. Masyarakat membutuhkan alternatif sajian dan tayangan media yang bermutu dan mendidik. Dalam konteks keluarga, tidak bijak untuk melarang seorang anak menonton televisi atau berselancar di dunia maya tanpa memberikan kesempatan dan menyediakan ruang dan waktu untuk kegiatan alternatif.

Yang kedua, warga masyarakat bisa secara kreatif mencari dan menemukan mekanisme dan sumber daya dari dalam dirinya sendiri untuk menangkal dampak destruktif yang dikuatirkan sedang terjadi pada pembentukan nilai dan perilaku anak bangsa. Sebuah contoh kasus yang pernah terjadi di daerah Seattle, Amerika Serikat mungkin bisa menjadi inspirasi bagi upaya penguatan masyarakat warga. Sekelompok kecil guru dan orang tua di satu sekolah merasa prihatin dengan film-film yang ditayangkan untuk konsumsi anak-

anak karena film-film itu mengandung banyak sekali unsur kekerasan yang tidak pantas ditonton anak-anak. Kelompok kecil ini menyuarakan keprihatinan mereka dan berinisiatif memulai aksi petisi yang ditujukan pada perusahaan pemasang iklan yang telah mensponsori tayangan di televisi. Mereka menyerukan dan mengancam akan memboikot barang dan jasa yang diiklankan pada film-film yang menurut mereka tidak pantas bagi anak-anak mereka. Kelompok kecil ini berhasil memperluas jaringan karena ternyata banyak orang tua dan pendidik sudah lama mengkhawatirkan pengaruh destruktif media. Singkat kata, petisi masyarakat yang peduli ini berhasil merubah kualitas tayangan tersebut dan menjadi layak konsumsi bagi anak-anak mereka. Yang menarik, gerakan ini benar-benar tumbuh dari tingkat akar rumput dan berhasil melakukan suatu perubahan sosial. Bahkan, anak-anak dilibatkan sebagai subjek mulai dari tahap penilaian tayangan. Guru-guru memfasilitasi dan mendampingi anak untuk ikut merumuskan tindakan apa saja di film yang termasuk kategori kekerasan dan menilai suatu film berdasarkan rumusan yang anak-anak ikut buat. Gerakan yang dilandasi oleh suatu kesadaran bersama dalam masyarakat ternyata sangat ampuh untuk melakukan perubahan sosial.

Keprihatinan terhadap dampak destruktif media terhadap anak harus bisa dipahami dan dijadikan pendorong untuk berbagai upaya perbaikan sosial agar proses pendidikan anak bangsa tidak dicemari. Akan tetapi, menyerahkan tanggung jawab kontrol media kepada pemerintah melalui jalur legal dan perundangan bukan merupakan solusi yang tepat karena jika sampai terjadi perselingkuhan antara aparat pemerintah dengan pelaku industri media dan hiburan, masyarakat masih belum mempunyai mekanisme untuk mengatasinya. Sudah saatnya, masyarakat menggali kekuatan dari dalam dirinya sendiri dan mencari berbagai potensi kreatif untuk memulai suatu perubahan menuju pada kehidupan yang lebih bersih dan sehat.

Pengajaran Bahasa Asing: Antara Sekolah dan Kursus³²

Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa asing yang sedang dominan dalam pergaulan internasional, merupakan salah satu akses untuk meraih keberhasilan dalam berbagai bidang. Peta dominasi bahasa asing selalu berubah baik di tingkat dunia maupun di suatu negara seiring dengan perubahan sosial dan politik. Pada abad pertengahan, bahasa Latin memegang peran penting. Ketika abad pertengahan diganti dengan abad Renaissance dan pencerahan, bahasa Perancis menggeser posisi bahasa Latin. Selanjutnya, revolusi industri dan persekutuan Amerika Serikat-Inggris-Australia yang makin menguat telah mengukuhkan dominasi bahasa Inggris pada abad 20. Apakah dominasi bahasa Inggris akan langgeng di abad 21 ini ataukah akan diganti oleh bahasa lain (Mandarin, misalnya) sangat bergantung pada perkembangan ekonomi, sosial, dan politik selanjutnya. Dalam konteks ini, pengajaran bahasa asing di Indonesia juga mengalami berbagai perubahan. Dalam pengajaran bahasa, biasanya ada empat bidang keterampilan yang dijadikan acuan kurikulum: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Sementara itu, tata bahasa merupakan keterampilan yang diajarkan untuk meningkatkan penguasaan dalam empat bidang tersebut namun ironisnya, penekanan yang berlebihan pada tata bahasa ditengarai justru menghambat keterampilan berkomunikasi. Perbedaan penekanan kurikulum bahasa asing di sekolah dan kursus kemudian menjadi menarik untuk dicermati.

Di Indonesia, sejak kemerdekaan, penggunaan bahasa Belanda makin menurun seiring dengan penerimaan bahasa nasional yang baru. Walaupun bahasa Indonesia berhasil mengukuhkan posisinya sebagai bahasa nasional dan *lingua franca*, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing makin mapan dengan keputusan pemerintah memilih bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang pertama dan dukungan lembaga-lembaga asing seperti the Ford Foundation, RELO (Regional English Language Office) dan the British Council serta kebijakan di sektor pendidikan formal—bahasa Inggris diajarkan secara resmi sebagai bahasa asing di sekolah.

³² Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 8 Juli 2004

Kurikulum bahasa asing di sekolah formal

Belajar bahasa Inggris di sekolah dasar dan menengah memenuhi dua tujuan. Pertama, peserta didik perlu mempersiapkan diri agar bisa membaca buku teks dalam bahasa Inggris di tingkat perguruan tinggi. Kedua, kemampuan berbahasa Inggris juga masih digunakan sebagai faktor penentu untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang menarik. Banyak iklan lowongan mencantumkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai salah satu persyaratan utama. Walaupun anak sudah belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun di sekolah, umumnya kompetensi dalam bahasa ini di kalangan para lulusan sekolah menengah secara umum masih tergolong sangat rendah.

Untuk menjawab kebutuhan terhadap penguasaan bahasa Inggris, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan (Dardjowidjojo, 2000). Dimulai dengan pendekatan tata bahasa dan terjemahan (1945), oral (1968), audio-lingual (1975), komunikatif (1984) dan kebermaknaan (1994). Perubahan drastis dalam tahap perumusan kurikulum standar terjadi di tahun 1984 ketika pengajaran bahasa asing bergeser dari model behaviorisme menuju konstruktivisme. Bahasa dipandang sebagai suatu fenomena sosial dan pengajaran bahasa seharusnya lebih menekankan pada penggunaannya bukan pada struktur bahasa. Mengacu pada paradigma baru ini, Kurikulum 1984 dan 1994 bercita-cita membangun kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif.

Namun ternyata, cita-cita dalam kurikulum 1984 dan 1994 sama sekali tidak terlaksana secara nyata. Buku paket masih berorientasi pada struktur bahasa (Purwo, 1990) dan sebagian besar guru bahasa Inggris di Indonesia belum kompeten dan lancar berbahasa Inggris. Bagaimana kemudian mereka bisa diharapkan untuk mengajak peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Inggris? Jika sehari-hari peserta didik tidak pernah mendengarkan guru bercakap-cakap dalam bahasa Inggris dengan benar dan lancar, tidak heran mereka menjadi gagap ketika mendengarkan rekaman berbahasa Inggris dalam UN (apalagi jika diucapkan oleh penutur asli).

Respon lembaga informal

Bahasa Inggris tidak pernah digunakan secara luas sebagai lingua franca oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Namun, terus terjadi

peningkatan kebutuhan dan jumlah pemakai bahasa Inggris—mulai dari tingkat yang paling minim sampai dengan tingkat kemampuan mendekati penutur asli—terutama di kalangan anak muda kelas menengah perkotaan. Terinspirasi oleh selebritis idola mereka yang populer lewat stasiun-stasiun televisi kabel dan stasiun lokal yang lebih suka merekrut pembawa acara dari kalangan lulusan universitas di luar negeri, para orang muda suka menampilkan diri dalam lingkungan kerja maupun pergaulan sosial dengan berbicara setidaknya penggalan frasa berbahasa asing untuk menonjolkan gaya hidup perkotaan.

Merespon kekurangan dalam pembelajaran bahasa asing di sekolah dan kebutuhan di masyarakat, kursus bahasa asing berkembang sangat marak mulai dari kursus yang dikelola oleh perwakilan resmi negara asing seperti The British Council, Goethe Institut, CCCL, NEC sampai dengan kursus privat milik perseorangan. Sementara sekolah-sekolah secara *de facto* masih berkuat pada pengajaran tata bahasa dan hafalan aturan berbahasa, kursus-kursus justru menekankan keterampilan berbicara. Beberapa kursus tidak segan-segan mempromosikan program “lancar berbicara dalam 3 bulan” untuk menarik konsumen. Bahkan untuk mempercepat keterampilan berbicara, beberapa kursus menyediakan guru penutur asli. Biasanya program oleh penutur asli ditawarkan dengan harga yang lebih mahal dibandingkan yang diajar oleh guru lokal walaupun belum tentu guru penutur asli lebih kompeten. Mentalitas pasca-kolonialisme justru dilakukan juga oleh orang-orang lokal yang lebih menghargai instruktur penutur asli berbahasa Inggris yang tidak berpengalaman—bahkan juga kadang-kadang tidak terdidik di bidangnya—dibandingkan instruktur lokal yang lancar berbahasa Inggris, berpengalaman, dan terdidik di bidangnya.

Ketepatan dan kelancaran

Proses pembelajaran bahasa asing mencakup 2 poin yang semestinya saling menunjang, yakni ketepatan dan kelancaran (*accuracy* dan *fluency*). Dalam hal ini, pengajaran di sekolah formal ditengarai terlalu menekankan pada ketepatan. Walaupun label kurikulum bahasa Inggris telah berganti beberapa kali, secara *de facto* peserta didik di kelas tetap saja menghafalkan daftar panjang

kata kerja beraturan dan tidak beraturan tanpa konteks dan rumusan sekian banyak *tenses*. Seorang peserta didik sekolah menengah dengan polosnya bertanya pada gurunya, “Kami sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Kapan kami bisa berbicara dalam bahasa Inggris dan menggunakannya?” Penekanan yang berlebihan pada ketepatan berbahasa ternyata bukan hanya menghambat kelancaran berkomunikasi tetapi juga mematikan rasa senang dan motivasi belajar.

Sebaliknya, di jalur informal, kelancaran berkomunikasi dijadikan fokus. Secara ekstrem, kursus yang menjanjikan “lancar berbicara dalam 3 bulan” akan mengabaikan ketepatan aturan berbahasa (struktur bahasa, pelafalan, dan kosa kata). Berbeda dengan kegiatan pembelajaran di sekolah formal, aktivitas belajar bahasa asing di kursus dibuat menarik dan menyenangkan. Ada banyak permainan dan kesempatan untuk menggunakan bahasa asing. Memang tidak mustahil mengajar seseorang untuk bisa lancar berbahasa asing dalam waktu singkat. Yang harus disadari, jika ketepatan berbahasa ditinggalkan demi kelancaran, dampak yang bisa muncul di kemudian hari adalah gejala *fossilisasi* atau kelancaran berbahasa dengan kesalahan-kesalahan yang sudah membatu dan sulit diperbaiki.

Mengingat keberagaman populasi peserta didik di Indonesia dan variasi kebutuhan masyarakat, para pendidik dan pembuat kebijakan perlu menelaah ulang tujuan, desain, dan implementasi kurikulum bahasa asing. Secara realistis, tidak semua anak Indonesia mempunyai kesempatan dan kebutuhan untuk berkomunikasi dalam bahasa asing. Dalam konteks seperti ini, alokasi pengajaran bahasa Inggris selama 6 tahun x (sedikitnya) 2 jam seminggu bisa jadi *mubadzir*. Dan seandainya, bahasa Inggris tetap diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah dengan alasan pemerataan akses, setiap daerah seyogyanya mempunyai kebebasan untuk menentukan tujuan dan desain kurikulum bahasa asing sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Di beberapa daerah kemampuan baca lebih dipentingkan. Sementara di daerah lain, (misalnya daerah pemasok tenaga kerja Indonesia ke luar negeri), mungkin peserta didik perlu mengembangkan kompetensi berkomunikasi lisan dalam bahasa asing (bisa Inggris, Arab, atau China) walaupun seyogyanya daerah

ini juga punya strategi jangka panjang dan tidak terus terjebak sebagai pemasok TKI bergaji minimal.

Dalam konteks keberagaman dan variasi kebutuhan ini, sangat sulit bagi sekolah untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didiknya. Keberadaan kursus-kursus bahasa asing akan tetap dibutuhkan di masa mendatang. Bahkan sekolah dan lembaga informal bisa saling mengisi kekosongan masing-masing dalam pengajaran bahasa asing.

Hilangnya Warisan Bahasa di Kalangan

Orang Indonesia di Luar Negeri³³

Berbeda dengan hewan, manusia diberkati dengan gen FOXP2 pada daerah F5 di bagian otak. Gen ini memungkinkan pengembangan kemampuan lisan dan bahasa termasuk penguasaan dua atau lebih bahasa yang dikenal sebagai bilingualisme dan multilingualisme. Banyak studi mengenai bilingualisme yang telah dilakukan yang mencakup model-model pengajaran dan pembelajaran, serta kebijakan-kebijakan yang disusun. Secara khusus, beberapa studi kemudian fokus kepada hal-hal mengenai pemindahan atau penggantian dari bahasa yang ada oleh bahasa lain – yang dikenal juga sebagai *language shift* (perubahan bahasa) dimana “suatu grup etnis secara bertahap berpindah pilihan dan penggunaan bahasa mereka dari bahasa etnis asli mereka kepada bahasa lain yang dominan secara sosiologis” (August and Hakuta, 1997). Terjadinya ledakan migrasi global, sangat terlihat bahwa para imigran tengah menghadapi tantangan-tantangan dimana bahasa warisan sedang ditinggalkan karena para keturunan mereka menempatkan nilai yang lebih kepada bahasa-bahasa lain yang lebih diminati dan bergengsi secara sosial di negara-negara tuan rumahnya. Sebuah perubahan bahasa yang jelas terjadi dari bahasa warisan kepada bahasa pertama atau bahasa kedua biasanya muncul pada kurun waktu periode yang sangat singkat. Lieberson, Dalto, dan Johnston (1975) melaporkan bahwa “jumlah hilangnya bahasa minoritas yang muncul di dalam satu generasi di Amerika Serikat setara dengan 350 tahun di negara lain.”

Sejak paruh kedua dari abad yang baru saja berlalu, ribuan imigran Indonesia telah tinggal di Amerika Serikat selama dua generasi dengan berbagai alasan. Dalam beberapa pertemuan saya dengan beberapa keluarga Indonesia di beberapa negara bagian di AS, saya menemukan suatu hal yang memilukan ketika hampir tidak ada anak-anak dari keluarga-keluarga tersebut dalam usia sekolah yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Di antara mereka, perubahan bahasa telah terjadi hanya dalam satu generasi. Hal lain

³³ Artikel ini pernah dimuat di *The Jakarta Post* pada 13 Oktober 2011 dengan judul asli “*Heritage Language Loss among Young Indonesian Overseas*”

yang lebih perlu diwaspadai adalah bahwa sepertinya tidak ada rasa penyesalan atas hilangnya bahasa warisan di kalangan generasi muda di luar negeri. Banyak keluarga menganggap fakta ini tidak terelakkan mungkin karena mereka merasa lebih bergengsi untuk lancar berbahasa Inggris dan mereka percaya bahwa penguasaan bahasa Inggris adalah sebuah akses untuk meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di negara tuan rumah.

Sebagai perbandingan, kelompok imigran Indonesia bukanlah yang terbesar di AS. Dua kelompok terbesar yang ada di sana adalah para imigran yang berbahasa China (Putonghwa dan beberapa dialek) dan Spanyol. Kelompok-kelompok ini telah merealisasikan pentingnya revitalisasi dari bahasa-bahasa warisan leluhur. Pada kenyataannya, gerakan-gerakan sosial dan politik mengenai arah kebijakan pendidikan bilingual di AS telah dipelopori oleh para pendidik dan ilmuwan yang telah mengambil sudut pandang mereka dari data yang kebanyakan diambil dari bahasa dan perkembangan kognitif anak Latino (E. Garcia and J. Nanez, *Bilingualism and Cognition*). Sementara oposisi dari pendidikan bilingual memiliki argumen-argumen mereka sendiri dan berupaya untuk membendung mandat pemerintah federal akan pendidikan bilingual di California dan Arizona, bahasa Spanyol nyatanya telah menjadi alat komunikasi di dalam komunitas-komunitas tertentu dan satu dari banyak pilihan bahasa asing yang paling disukai di sekolah-sekolah. Demikian halnya, komunitas-komunitas warga ABC (American-Born Chinese)– melalui dukungan yang sah dari para konsulat mereka – telah merealisasi keinginan kuat untuk mengorganisir sekolah-sekolah bahasa Putonghwa dan program-program ekstrakurikuler untuk melestarikan penguasaan bahasa warisan mereka di antara keturunan-keturunan mereka.

Pentingnya melestarikan bahasa warisan didasarkan pada sejumlah studi penelitian pada bilingualisme dan kognisi. Terdapat setidaknya tiga alasan yang menarik tentang pendidikan bilingual. Pertama, seperti yang Nanez, Padilla, dan Lopez-Maez (1992) sampaikan, “para bilingual mengungguli para monolingual baik pada pengukuran kecerdasan verbal maupun non-verbal ketika faktor-faktor seperti status sosial-ekonomi, keterampilan bahasa, jenis

kelamin, dan usia dikendalikan.” Sejumlah studi lain juga memberikan dukungan atas keuntungan-keuntungan kognitif dari bilingualisme di sepanjang perkembangan anak. Kedua, bertentangan dengan mitos yang beredar bahwa anak-anak kecil akan bingung ketika mempelajari dua bahasa sekaligus atau berurutan, banyak studi menunjukkan bahwa kemampuan untuk menguasai banyak bahasa adalah kemampuan sejak lahir karena manusia dikaruniai gen-gen FOXP2 di otak mereka. Kemudian, alasan yang terakhir dan paling penting adalah penggunaan bahasa warisan sebagai sebuah ekspresi identitas budaya. Bahasa adalah cara unik manusia untuk mengkomunikasikan perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahasa mengikat hubungan-hubungan antar anggota keluarga, komunitas, dan bangsa. Ketika seseorang dipisahkan dari warisan budayanya, dia akan terjerat perasaan ditinggalkan pada suatu waktu dalam hidupnya. Dalam skala yang kecil dan personal, seseorang kehilangan banyak warisan dan merasakan penderitaan ketika dia tidak dapat mengkomunikasikan atau terhubung dengan kakek/neneknya atau dengan buyutnya melalui sebuah bahasa yang sama.

Diharapkan, kepedulian dari pentingnya melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa warisan tidak terlambat muncul. Kelompok-kelompok komunitas Indonesia di luar negeri seharusnya memiliki peranan tidak hanya sebagai kelompok-kelompok pendukung tetapi juga sebagai jembatan-jembatan di antara orang-orang muda dan warisan budaya mereka. Keluarga dapat dan seharusnya membuat keputusan yang berlandaskan kesadaran dan usaha-usaha konsisten dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa di rumah. Konsulat-konsulat negara Indonesia, terutama di negara-negara maju, dapat memainkan peranan penting yang melampaui peran-peran administratif dan seremonial mereka yang tradisional. Mendukung peresmian kelas-kelas bahasa dan budaya Indonesia di luar negeri dan mensponsori program liburan pengenalan budaya untuk anak-anak dari imigran Indonesia untuk mengunjungi negara kita ini dan mempelajari kembali budaya dapat dicanangkan sebagai bagian dari agenda untuk merengkuh diaspora Indonesia dan mendefinisikan kembali kebangsaan kita.

Melestarikan Identitas Linguistik dan Keberagaman Budaya³⁴

Bangsa Indonesia sangat bangga dengan kesatuan bangsanya melalui penggunaan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Setiap bulan Oktober, sumpah tersebut diikrarkan dan digunakan untuk mengingatkan para pemuda dan orang tua untuk menghargai kesatuan di tengah-tengah keberagaman yang luas pada bangsa ini. Untuk mendukung kebijakan bahasa nasional, sering dikemukakan bahwa penggunaan sebuah bahasa nasional dapat mencegah perselisihan dan konflik antar warga. Perbandingan-perbandingan dengan negara-negara lain dimana kebijakan bahasa nasional berperan secara efektif telah disusun dan digunakan untuk menunjukkan fraksi-fraksi masyarakat dikarenakan perbedaan-perbedaan bahasa di antara warganya. Sementara saya pribadi masih mendukung kesatuan melalui penggunaan bahasa nasional, saya berkeinginan untuk menantang anggapan bahwa pembebanan bahasa nasional dapat mencegah perselisihan antar warga dan mendukung pentingnya pelestarian identitas linguistik dan integrasi bahasa-bahasa lokal di sistem sekolah untuk mempertahankan keberagaman budaya bangsa ini.

Pada komunitas sosiolinguistik, Indonesia sering dipuji atas pencapaian kesuksesannya dalam membangun dan mempertahankan kebijakan bahasa nasional dalam hubungan perbandingannya dengan beberapa negara tetangga seperti India, Filipina, dan Singapura (Joshua Fishman and Harold Schiffman, 1999). Pandangan orang-orang luar ini terhadap peranan Bahasa Indonesia seharusnya pada saat ini diujikan terhadap perkembangan kontemporer di daerah-daerah yang berbeda di Indonesia. Di kota-kota yang besar, peran Bahasa Indonesia yang mulai kabur tampak jelas di antara anak-anak yang berada di keluarga kaya yang memilih sekolah-sekolah internasional dimana instruksi dalam kelas diberikan dalam Bahasa Inggris atau bahasa internasional yang bergengsi lainnya seperti bahasa Putonghwa dan Arab. Terdapat laporan-laporan bahwa anak-anak tersebut tidak mampu menyanyi

³⁴ Artikel ini pernah dimuat di *The Jakarta Post* pada 1 Oktober 2011 dengan judul asli “*Preserve Linguistic Identities and Cultural Diversity*”

lagu kebangsaan Indonesia dan melafalkan Pancasila. Maka dari itu, terdapat keprihatinan-keprihatinan yang lebih besar bahwa bahasa nasional kita tergerus oleh penggunaan Bahasa Inggris di antara anak-anak kita daripada peran Bahasa Indonesia yang tidak digunakan sebagai alat pemersatu kelompok-kelompok etnis yang beraneka-ragam di daerah-daerah terpencil.

Di daerah-daerah terpencil, di sisi lain, peran Bahasa Indonesia sebagai media instruksi di sekolah-sekolah tetap tidak tergantikan. Pada hari-hari pertama sekolah, para murid diharapkan telah menguasai bahasa tersebut. Para guru menggunakan Bahasa Indonesia, dengan asumsi bahwa setiap anak seharusnya lancar berbahasa Indonesia. Dan jika mereka belum lancar berbahasa Indonesia, mereka dianggap “belum siap untuk belajar”. Para guru – yang biasanya datang dari luar daerah tersebut – memandang rendah budaya lokal peserta didik dan melihatnya sebagai sebuah rintangan atas pembelajaran dan *mainstreaming*. Di seluruh sistem pendidikan formal di Indonesia, para peserta didik dibentuk sedemikian rupa untuk merasa malu dengan bahasa ibu mereka dan budaya pribumi.

Kegagalan-kegagalan sekolah di antara komunitas-komunitas pribumi yang seringkali diasosiasikan dengan kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat yang terdapat dalam komunitas-komunitas mereka sendiri. Para murid, orang tua, dan juga nilai-nilai yang ada pada komunitas-komunitas tersebut disalahkan sebagai alasan-alasan untuk tingginya jumlah peserta didik *drop-out* yang tinggi dan masalah-masalah lain di sekolah. Tingginya tingkat *drop out* di antara anak-anak Amungme dan Kamoro di daerah Mimika, Papua seharusnya menjadi sebuah keprihatinan yang meresahkan bagi para otoritas pendidikan lokal maupun nasional untuk melihat isu-isu tersebut dengan cara yang lebih manusiawi.

Sistem pendidikan formal di Indonesia menggunakan sebuah model penggabungan yang berdasarkan paradigma mengapung atau tenggelam dimana anak-anak dengan kemampuan linguistik yang terbatas dengan bahasa ibu yang memiliki status rendah dipaksa untuk menerima instruksi melalui media bahasa nasional. Diskontinuitas di antara budaya murid di rumah dan budaya sekolah adalah perjalanan spiral menurun dari masalah-masalah sekolah dan

kemudian kegagalan-kegagalan dalam kehidupan di masa mendatang. Model penggabungan ini bagi para anak-anak pribumi di daerah-daerah terpencil sesuai dengan definisi dari PBB bisa dianggap sebagai genosida linguistik. Ketika PBB melakukan pekerjaan-pekerjaan persiapan untuk apa yang nanti kemudian menjadi Konvensi Internasional untuk Pencegahan dan Hukum Tindakan Kriminal Pembantaian (E 793, 1948), genosida linguistik dan budaya didiskusikan bersama dengan pembantaian secara fisik dan dilihat sebagai tindakan kriminal serius menentang kemanusiaan (lihat Capotorti 1979).

Genosida linguistik didefinisikan sebagai “pelarangan penggunaan bahasa dari suatu kelompok tertentu dalam percakapan sehari-hari ataupun di sekolah-sekolah, atau dalam bentuk cetak dan sirkulasi dari publikasi-publikasi bahasa dari kelompok tersebut” (Art 3, 1). Pelarangan dapat, tentu saja, menjadi terang-terangan dan langsung (contohnya, kriminalisasi penggunaan bahasa ibu, seperti di negara Turki yang berhadapan dengan suku Kurdi) atau tersembunyi dan tidak langsung, dilakukan melalui cara-cara ideologis dan struktural. Jika bahasa minoritas tidak digunakan sebagai media utama pendidikan dan pengasuhan anak, penggunaan bahasa minoritas secara tidak langsung dilarang pada hubungan sehari-hari atau di sekolah-sekolah, itulah yang kemudian disebut dengan masalah genosida linguistik. Maka, merampas anak-anak muda Amungme dan Kamoro dari komunitas-komunitas rumah mereka dan menempatkan mereka di Jakarta untuk meraih pencapaian akademik demi nama penghargaan bergaya olimpiade jelas dapat dikategorikan sebagai genosida linguistik.

Diperkirakan bahwa di seluruh dunia, satu bahasa mati setiap minggunya. Ketika sebuah bahasa mati, budaya-budaya arif yang telah membentuk bahasa tersebut juga hilang karena setiap bahasa terdiri atas kekayaan dan nuansa-nuansa yang generasi-generasi sebelumnya telah bangun selama berabad-abad. Melestarikan identitas linguistik dan keberagaman budaya di antara komunitas-komunitas pribumi di seluruh Indonesia dapat dan seharusnya dilaksanakan di dalam kerangka sistem pendidikan nasional kita. Pengaruh televisi yang dapat menembus daerah-daerah secara otomatis menguntungkan penyebaran dan pelestarian Bahasa

Indonesia di seluruh negara. Keprihatinan-keprihatinan akan tingginya potensi bahasa-bahasa etnis yang hilang dan akan kegagalan-kegagalan sekolah dikarenakan diskontinuitas antara budaya peserta didik di rumah dan norma-norma di sekolah adalah lebih mendasar dan harus segera ditangani. Anak-anak dari komunitas-komunitas pribumi dengan bahasa ibu yang memiliki status rendah seharusnya diberikan kesempatan untuk dididik selama setidaknya masa taman kanak-kanak dan tiga tahun pertama sekolah dasar dengan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Akibatnya, permintaan akan para guru yang bisa dwibahasa akan meningkat. Pemerintah nasional dan otoritas pendidikan lokal seharusnya bekerja keras untuk mempersiapkan para guru yang bersedia untuk mendidik anak-anak dari komunitas-komunitas pribumi dan menghargai budaya-budaya lokal mereka. Pelatihan etnografis seharusnya menjadi sebuah bagian penting dari program-program pengembangan profesionalisme baik *pre-service* maupun *in-service*. Semua usaha ini pasti akan membutuhkan banyak biaya tapi sangat berharga dalam penyelesaian masalah-masalah sekolah yang berada di komunitas-komunitas pribumi.

Resolusi Konflik melalui Spiritualitas³⁵

Sekitar 500 orang dari segala penjuru dunia berkumpul di Ubud, Bali dalam suatu konferensi bertajuk “*Quest for Global Healing*” dan melakukan perjalanan penyembuhan diri, komunitas, dan global. Para penyelenggara yang berasal dari Amerika Serikat nampaknya sangat terkesan dan tersentuh dengan reaksi orang-orang Bali terhadap serangan bom yang telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan di Bali. Mereka membandingkannya dengan reaksi pemerintah Amerika Serikat terhadap peristiwa 9/11. Ketika pemerintah Amerika Serikat (dan sebagian masyarakat pendukungnya) menyikapi serangan tersebut dengan sikap “balas dendam dan serang balik,” orang Bali justru melakukan refleksi kultural-spiritual dan pembersihan diri. Maka dari itu, Bali dipilih sebagai lokasi pertemuan besar pertama yang menghadirkan beberapa tokoh seperti penerima Penghargaan Nobel Perdamaian 1984 Desmond Tutu, manusia ke-6 yang mendarat di bulan Edgar Mitchell, mantan Direktur Amnesty Internasional James O’Dea, pemuka etnis Maori di New Zealand Pauline Tangiora, dan tokoh Bali Prof. Luh Ketut Suryani.

Tema sentral “Penyembuhan dan Pengampunan” sangat mewarnai setiap sesi dan dialog di kalangan peserta. Suara-suara yang muncul baik dalam sesi panel dan dialog kelompok mengungkapkan suatu perjuangan mengatasi peristiwa menyakitkan dalam hidup dan menemukan mutiara dalam luka pribadi maupun komunitas. Seorang pemuda Kamboja Arn Chorn-Pond mengungkapkan lukanya yang bermula dari pengeboman Amerika Serikat di Kamboja dan pembunuhan orang tua dan saudara-saudaranya oleh tentara Khmer Merah. Pada usia ke-9, dia sudah harus menyaksikan kebrutalan perang dan mematikan seluruh perasaannya ketika dia dipaksa menembaki sesama anak kecil. Seorang perempuan Yahudi yang ibunya menjadi korban penyiksaan Nazi di Auschwitz bertemu lagi dalam satu sesi panel dengan seorang perempuan Jerman yang memiliki kakek yang sangat dia cintai dan ternyata adalah aktivis Nazi. Kedua perempuan inipun melakukan

³⁵ Artikel ini pernah dimuat di *Kompas* pada 26 November 2004

penyembuhan diri dari situasi masa lalu yang menyakitkan dan saling mengampuni.

Sementara beberapa orang berupaya melakukan rekonsiliasi dengan masa lalu dan mencari mutiara dalam luka-luka batin mereka, beberapa yang lain sedang berjuang menghadapi kekerasan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka di masa kini. Seorang pemuda Palestina memaknai kekerasan yang terjadi antara bangsanya dengan Israel dalam lingkaran setan penyiksa-korban-penyiksa yang terus mendominasi sejarah peradaban manusia. Bangsa Yahudi yang pernah menjadi korban kekerasan Nazi dan tidak melakukan proses penyembuhan secara tuntas kini mengambil peran sebagai penyiksa bangsa lain.

Ibarat bunga teratai yang tumbuh di tengah-tengah lumpur, para individu yang tampil di konferensi “*Quest for Global Healing*” telah bangkit dari kepedihan dan kehancuran masa lalu maupun masa kini. Menariknya, mereka berasal dari latar belakang etnis, suku, agama, dan sosio ekonomi yang beragam. Yang menyatukan mereka dalam perjalanan hidup ini adalah kepedulian mereka terhadap kerusakan yang telah terjadi akibat tindakan kekerasan dan balas dendam tiada henti seperti yang diungkapkan oleh pejuang hak sipil Afrika-Amerika Martin Luther King, Jr. “*where the law of an eye for an eye operates, that leaves the world blind*” (jika yang berlaku hukum balas dendam satu mata diganti satu mata, dunia akan menjadi buta).

Kepedulian itu kemudian membangun suatu dorongan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Namun perdamaian tidak akan terwujud tanpa adanya suatu proses penyembuhan di berbagai tingkat mulai dari pribadi, komunitas, dan dunia. Menarik untuk disimak, proses penyembuhan yang disodorkan berada pada tataran spiritualitas dan keluar dari kungkungan agama. Dalam berbagai peristiwa kekerasan di dunia, agama-agama beserta lembaga-lembaganya telah gagal membawa perdamaian dan penyembuhan. Bahkan agama telah dipakai sebagai alat pembenar maupun tameng bagi segala tindakan yang merusak kemanusiaan.

Mungkin di setiap agama, ada orang-orang yang meletakkan agama sebagai ideologi dan pembenaran untuk melakukan pertarungan menghancurkan mereka yang berbeda pandangan.

Mahatma Gandhi dibunuh oleh penganut Hindu fanatik karena Gandhi menyebarkan semangat cinta kasih dan perdamaian bagi semua orang dan keterbukaannya terhadap kaum minoritas Islam di India. Abd A'la mengeluhkan upaya penarikan Islam dari keberadaannya sebagai "*rahmatan lil alamin*" menjadi alat pengentalan identitas kelompok dan golongan serta berbagai tindakan penganutnya yang sering merugikan pihak lain melalui tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang dianggap tak sejalan dengan misi keberagaman mereka" (*Kompas* 26/11/2004). Dari kalangan penganut agama Kristen, George Bush merasa mendapat mandat dari Tuhan ketika melakukan invasi ke negara lain dan menyatakan perang terhadap terorisme. Beberapa tahun yang lalu, di Florida seorang aktivis gerakan *pro-life* yang mengaku penganut Kristen sejati menembak mati seorang dokter yang membuka klinik aborsi. Ironisnya, aktivis *pro-life* ini dengan bangga dan tanpa penyesalan sedikitpun menampilkan diri sebagai pahlawan yang telah mencegah pembunuhan bayi-bayi tak berdosa melalui tindakan pembunuhannya.

Di Indonesia konflik antar kelompok sudah banyak terjadi dan menimbulkan banyak korban. Dilatar-belakangi oleh perebutan ruang-ruang publik dan sumber daya antar manusia, konflik-konflik ini muncul ke permukaan sebagai pertarungan antar agama, etnis, suku, dan ideologi. Pada sisi yang lain, forum-forum lintas agama dan etnis juga bermunculan dalam bentuk seminar, dan dialog. Pertemuan lintas agama dan etnis ini sangat baik dan dibutuhkan untuk terus membangun dan memperkaya wacana multikultural dan kebangsaan di Indonesia. Pada tataran wacana, biasanya hanya para pemuka dan anggota elit kelompok yang terlibat sehingga wacana hanya tinggal wacana. Slogan multikulturalisme hanya indah diucapkan dan tidak menjadi operasional dalam keberagaman kehidupan sehari-hari. Konflik Dayak-Madura, kerusuhan Ambon dan Poso dan kerusuhan Mei 1998 merupakan sebagian kecil dari luka-luka menyakitkan dalam kehidupan berbangsa yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum mampu belajar dari sejarah.

Dalam transisi bangsa ini menuju demokrasi, antisipasi maupun penanganan konflik perlu dilakukan dengan lebih serius dan bijak.

Terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Pertama, dialog lintas agama dan etnis harus diperluas sehingga resolusi konflik tidak terjadi hanya di kalangan elit. Tentunya, dialog ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk seminar dan konferensi melainkan juga dalam ruang publik sehari-hari seperti sekolah, kegiatan sosial, kelompok-kelompok anak muda, dan organisasi massa. Segregasi sosial dalam ruang-ruang publik makin memprihatinkan dan perlu dicairkan.

Kedua, para aktivis forum lintas agama dan etnis biasanya (walaupun ada juga yang bertopeng) merupakan para individu yang sudah bisa menerima prinsip hidup multikulturalisme. Hasil kerja para individu dari beragam kelompok ini perlu dilanjutkan pada tingkatan yang lain. Langkah selanjutnya yang jauh lebih sulit daripada pencapaian pemahaman lintas agama adalah menularkan pemahaman ini bagi anggota kelompok sendiri yang masih terkungkung dalam penjara agamanya. Sudah waktunya para penganut agama yang bisa bersikap toleran dan moderat terhadap penganut lain untuk kembali ke dalam dan berdialog dengan rekan-rekan dari kelompok agamanya sendiri dan membawa pencerahan bahwa agamanya seharusnya menjadi berkah bagi semua umat manusia. Sekolah bisa menjadi wahana yang sangat strategis untuk menanamkan benih-benih perdamaian. Sekolah-sekolah yang berafiasi agama mempunyai kekuatan khusus untuk penanaman nilai-nilai spiritualitas karena mereka melandaskan program-programnya pada kerangka acuan yang sama. Namun sekolah-sekolah ini juga perlu berupaya ekstra untuk mengenalkan perbedaan dan perdamaian kepada peserta didik mereka.

Ketiga, penanganan pasca-konflik perlu dilakukan dengan lebih terarah dan serius. Berbagai kerusuhan yang pernah terjadi di tanah air telah padam karena berbagai alasan pragmatis seperti intervensi penguasa, musuh sudah dihabisi, kelelahan bertarung atau provokator sudah mencapai tujuannya. Namun belum tampak adanya penanganan serius bagi korban yang masih hidup. Padahal fenomena korban yang mengambil alih peran sebagai penyiksa ini tidak hanya terjadi pada tingkatan individu melainkan juga bisa terjadi antar generasi. Berbagai bukti dalam sejarah peradaban manusia telah menunjukkan fenomena pembalasan berantai antar

generasi. Konseling dan pendampingan pasca-konflik perlu dilakukan untuk memutus rantai lingkaran setan kekerasan. Selain itu, program pendampingan ini akan bisa menemukan beberapa individu yang berhasil mengubah luka-lukanya menjadi mutiara dan tampil sebagai utusan perdamaian bagi semua kelompok.

Akhirnya, ketika agama dengan segala keterbatasannya belum berhasil mengatasi berbagai tindakan kekerasan di dunia ini, spiritualitas menjanjikan penyembuhan dan perdamaian. Dalam gerakan spiritualitas, manusia diajak untuk melihat keterkaitannya dengan manusia lain dan dengan Penciptanya melampaui sekat-sekat agama, ras, etnisitas dan kelasnya. Seperti kata Desmond Tutu, *“a person is a person through another person”* (seorang manusia adalah manusia melalui manusia lain) dan *“when I undermine your humanity, I too am dehumanized”* (ketika saya merendahkan kemanusiaan Anda, kemanusiaan sayapun direndahkan).

Daftar Pustaka

- August, D. & Hakuta, K. 1997. *Improving Schooling for Language-Minority Children: A Research Agenda*. Washington D.C.: National Academy Press
- Burke, B. 1979. *Attitudes of University Students and Staff to Student Counselling*. Sydney: UNSW
- Capotorti, F. 1979. *Study of the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. New York: United Nations
- Dardjowidjojo, S. 2000. English teaching in Indonesia. *English Australia Journal* 18(1). hlm. 22-30
- Darley, J. & Batson, C. D. 1973. "From Jerusalem to Jericho": A study of situational and dispositional variables in helping behavior. *Journal of Personality and Social Psychology* 27(1). hlm. 100-108
- Darmaningtyas. 2005. Guru: Minder tapi terpaksa keminter. *Basis: Menembus Fakta* 54(7/8). hlm. 30-34
- Darmaningtyas, dkk. 2004. *Membongkar Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Driyakarya. 1980. *Tentang Pendidikan*. Kanisius: Yogyakarta
- Eisner, E.W. dan E. Vallance. 1974. *Changing Conceptions of Curriculum*. Berkeley, CA: McCutchan
- Falk, R. 1995. *On Humane Governance: Towards a New Global Politics*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press
- Garcia, Egugene E., Nanez Sr., Jose E. 2011. *Bilingualism and Cognition: Informing research, pedagogy, and policy*. Waschington D.C.: American Psychology Association
- Bilingualism and Cognition
- Glatthorn, A. 1987. *Curriculum Leadership*. Glenview: Scott, Foresman and Co.

- Grimes, B. F (Ed.). 1996. *Ethnologue*. Dallas: Summer Institute of Linguistics, Inc.
- Hardjono, R. 2012, December 5th. A demographic bonus or time-bomb?. *The Jakarta Post* . Retrieved on August 8th, 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/05/a-demographic-bonus-or-time-bomb.html>
- Hartshorne, H. & May. M. A. 1927. *Testing the Knowledge of Right and Wrong*. Chicago: Religious Education Association
- Hausmann, R., Rodrik, D. & Velasco, A. 2005. *Growth Diagnostics*. Cambridge: John F. Kennedy School of Government, Harvard University
- Heinsohn, Gunnar. 2008. *Sohne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. (Sons and World Powers: Terror in the Rise and Fall of Nations)*. Munich: Piper.
- Huxley, A. 1932. *Brave New World*. London: Chatto & Windus
- Irianto, S. 2012, April 14th. Masa depan perguruan tinggi. *Kompas*
- Isseks, M. 2011. *How PowerPoint Is Killing Education*. *Teaching Screenagers* (68) 5. hlm. 74-76
- Jacobs, G. M. & Farrell, T. S. C. 2003. Understanding and Implementing the CLT Paradigm. *RELC Journal*. (34)
- Joni, T. R. 2007. *Prospek Pendidikan Profesional Guru di Bawah UU No. 14 Tahun 2005*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Lanqing, L. 2004. *Education for 1.3 Billion*. China: Foreign Language Teaching & Research Press
- Lie, A. 2001. *Cooperative Learning*. Jakarta: Grasindo
- Lie, A. 2003. *Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Jakarta: Grasindo
- Lieberson, S., Dalto G., & Johnston, M. E. 1975. The course of mother tongue diversity in nations. *American Journal of Sociology* (81). Hlm. 34-61
- Náñez, J. E., Padilla, R. V., & López-Máez, L. 1992. Bilinguality, intelligence, and cognitive information processing. In R.V.

- Padilla and A.H. Benavides (Eds.), *Critical perspectives on bilingual education research*. hlm. 43-69. Tempe, AZ: Bilingual Press/Editorial Bilingüe.
- Nugroho, H (Ed.). 2002. *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Kanisius
- Palmer, P. J. 2003. *The Courage to Teach*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Priyono, H. 2004. Mencari Badan Publik: Refleksi bagi rehabilitasi arti 'pembangunan'. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. (8)2
- Purwo, B. K. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa: Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Kanisius
- Suparno, P. 2004. *Guru Demokratis di Era Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Lickona, T. 2004. *Character Matters*. New York: Touchstone
- Tilaar, H. A. R. 2004. *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari perspektif postmodernisme dan studi cultural*. Jakarta: Grasindo
- Tilaar, H. A. R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tilaar, H. A. R. 2015. *Pedagogik Teoritis untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Welner, K. & Oakes, J. 1996. The Politics of Culture: Understanding local political resistance to detracking in racially mixed schools. *Harvard Educational Review* (66)1. Hlm. 93-118
- Widiastono, T. D. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas
- Widiyanto, T. & Sarapung. E. 2005. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zhao, Yong. 2010. *Catching Up or Leading the Way*. Alexandria, VA: ASCD

Biodata Penulis

Prof. Anita Lie, Ed.D mendapatkan gelar Master of Arts dalam bidang Sastra Inggris dan Doktor Pendidikan dalam bidang kurikulum dan pengajaran dari Baylor University, Amerika Serikat pada 1994. Pada tahun 1996 dia menjadi dosen tamu dan mengajar Curriculum Design and Implementation di SEAMEO RELC, Singapore. Dia juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa universitas di luar Indonesia. Pada 2011, Anita Lie menjadi Visiting Scholar di U.C. Berkeley melalui grant PAR dari DIKTI, Kemendikbud.



Dia mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya The Rotary International Ambassador of Good Will, PEO, ACUCA Fellowship, dan 2000 SEAMEO Jasper Fellowship Award dari pemerintah Kanada untuk kategori penelitian terbaik.

Saat ini, Anita Lie berkarya sebagai dosen di FKIP dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Dia juga berkarya sebagai konsultan untuk beberapa lembaga pendidikan.

Anita Lie mempresentasikan makalah dalam forum-forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional serta menulis artikel-artikel untuk media massa serta buku-buku pendidikan di antaranya *101 Cara Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak*, *101 Cara Mengembangkan Kecerdasan Anak*, *101 Cara Menumbuhkan Kemandirian dan Tanggung Jawab Anak*, *Cooperative Learning*, *English via Environmental Education*, *Building Bridges*, dan *Beyond the Classroom*.